



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL**



NOMOR: 903 / 02816

NOMOR: 903 / 646

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022**



NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 903/ 02816
NOMOR 903/ 646

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : ABDUL HALIM MUSLIH
Jabatan : Bupati Bantul
Alamat Kantor : Jalan Robert Wolter Monginsidi Nomor 1 Bantul

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

2. a. Nama : HANUNG RAHARJO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- b. Nama : NUR SUBIYANTORO
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- c. Nama : SUBHAN NAWWAWI
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul
- d. Nama : DAMBA AKTIVIS
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantul
Alamat Kantor : Jalan Jenderal Sudirman Nomor 85 Bantul

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan APBD, diperlukan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum APBD yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2022, terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan dan pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Bantul, 25 Agustus 2021.

BUPATI BANTUL
Selaku,
PIHAK PERTAMA



ABDUL HALIM MUSLIH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANTUL

Selaku,
PIHAK KEDUA



HANUNG RAHARJO
KETUA



NUR SUBIYANTORO
WAKIL KETUA



SUBHAN NAWWAWI
WAKIL KETUA



DAMBA AKTIVIS
WAKIL KETUA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)	1
1.2. Tujuan Penyusunan KUA	2
1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA	3
1.4. Sistematika	5
BAB II. KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	7
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	7
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	19
BAB III. ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DAN PENDAPATAN DAERAH (APBD)	25
3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN 2021	25
3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD 2021	29
BAB IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	34
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2021	34
4.2. Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	38
BAB V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	44
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja	44
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga	49
BAB VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	57
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan	57
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan	58

BAB VII. STRATEGI PENCAPAIAN	63
7.1. Strategi Pemerintah Daerah dalam Mencapai Target Pendapatan Daerah	63
7.2. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah	65
 BAB VIII. PENUTUP	 153

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul Tahun 2015-2020	12
Tabel 2.2	Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020	14
Tabel 2.3	Perkembangan Laju Inflasi di Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2016-2020.....	15
Tabel 2.4	Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul 2016-2020	16
Tabel 2.5	Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020	18
Tabel 2.6	Indeks Kemandirian Fiskal di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020	22
Tabel 2.7	Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020	23
Tabel 3.1	Indikator Ekonomi Makro di Indonesia Tahun 2022	26
Tabel 3.2	Indikator Ekonomi Makro dan Asumsinya di Kabupaten Bantul dan DIY Tahun 2022.....	29
Tabel 4.1	Realisasi Anggaran Pendapatan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 s.d. 2020.....	39
Tabel 4.2	APBD Tahun 2021 dan Prediksi APBD Tahun 2022 sesuai PP No.12 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul	40
Tabel 4.3	Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	42

Tabel 4.4	Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.....	42
Tabel 5.1	Realisasi Anggaran Belanja di Kabupaten Bantul Tahun 2016 2020	48
Tabel 5.2	APBD Tahun 2021 dan Prediksi APBD Tahun 2022 sesuai PP No.12 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul	49
Tabel 5.3	Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2022	52
Tabel 5.4	Rekapitulasi Belanja Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022	55
Tabel 6.1	Realisasi Pembiayaan Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2016 s.d. 2020	59
Tabel 6.2	APBD Tahun 2021 dan Prediksi APBD Tahun 2022 sesuai PP No.12 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul	60
Tabel 6.3	Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2022.....	60
Tabel 7.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bantul	66
Tabel 7.2	Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah	74
Tabel 7.3	Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul dengan Prioritas Pembangunan DIY dan Nasional Tahun 2022	134
Tabel 7.4	Target Capaian SPM Kabupaten Bantul Tahun 2022	136

Tabel 7.5	Usulan BKK Dana Keistimewaan per Urusan Di Kabupaten Bantul Tahun 2022	137
Tabel 7.6	Pemetaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dalam Program, Kegiatan dan Sub kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2022	140
Tabel 7.7	Pembangunan Nasional terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022	148

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUA) merupakan suatu dokumen yang memuat kebijakan terkait pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasari untuk periode satu tahun. Rancangan KUA wajib disusun oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa penyusunan rancangan KUA berdasarkan RKPD dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun. Penyusunan rancangan KUA tahun 2022 mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022.

Rancangan Kebijakan Umum APBD memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan pemerintah daerah untuk setiap urusan pemerintah daerah yang disertai kondisi keuangan pemerintah daerah meliputi kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya yang harus menjadi acuan bagi setiap Perangkat Daerah (PD) dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Rumusan Kebijakan Umum APBD juga merupakan hasil sinergi yang harmonis antara kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam hal menjamin sinkronisasi program dan kegiatan maka Penyusunan KUA tahun 2022 juga mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 14 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul tahun 2006-2025 dan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026.

Secara umum Rancangan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bantul Tahun 2022 merupakan respon dan harus dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pembangunan

daerah. Permasalahan pembangunan daerah merupakan *gap expectation* antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara apa yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan sedang dibuat.

Beberapa permasalahan yang dihadapi Kabupaten Bantul yang merupakan latar belakang dari KUA 2022 antara lain:

- a. Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan terkontraksinya pertumbuhan ekonomi;
- b. Pertumbuhan pendapatan kelompok menengah ke atas belum diiringi pertumbuhan pendapatan pada kelompok miskin;
- c. Belum tepatnya sasaran program, kurangnya keterpaduan dalam implementasi, serta belum optimalnya fungsi institusi yang mengkoordinasikan penanggulangan kesmiskinan;
- d. Belum optimalnya kinerja pengelolaan BOP SD dan SMP;
- e. Masih banyak sarpras infrastruktur yang rusak;
- f. Kualitas tenaga kerja tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja

Sedangkan tantangan yang dihadapi pada Tahun 2022 mengenai perekonomian Kabupaten Bantul di masa pandemi, pasca pandemi *Coronavirus Disease* (Covid-19) dan prediksinya yang dapat memengaruhi kinerja perekonomian daerah, serta kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

KUA disusun dengan tujuan untuk menentukan arah kebijakan dan sasaran prioritas pembangunan daerah. KUA tahun anggaran 2022 memuat strategi dan prioritas pembangunan serta upaya pencapaian target kinerja yang terukur melalui program-program yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, pada setiap urusan pemerintahan daerah disertai dengan proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, serta sumber dan penggunaan pembiayaan dengan asumsi yang mendasarinya. Dalam hal ini sesuai Permendagri Nomor 90 Tahun 2019, program dan kegiatannya dikelompokkan kedalam 6 Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 18 Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 Urusan Pilihan, 2 Unsur Pendukung, 4 Unsur Penunjang, 1 Unsur Pengawas, Unsur Kewilayahan (Kecamatan), dan Urusan Pemerintahan Umum (kesatuan bangsa dan politik).

1.3. Dasar Hukum Penyusunan KUA

Dasar penyusunan KUA tahun anggaran 2021 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah;
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
17. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 61 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah DIY Tahun 2022;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pajak Hotel;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Restoran;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pajak Parkir;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Penerangan Jalan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 07 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang;

29. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2018 tentang Retribusi Pelayanan Pemakaman;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah;
31. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Bank Pembangunan Daerah Provinsi DIY dan Badan Usaha Kredit Pedesaan Provinsi DIY;
32. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah DIY;
33. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 22 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah.
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.
35. Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Kabupaten Bantul Nomor 903/02816 dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantul Nomor 903/646 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022

1.4. Sistematika

Penyajian penulisan KUA Tahun Anggaran 2022 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan Penyusunan KUA
- 1.3 Dasar Hukum Penyusunan KUA
- 1.4 Sistematika

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 1.1. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBN
- 1.2. Asumsi dasar yang digunakan dalam APBD

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan diproyeksikan untuk tahun anggaran 2022
- 4.2. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan perencanaan belanja
- 5.2. Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan ekonomi daerah Kabupaten Bantul tahun 2022 berpedoman pada Rancangan RPJMD Kabupaten Bantul tahun 2021-2026 dan diselaraskan dengan RKP 2022 dan RKPD DIY tahun 2022. Penyelarasan juga disesuaikan dengan kondisi pandemi Covid-19. Arah kebijakan ekonomi daerah menjadi dasar kebijakan pengembangan sektoral dan regional yang dijabarkan lebih lanjut ke dalam program, kegiatan dan sub kegiatan.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Bantul pada Tahun 2021 masih tidak dapat dilepaskan dari pandemi covid-19. Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 4,8 persen. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19 harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru virus *Corona*. Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi.

Tantangan dan prospek perekonomian daerah dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2022 adalah mulai pulihnya aktivitas perekonomian seperti UMKM, perdagangan, pariwisata dan kegiatan industri. Kondisi tersebut akan memacu perekonomian daerah, peningkatan lapangan kerja, dan meningkatnya pendapatan daerah.

Kebijakan bidang ekonomi Kabupaten Bantul diarahkan pada percepatan pemulihan ekonomi dengan prioritas peningkatan manajemen pemulihan ekonomi dan sosial serta penguatan infrastruktur dengan memperhatikan protokol kesehatan.

2.1.1 Kondisi dan Arah Perekonomian Nasional

Pada awal tahun 2020, hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia, telah terjangkit penyebaran pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 berdampak pada perekonomian nasional yaitu terganggunya mobilitas masyarakat, terputusnya mata-rantai pasokan barang dan jasa serta tersendatnya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata. Hal ini mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran dan angka kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh

sangat lambat, bahkan bisa terjadi kontraksi jika pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama.

Pada pertengahan tahun 2020 mulai diberlakukan kebijakan tatanan normal baru, yaitu kebijakan membuka kembali aktivitas ekonomi, sosial dan kegiatan publik secara terbatas dengan menggunakan standar atau protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah. Pada situasi normal baru ini, perkantoran, industri, sektor jasa, dan perdagangan mulai dibuka untuk mendukung keberlangsungan perekonomian. Selanjutnya pada tahun 2022, pandemi Covid-19 diharapkan dan diasumsikan bisa diatasi, sehingga kehidupan perekonomian dapat kembali pulih.

Arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan tema dalam RKP 2022 adalah "Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural". Prioritas pembangunan diarahkan pada tujuh hal sebagai berikut:

- 1) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan;
- 2) Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan;
- 3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
- 4) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
- 5) Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar;
- 6) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim;
- 7) Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.

Sasaran dan target yang harus dicapai tahun 2022, yaitu:

- 1) Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,4 – 6,0;
- 2) Tingkat kemiskinan 8,5 - 9,0;
- 3) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,44 – 73,48;
- 4) Indeks Gini 0,376 - 0,378;
- 5) Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 6,24 – 5,52.

2.1.2 Kondisi dan Arah Perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta

Perekonomian DIY triwulan I-2021 terhadap triwulan I-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 6,14 persen (*y-on-y*), sedangkan perbandingan dengan triwulan IV-2020 mengalami kenaikan 0,86 persen (*q-to-q*). Dijelaskan lebih lanjut bahwa:

- 1) Pertumbuhan lapangan usaha terutama pada sektor informasi dan komunikasi 31,91 persen; pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang 18,24 persen; konstruksi 11,4 persen; jasa kesehatan dan kegiatan sosial 10,93 persen; dan pertanian, kehutanan dan perikanan 10,86 persen (*y-on-y*);
- 2) Pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2021 didukung oleh pertumbuhan lapangan usaha terutama andil dari sektor informasi dan komunikasi sebesar 3,87 persen; konstruksi 1,03 persen; pertanian, kehutanan dan perikanan 1,01 persen; jasa pendidikan 0,53 persen; dan jasa kesehatan dan kegiatan sosial 0,32 persen (*y-on-y*).
- 3) Beberapa lapangan usaha belum mampu tumbuh atau berkontraksi, terutama pada sektor transportasi dan pergudangan 12,01 persen; pengadaan listrik dan gas 6,21 persen; pertambangan dan penggalian 3,05 persen; penyediaan akomodasi makan dan minum 2,13 persen; dan *real estate* 1,46 persen(*y-on-y*).
- 4) Dari sisi Jenis Pengeluaran, terdapat pertumbuhan pada Inventori 16,08 persen; pembentukan modal tetap bruto 5,88 persen; dan konsumsi Lembaga Non Profit yang melayani Rumah Tangga (LNPRT) sebesar 1,92 persen (*y-on-y*).
- 5) Dari sisi Jenis Pengeluaran terjadinya kontraksi pertumbuhan ekonomi terutama disumbangkan oleh net ekspor antar daerah 376,92 persen; impor luar negeri 4,21 persen; dan ekspor luar negeri 2,01 persen.

Tema RKPD Tahun 2022 DIY adalah “Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Target indikator ekonomi makro yang akan dicapai Provinsi DIY pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 5,00 – 5,40
2. Tingkat kemiskinan 11,00 – 12,68
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,60 - 81,30
4. Indeks Gini 0,4262 – 0,4235
5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 3,23 – 3,50.

2.1.3 Kondisi Ekonomi Kabupaten Bantul

Acuan dalam penentuan proyeksi target makro ekonomi berdasarkan tren capaian tahun 2016 - 2019 dan tidak memasukkan capaian tahun 2020 disebabkan adanya data yang bersifat anomali sebagai dampak atas wabah

Covid-19, dengan asumsi capaian tahun 2020 sebagai tahun dasar. Pada tahun 2021 diperkirakan ada peningkatan capaian indikator makro Ekonomi dan tahun 2022 diharapkan pandemi Covid-19 dapat ditangani meskipun kondisi belum sepenuhnya pulih. Kerangka ekonomi makro Tahun 2022 meliputi pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, IPM, Indeks Gini, dan tingkat pengangguran, serta arah kebijakan keuangan daerah yang diprediksikan sebagai berikut:

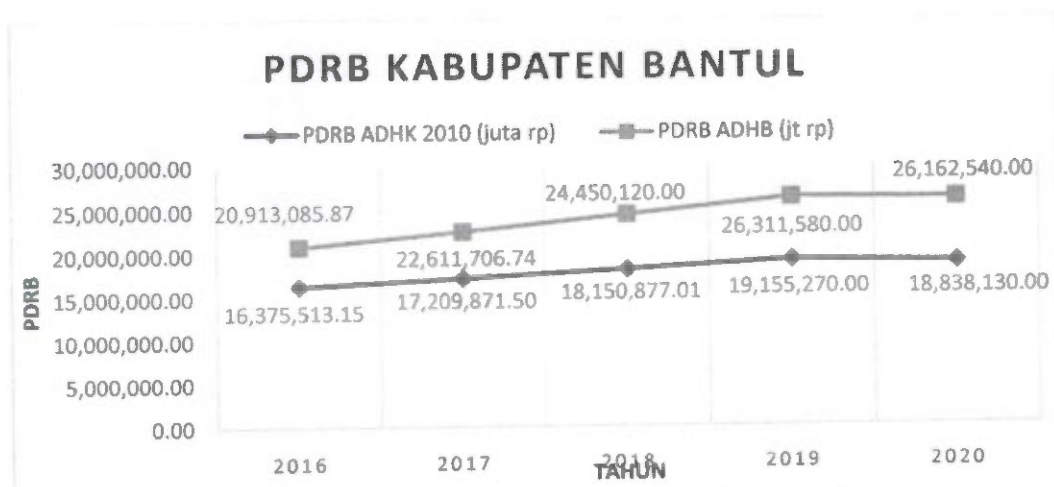
1. Laju Pertumbuhan Ekonomi 2,50 – 4,10
2. Tingkat kemiskinan 13,77 – 11,95
3. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 80,63 - 81,03
4. Indeks Gini 0,37 – 0,32
5. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) 4,00 – 3,00.

2.1.3.1 Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah (barang dan jasa) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah selama periode tertentu. PDRB merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah, pertumbuhan ekonomi dan struktur ekonomi daerah. Dalam arti lain, PDRB menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola dan menggunakan sumberdaya yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa. PDRB dibedakan dalam dua jenis penilaian, yaitu PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan.

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan PDRB, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Besaran PDRB Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada grafik berikut:

Gambar 2.1
Perkembangan Nilai PDRB di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2021

Dari gambar di atas ditunjukkan bahwa peningkatan PDRB atas dasar harga berlaku antara tahun 2018-2019 (periode satu tahun) telah mencapai 1,86 triliun rupiah. Pencapaian PDRB tahun 2019 ini merupakan PDRB yang tertinggi selama lima tahun terakhir. Jika melihat grafik yang menggambarkan PDRB Kabupaten Bantul yang menggunakan perhitungan atas dasar harga konstan, polanya tidak jauh berbeda dengan yang dihitung menggunakan harga berlaku, yaitu dalam periode 2016-2019 mengalami peningkatan dan PDRB tahun 2019 merupakan capaian tertinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Antara tahun 2018-2019 tercapai peningkatan sebesar 1,0 triliun rupiah. Namun pada tahun 2020 PDRB mengalami penurunan, hal ini karena dampak pandemi Covid-19 yang mempengaruhi penurunan kontribusi beberapa sektor lapangan usaha secara signifikan.

Gambar 2.2
Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bantul Tahun 2020 (dalam persen)



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2021

Pada tahun 2020 struktur PDRB menurut lapangan usaha dapat dilihat bahwa lima kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi terbesar adalah lapangan usaha industri pengolahan; lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan; lapangan usaha penyediaan akomodasi dan makan minum; lapangan usaha informasi dan komunikasi; dan lapangan usaha konstruksi. Peran kelima kategori tersebut pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 kecuali kategori informasi dan komunikasi. Hal ini dipengaruhi adanya pandemi Covid-19. Oleh sebab itu menjadi pertimbangan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa yang akan datang, maka program kegiatan dapat diprioritaskan pada kategori lapangan usaha tersebut.

Kontraksi perekonomian DIY akibat COVID-19 juga “terdistribusi” di kabupaten/kota sesuai ciri khasnya masing-masing. Pertumbuhan ekonomi tahun 2020 mengalami kontraksi karena ada beberapa kendala pada sektor/lapangan usaha. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bantul dampak COVID-19 ditunjukkan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Bantul
Tahun 2015-2020**

Kategori	Uraian	2015	2016	2017	2018	2019*	2020**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,12	1,52	2,50	2,00	0,13	4,86
B	Pertambangan dan Penggalian	0,61	0,35	0,06	1,57	-0,27	-11,32
C	Industri Pengolahan	2,67	5,43	6,39	5,53	5,48	-4,80
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,08	15,58	3,99	4,85	4,83	-1,77
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	2,95	2,96	3,18	4,80	8,62	0,61
F	Konstruksi	4,05	4,07	5,93	7,39	5,08	-13,78
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,77	6,54	5,79	5,59	5,11	-4,20
H	Transportasi dan Pergudangan	3,80	4,23	3,88	5,51	6,45	-12,58
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,89	6,19	5,70	6,69	8,77	-11,55
J	Informasi dan Komunikasi	5,65	8,41	5,87	6,20	7,27	19,94
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	8,55	4,65	2,82	6,59	10,00	-2,41
L	Real Estate	6,87	5,82	4,97	5,41	6,51	0,23
M,N	Jasa Perusahaan	7,06	4,26	4,27	5,37	7,38	-14,40
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,26	5,84	4,98	4,44	3,21	-1,96
P	Jasa Pendidikan	7,80	2,95	5,16	6,08	6,65	3,79
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,51	5,20	5,13	4,74	7,18	18,59
R,S,T,U	Jasa lainnya	8,41	6,02	5,61	7,14	6,09	-11,21
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		4,97	5,05	5,10	5,47	5,53	-1,66

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2021

*) Angka sementara

**) Angka sangat sementara

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) di DIY dan Kabupaten Bantul sebelum adanya COVID-19, yaitu tahun 2017-2019 tampak relatif tinggi. Capaian LPE DIY berada dalam rentang 5,26-6,60 sedangkan capaian LPE Bantul sebesar 5,10-5,53. Namun, pada tahun 2020 LPE DIY dan Kabupaten Bantul berkontraksi sampai dengan -1,66 sebagai akibat terjadinya pandemi Covid-19. Hal ini disebabkan karena dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa sektor berkontraksi, antara lain pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; konstruksi; perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan Pergudangan; penyediaan akomodasi dan makan minum; jasa keuangan dan asuransi; jasa perusahaan; administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; dan jasa lainnya. Namun ada beberapa yang mengalami pertumbuhan yang signifikan yaitu informasi dan komunikasi; jasa kesehatan dan kegiatan sosial; pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Pada keadaan pandemi COVID-19 dan kenormalan baru, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi diprediksikan mulai pulih dan meningkat mencapai 3,12. Selanjutnya pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi diharapkan makin meningkat melalui upaya prioritas pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dan diprediksikan mencapai 3,80.

Gambar 2.3 Capaian Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2017 - 2020 dan Perkiraan Pertumbuhan Ekonomi Dampak COVID-19 Tahun 2021 - 2022 di Kabupaten Bantul dan DIY



Sumber: berbagai sumber diolah, Bappeda Kabupaten Bantul, 2021.

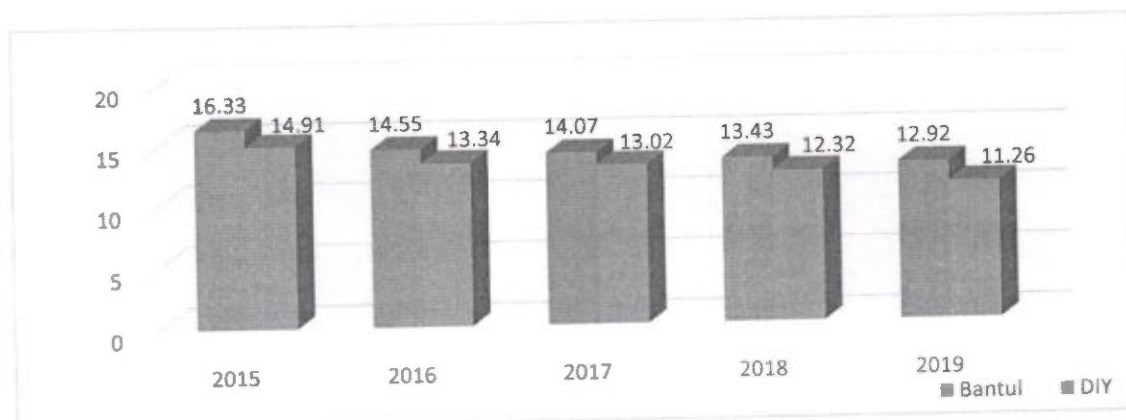
Keterangan:

Data LPE 2017-2020 adalah data capaian sedangkan 2021-2022 adalah prediksi

2.1.3.2. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Kemiskinan merupakan salah satu masalah utama pembangunan daerah di Kabupaten Bantul. Kebutuhan dasar makanan merupakan pengeluaran untuk memenuhi konsumsi 2.100 kkal perkapita perhari (52 jenis komoditi), sedang kebutuhan dasar non makanan merupakan kebutuhan minimum perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan dan lainnya (51 jenis komoditi non makanan di perkotaan dan 47 jenis komoditi non makanan di pedesaan). Meskipun angka kemiskinan terus mengalami pengurangan, angka kemiskinan di Kabupaten Bantul masih diatas angka kemiskinan Provinsi DIY. Gambaran angka kemiskinan Kabupaten Bantul tahun 2015-2019 dibandingkan dengan Provinsi DIY disajikan pada grafik berikut :

Gambar 2.4
Angka Kemiskinan Kabupaten Bantul dibandingkan dengan DIY
Tahun 2015-2019



Sumber :BPS dan Bappeda Kabupaten Bantul, 2020

Pandemi COVID-19 yang menyebabkan kontraksi pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bantul seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.2 Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 – 2020

Tahun	Tingkat Kemiskinan (%)	Jumlah Penduduk Miskin (jiwa)	Indeks Kedalaman Kemiskinan	Indeks Keparahan Kemiskinan	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/Bln)
2016	14,55	142.760	2.02	0.41	332.057
2017	14,07	139.670	2.21	0.56	347.476
2018	13,43	134.835	2.17	0.46	369.480
2019	12,92	131.151	1,87	0,43	381.538
2020	13,50	138.660	1,85	0,43	405.613

Sumber: BPS Kabupaten Bantul Tahun 2021, diolah.

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada periode 2016 sampai dengan 2019 mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 pada masa pandemi angka kemiskinan ini meningkat kembali. Persentase penduduk miskin tahun 2020 sebesar 13,5% naik 0,58% dari tahun 2019. Jumlah penduduk miskin bertambah kurang lebih 6 ribu jiwa pada 2020, sedangkan indeks kedalaman kemiskinan dan keparahan kemiskinan tahun 2016 sampai 2020 semakin kecil. Hal ini menunjukkan pengeluaran penduduk miskin dan kesenjangan antara penduduk miskin mengalami perbaikan. Upaya pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan menunjukkan keberhasilan meskipun belum sesuai target yang diharapkan. Tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Angka kemiskinan mencapai 13,50%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 12,92%. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan melampaui target, karena adanya pandemi Covid-19 maka dilakukan penyesuaian target menjadi 13,94%.

2.1.3.3. Laju Inflasi

Kenaikan harga merupakan suatu yang wajar, perkembangan permintaan dapat mendorong peningkatan produktivitas sektoral yang akhirnya dapat mendorong peningkatan penyerapan angkatan kerja. Namun kenaikan harga yang tidak terkendali dan terus menerus akan menimbulkan dampak negatif pada perekonomian.

Tabel 2.3 Perkembangan Laju Inflasi di Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, dan Nasional Tahun 2016-2020

No.	Tahun	Laju Inflasi Kab. Bantul	Laju Inflasi Kota Yogyakarta	Laju Inflasi Nasional
1	2016	2,26	2,29	3,02
2	2017	3,96	4,20	3,61
3	2018	2,61	2,66	3,13
4	2019	2,71	2,77	2,72
5	2020	1,40	1,95	1,68

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2021

Laju inflasi Kabupaten Bantul mengalami peningkatan dari 2,61% pada tahun 2018 menjadi 2,71% pada tahun 2019. Laju inflasi tersebut diukur melalui pemantauan harga yang dilakukan di Kabupaten Bantul pada tahun 2019. Angka tersebut relatif lebih rendah apabila dibandingkan dengan laju inflasi Kota Yogyakarta yaitu 2,77% dan laju inflasi nasional yaitu sebesar 2,72%. Rendahnya inflasi tahun 2019 disebabkan harga-harga barang yang bergejolak relatif terkendali, seperti harga beras, gula pasir, minyak goreng,

tepung terigu, daging, telur ayam, cabai, bawang merah/putih, Bahan Bakar Minyak (BBM) dan tarif tiket pesawat. Hal ini dipengaruhi oleh kinerja Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Bantul dan DIY sangat efektif. Pada tahun 2020 inflasi turun menjadi 1,40. Adanya pandemi Covid-19 merupakan salah satu faktor yang berpengaruh.

2.1.3.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan manusia. IPM diukur dengan pendekatan tiga dimensi yaitu kesehatan, pengetahuan dan dimensi hidup layak. Nilai IPM Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan dari tahun 2016-2020. Ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Bantul terus meningkat.

**Tabel 2.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Bantul
2016-2020**

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020
Kulonprogo	72,38	73,23	73,76	74,44	74,46
Bantul	78,42	78,67	79,45	80,01	80,01
Gunungkidul	67,82	68,73	69,24	69,96	69,98
Sleman	82,15	82,85	83,42	83,85	83,84
Yogyakarta	85,32	85,49	86,11	86,65	86,61
D.I Yogyakarta	78,38	78,89	79,53	79,99	79,97

Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2021

IPM Kabupaten Bantul pada tahun 2019 naik kelas dan berubah status dari IPM tinggi menjadi sangat tinggi, yaitu mencapai 80,01. Hal ini berarti IPM Bantul mengalami kenaikan status. Capaian IPM Kabupaten Bantul termasuk dalam kelompok 36 besar daerah dengan IPM tertinggi di Indonesia. Pencapaian ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar 78,42.

Meskipun nilai IPM sangat tinggi namun tahun 2020 dampak pandemi Covid-19 sangat berpengaruh dalam pencapaian kesejahteraan masyarakat. Hal ini ditunjukkan nilai IPM tahun 2020 tidak mengalami peningkatan dari tahun 2019.

2.1.3.5. Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan dapat diukur dengan Indeks Gini. Koefisien Gini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui distribusi dan ketimpangan pendapatan penduduk. Tingkat ketimpangan pendapatan dapat dilihat melalui koefisien gini yang berkisar antara 0 dan 1. Semakin

mendekati 0 artinya distribusi pendapatan semakin merata. Sebaliknya, semakin mendekati 1 artinya distribusi pendapatan semakin timpang. Semakin tinggi Koefisien Gini, semakin kurang merata distribusi pendapatan masyarakat. Menurut Harry T. Oshima, nilai Indeks Gini dibagi menjadi tiga tingkatan. Jika nilai Indeks Gini kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan “rendah”; nilai antara 0,3 hingga 0,5 masuk dalam kategori ketimpangan “moderat”; dan jika nilainya lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan “tinggi”.

Gambar 2.5 Perkembangan Gini Rasio di Kabupaten Bantul 2016-2020



Sumber: BPS Kabupaten Bantul, 2021

Nilai Koefisien Gini Kabupaten Bantul pada tahun 2016 sebesar 0,397 meningkat hingga tahun 2018 menjadi 0,448, dan secara perlahan mengalami penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 0,381, sehingga dapat dikatakan berada dalam kategori ketimpangan “moderat”. Penurunan Koefisien Gini tahun 2020 merupakan hal positif dalam proses pembangunan, karena mengindikasikan hasil pembangunan yang lebih terdistribusi merata. Namun, dampak pandemi Covid-19 tahun 2020 terhadap perubahan sektor lapangan usaha ekonomi menyebabkan penurunan pendapatan para pelaku usaha yang merupakan masyarakat level menengah ke atas. Hal ini dapat diartikan bahwa penurunan koefisien Gini juga dipengaruhi oleh penurunan pendapat masyarakat level menengah ke atas sehingga gap antara level bawah dan atas menjadi berkurang.

Informasi peningkatan koefisien Gini di Kabupaten Bantul perlu mendapat perhatian, karena pertumbuhan di Kabupaten Bantul masih belum diikuti dengan adanya perbaikan pada aspek pemerataan hasil pembangunan. Aspek penting yang perlu diperhatikan adalah ketepatan kelompok sasarannya, ketepatan lokasi kegiatannya, serta ketepatan bentuk kegiatannya dengan potensi nyata yang ada pada kelompok masyarakat miskin.

2.1.3.6. Tingkat Pengangguran

Ada dua jenis pengangguran yaitu pengangguran terbuka (*open unemployment*) dan setengah pengangguran (*disguised unemployment*). Pengangguran Terbuka adalah orang yang tidak punya pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan usaha. Setengah pengangguran adalah orang yang bekerja dibawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan).

Pengangguran di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang lambat. Hal ini ditunjukkan oleh tingkat pengangguran terbuka (TPT) pada tabel di bawah. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Menurut data BPS tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1%, dari 3,06% pada tahun 2019 menjadi 4,06%. Hal ini sebagai dampak pandemic covid-19.

Tabel 2.5 Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	TPT
1	2016	3,00
2	2017	2,87
3	2018	2,72
4	2019	3,06
5	2020	4,06

Sumber: Disnakertrans Kabupaten Bantul, 2020

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Bantul Tahun 2022 berkaitan dengan pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan siklus pengelolaan keuangan daerah. Dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan dan penganggaran dan keserasian antar dokumen, maka terkait dengan pengelolaan keuangan berupa struktur APBD, nomenklatur program dan kegiatan serta kode rekening yang disajikan dokumen RKPD, KUA PPAS dan RAPBD akan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku di bidang pendidikan, kesehatan, dan peruntukkan Anggaran Dana Desa ditentukan proporsi jumlah alokasi anggaran dalam APBD Kabupaten Bantul sebagai berikut:

1. Berdasarkan pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, anggaran untuk Pendidikan sebesar minimal 20% dari APBD;
2. Berdasarkan pasal 171 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, anggaran untuk kesehatan sebesar minimal 10% dari APBD;
3. Berdasarkan pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, anggaran untuk Alokasi Dana Desa sebesar 10% dari Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan APBD yang diterbitkan setiap tahunnya mengamanatkan bahwa:
 - a. Dana Transfer Umum diarahkan penggunaannya yaitu paling sedikit 25% untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi;
 - b. Pendidikan dan pelatihan untuk ASN sebesar 0,16% dari total belanja;
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten dengan APBD lebih dari Rp2.000.000.000.000,00 menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan pengawasan paling sedikit sebesar 0,050% (nol koma nol lima puluh persen) dari total belanja daerah.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah diarahkan selain untuk mempercepat realisasi visi dan misi daerah juga untuk mengatasi berbagai permasalahan pokok seperti penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, perbaikan mutu pelayanan publik utamanya pelayanan dasar, peningkatan produktivitas sektor dominan yang mempengaruhi PDRB, dan perluasan daya saing investasi.

Untuk mewujudkan kebijakan tersebut perlu didukung kebijakan penajaman APBD yang sesuai visi dan misi daerah melalui efektifitas dan efisiensi belanja daerah dan upaya peningkatan pendapatan daerah yang tetap mendukung iklim investasi daerah serta adanya komitmen seluruh elemen pengelola keuangan daerah, sehingga tercipta pengelolaan keuangan yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

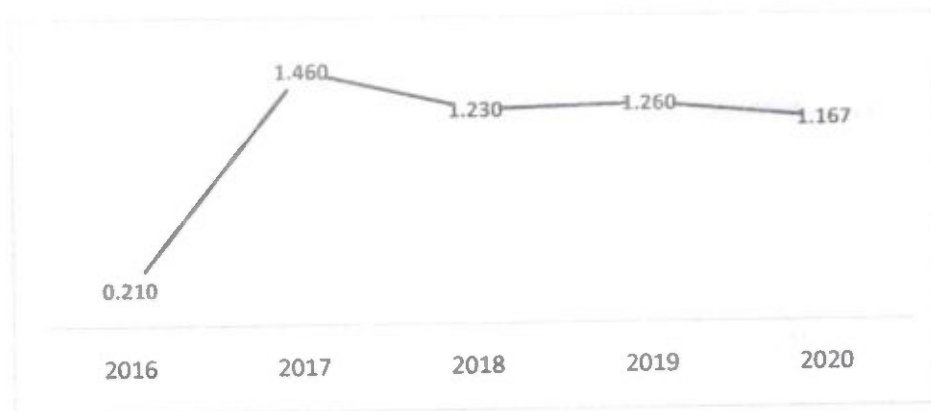
2.2.1. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu. Peta Kapasitas Fiskal Daerah adalah gambaran kemampuan keuangan daerah yang dikelompokkan berdasarkan indeks kapasitas fiskal daerah. Indeks Kapasitas Fiskal Daerah kabupaten/kota sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.07/2020 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, terdapat pengelompokan kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

1. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah lebih dari atau sama dengan 2,145 (dua koma satu empat lima) ($IKFD \geq 2,145$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat tinggi;
2. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 1,168 (satu koma satu enam delapan) sampai kurang dari 2,145 (dua koma satu empat lima) ($1,168 < IKFD < 2,145$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah tinggi;
3. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,747 (nol koma tujuh empat tujuh) sampai kurang dari 1,168 (satu koma satu enam delapan) ($0,747 \leq IKFD < 1,168$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sedang;

4. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah antara lebih dari atau sama dengan 0,517 (nol koma lima satu tujuh) sampai kurang dari 0,747 (nol koma tujuh empat tujuh) ($0,517 \leq \text{IKFD} < 0,747$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah rendah; dan
5. Daerah dengan indeks Kapasitas Fiskal Daerah kurang dari 0,517 (nol koma lima satu tujuh) ($\text{IKFD} < 0,517$) merupakan daerah yang termasuk kategori Kapasitas Fiskal Daerah sangat rendah.

Gambar 2.6 Perkembangan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020



Sumber Data : Peraturan Menteri Keuangan tentang Kapasitas Fiskal Daerah Tahun 2016-2020

Nilai Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) Kabupaten Bantul selama lima (5) tahun terakhir mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, nilai IKF sebesar 0,21 atau masuk dalam kategori rendah. Pada tahun 2017 sampai tahun 2019, nilai IKF Kabupaten Bantul mengalami peningkatan status ke dalam daerah dengan kategori IKF tinggi mencapai 1,46 pada tahun 2017. Namun menurun menjadi 1,23 pada tahun 2018, dan mengalami kenaikan kembali menjadi 1,26 pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2020, nilai IKF Kabupaten Bantul sebesar 1,167, masuk dalam kategori IKF **“Sedang”**. Peningkatan KFD ini dapat dimaknai bahwa Pemerintah Kabupaten Bantul terus berupaya dalam mengoptimalkan potensi sumber-sumber pendapatan yang ada antara lain PAD.

2.2.2. Kemandirian Fiskal

Kemandirian Fiskal merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan Pemerintah Daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintah tanpa tergantung bantuan dari luar termasuk dari Pemerintah Pusat. Kemandirian Fiskal daerah akan menghasilkan Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) dengan nilai berkisar antara 0 hingga 1. Semakin tinggi nilai IKF maka semakin tinggi kemandirian Fiskal suatu daerah. Penghitungan IKF menggunakan formula Pendapatan Asli Daerah terhadap total Pendapatan Daerah.

Tabel 2.6 Indeks Kemandirian Fiskal di Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

No	Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Total Pendapatan Daerah (Rp)	Nilai IKF	Kategori
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) : (4)	(6)
1.	2016	404.454.703.746	2.000.334.166.354	0,20	Belum mandiri
2.	2017	424.179.068.472	2.086.878.989.570	0,20	Belum mandiri
3.	2018	462.653.956.229	2.227.752.027.349	0,21	Belum mandiri
4.	2019	505.929.472.001	2.269.539.168.278	0,22	Belum mandiri
5.	2020	479.610.812.119	2.210.246.133.186	0,22	Belum mandiri

Nilai Indeks Kemandirian Fiskal (IKF) Kabupaten Bantul selama lima (5) tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016, nilai IKF sebesar 0,20, selanjutnya pada tahun 2020 meningkat menjadi 0,22, meskipun masih tergolong “belum mandiri”, yaitu masih sangat tergantung dengan dana transfer karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya cukup untuk membiayai 22 persen belanja daerah.

2.2.3. Kemampuan Mendanai Belanja Daerah

Kemampuan keuangan daerah tercermin dari seluruh penerimaan daerah baik pendapatan APBD dan penerimaan pembiayaan, yang seharusnya bisa mencukupi untuk digunakan dalam mendanai seluruh belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan yang direncanakan. Semakin besar rasio penerimaan daerah dan penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran daerah dan pengeluaran pembiayaan, maka kemampuan mendanai belanja daerah semakin besar pula.

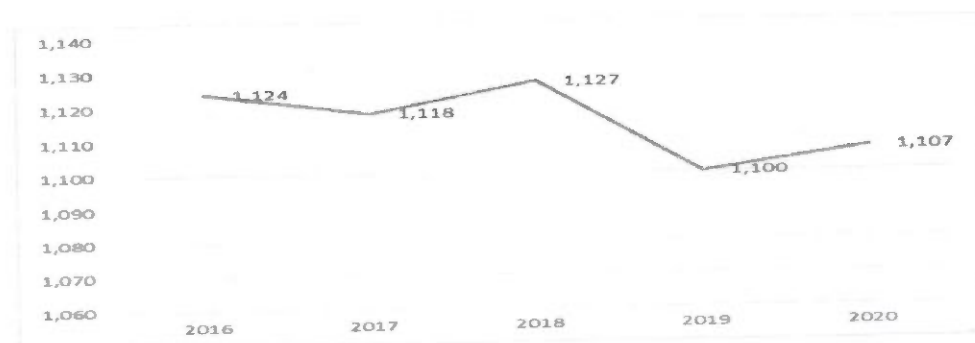
Tabel 2.7 Perhitungan Kemampuan Mendanai Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016-2020

TAHUN	TOTAL PENDAPATAN	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	TOTAL PENERIMAAN	TOTAL BELANJA	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	TOTAL PENGELUARAN	KEMAMPUAN MENDANAI BELANJA DAERAH
1	2	3	4=(2+3)	5	6	7=(5+6)	8=(4:7)
2016	2.000.334	293.078	2.293.412	2.016.544	24.752	2.041.296	1,124
2017	2.086.879	261.454	2.348.333	2.076.742	24.365	2.101.107	1,118
2018	2.227.752	256.630	2.484.382	2.165.652	39.573	2.205.225	1,127
2019	2.269.539	296.985	2.566.524	2.283.585	48.892	2.332.477	1,100
2020	2.210.246	238.679	2.448.925	2.199.124	11.599	2.210.723	1,107

Sumber: BKAD, diolah 2021

Secara umum pada lima tahun terakhir, kondisi kemampuan mendanai belanja daerah Kabupaten Bantul mengalami penurunan selama periode tahun 2016-2019 sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada tahun 2016 sebesar 1,124 kemudian pada tahun 2020 sebesar 1,107.

Gambar 2.7 Perkembangan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2016 - 2020



Sumber: BKAD, diolah 2021

Mencermati gambar perkembangan rasio kemampuan mendanai belanja daerah tahun 2016 - 2019 menunjukkan kecenderungan menurun, hal ini dapat diartikan bahwa kemampuan untuk mendanai belanja daerah relatif rendah meskipun pada tahun 2020 mengalami kenaikan.

Berkaitan dengan kondisi kategori IKF sedang, kategori nilai Indeks Kemandirian Fiskal belum mandiri, dan Rasio Kemampuan Mendanai Belanja Daerah cenderung menurun, maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan lain diantaranya: (1) Kerjasama pemerintah dan badan usaha/swasta yang harus mulai dirintis serta diwujudkan untuk meningkatkan daya saing, mengatasi permasalahan dan menyikapi tantangan ke depan; (2) Optimalisasi dana CSR sebagai sumber pendanaan

pembangunan daerah; (3) Pinjaman baik dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya; dan (4) Hibah dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya dan dari Luar Negeri.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN Tahun 2022

Kebijakan ekonomi yang dicanangkan pemerintah pusat pada tahun 2022 dapat menjadi tantangan maupun peluang bagi perekonomian Kabupaten Bantul ke depan. Kerangka perekonomian nasional secara makro dalam tahun 2022 disusun berdasarkan kondisi umum perekonomian Indonesia. Kebijakan perekonomian Indonesia yang diperkirakan dapat mempengaruhi perekonomian Kabupaten Bantul meliputi sasaran dan kebijakan yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, stabilitas ekonomi yang tercermin dalam stabilitas moneter, fiskal dan neraca pembayaran, serta kebutuhan investasi untuk mendorong pencapaian sasaran yang telah ditetapkan. Tahun 2022 diasumsikan pandemi covid-19 telah berakhir dan arah kebijakan pembangunan nasional sesuai dengan tema dalam RKP 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Beberapa indikator utama ekonomi makro pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, menjadi tolok ukur dalam penentuan RAPBN tahun 2022. Oleh karena itu dalam asumsi dasar penyusunan RAPBD perlu

mempertimbangkan indikator ekonomi makro pembangunan nasional tersebut, diantaranya:

Tabel 3.1.
Indikator Ekonomi Makro di Indonesia Tahun 2022

No	Indikator Ekonomi Makro	Asumsi Tahun 2022
1.	Pertumbuhan ekonomi	5,4 - 6,0 %
2.	Tingkat kemiskinan	8,5 - 9,0 %
3.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73,44 - 73,48
4.	Indeks Gini	0,376 - 0,378
5.	Tingkat pengangguran terbuka	6,24 - 5,52%

Sumber : Bappenas, BPS, Kemenkeu, 2021

- Pertumbuhan ekonomi, sebesar 5,4-6,0%

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat pandemi Covid19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah (*lower middle income countries*), setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah-atas (*upper middle income countries*) pada tahun 2019. Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 4,8 persen, dengan kisaran 4,5-5,3 persen. Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi hingga 6,2 persen pada tahun 2021.

- Tingkat kemiskinan

Pandemi Covid-19 juga berdampak terhadap aspek sosial dan ekonomi. Salah satu dampaknya adalah penurunan pengeluaran dan peningkatan pengangguran yang menyebabkan kenaikan angka kemiskinan menjadi 10,19 persen (September, 2020). Wilayah yang paling terdampak akibat pandemi Covid-19 adalah perkotaan, ditunjukkan

dengan peningkatan angka kemiskinan yang lebih besar dibandingkan wilayah perdesaan.

Pada tahun 2022 tingkat kemiskinan diprediksikan mencapai sekitar 8,5-9,0 persen. Untuk itu, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan merata, inflasi yang stabil, penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat miskin dan rentan, iklim investasi yang terjaga, serta infrastruktur terutama di daerah tertinggal, terluar, dan terdepan menjadi sasaran yang harus dicapai. Hal ini dapat tercapai dengan didukung oleh kebijakan makro yang mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, tingkat inflasi yang stabil, serta penciptaan lapangan kerja yang produktif. Faktor penentu keberhasilan dalam upaya mencapai target tingkat kemiskinan tahun 2022, antara lain adanya dukungan keterpaduan program kemiskinan lintas sektor melalui optimalisasi kinerja TKPK Kabupaten sampai pedukuhan; Forum CSR; dan sinkronisasi APBD-APBDes terkait penanggulangan kemiskinan (RTLH, pendataan/musdes).

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi 73,44 – 73,48

Pada kuartal pertama tahun 2021, pandemi Covid-19 mulai menunjukkan kecenderungan menurun, walaupun masih belum signifikan. Kasus baru Covid-19 masih terjadi dan memberikan tekanan yang berat bagi perekonomian. Aktivitas ekonomi yang menurun berimbas pada IPM, terutama komponen pengeluaran per kapita. Pembatasan aktivitas penduduk menyebabkan banyaknya pemutusan hubungan kerja, terhentinya aktivitas ekonomi pekerja informal, serta menurunnya konsumsi rumah tangga sebagai akibat turunnya pendapatan dan daya beli. Pelayanan kesehatan esensial, seperti pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi masyarakat dan pengendalian penyakit juga terhambat selama pandemi. Pandemi Covid-19 juga berdampak pada penyelenggaraan pendidikan. Perubahan proses belajar mengajar, yang semula dilakukan secara tatap muka menjadi Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), baik luring maupun daring, belum sepenuhnya berjalan secara efektif.

Tekanan yang cukup besar bagi perekonomian dan pembangunan SDM ini dapat diminimalisir jika sistem kesehatan mampu mengendalikan pandemi. Vaksinasi Covid-19 bagi seluruh penduduk dan penerapan protokol kesehatan yang ketat diharapkan dapat menghentikan penularan serta mencegah jumlah kematian yang lebih besar. Oleh karenanya, membangun sistem kesehatan yang kuat dan dukungan pembiayaan kesehatan pemerintah (government health expenditure) yang memadai,

akan meningkatkan daya saing SDM sekaligus bentuk perlindungan terhadap tekanan ekonomi akibat pandemi.

- Gini Ratio pada kisaran 0,377 – 0,379.

Rasio gini mengalami kenaikan akibat dari pandemi Covid19. Pada September 2019 angka rasio gini sempat mencapai 0,380 namun pada akhir tahun 2020 angka rasio gini kembali naik ke angka 0,385. Peningkatan angka rasio gini terjadi baik di perkotaan maupun perdesaan. Rasio gini perkotaan pada September 2020 adalah sebesar 0,399 atau mengalami kenaikan sebesar 0,008 poin dibanding Gini September 2019 yang sebesar 0,391. Sedangkan Gini pedesaan pada September 2020 tercatat sebesar 0,319, naik 0,004 poin dibandingkan September 2019. Diperkirakan pada tahun 2021, rasio gini akan mengalami penurunan pada kisaran angka 0,377–0,382, seiring dengan membaiknya kondisi perekonomian di Indonesia. Strategi kebijakan perlu dilakukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

- Tingkat pengangguran terbuka menjadi 6,24 – 5,52

Tekanan pandemi Covid-19 pada perekonomian Indonesia tahun 2020 menyebabkan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) meningkat menjadi 7,07 persen atau 9,77 juta orang (Agustus, 2020). Pada tahun 2021, seiring dengan proses pemulihan perekonomian yang terus menunjukkan perkembangan positif, TPT diperkirakan dapat menurun pada kisaran 5,9–6,5 persen.

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja. Upaya strategis lainnya antara lain (1) peningkatan keahlian tenaga kerja melalui reformasi sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, (2) penguatan sistem informasi pasar kerja yang kredibel sebagai dasar intervensi kebijakan ketenagakerjaan, dan (3) penguatan sistem perlindungan sosial bagi pekerja.

3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD

Beberapa indikator utama ekonomi makro pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022 yang menjadi tolok ukur dalam penentuan RAPBD Tahun 2022, diantaranya :

Tabel 3.2.
Indikator Ekonomi Makro dan Asumsinya
di Kabupaten Bantul dan DIY Tahun 2022

No	Indikator Ekonomi Makro	Kab. Bantul	DIY
1.	Pertumbuhan ekonomi	3,8%	5,00 - 5,40
2.	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,9%	3,23 - 3,50
3.	Gini Ratio	0,36	0,4262 - 0,4235
4.	Tingkat kemiskinan	13,37%	11,00 - 12,68
5.	Indeks Pembangunan Manusia	80,63	80,60 - 81,30

Sumber : Bappeda Kabupaten Bantul 2021

3.2.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bantul pada tahun 2020 yaitu sebesar -1,66 persen atau mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh 5,53 persen hal ini merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Pada keadaan pandemi COVID-19 dan kenormalan baru, tahun 2021 pertumbuhan ekonomi diprediksikan mulai pulih dan meningkat mencapai 3,12. Selanjutnya pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi diharapkan makin meningkat melalui upaya prioritas pemulihan ekonomi dalam penanganan dampak pandemi Covid-19 dan diprediksikan mencapai 3,8 persen.

Hal ini berdasarkan asumsi pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan tumbuh sangat lambat pada tahun 2021, bahkan bisa terjadi kontraksi jika pandemi Covid-19 berlangsung lebih lama hingga Tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi tahun 2021 diprediksikan tumbuh melambat karena beberapa lapangan usaha mengalami kendala produksi. Pada tahun 2022 perekonomian diharapkan mengalami pertumbuhan yang lebih baik dengan asumsi pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk meningkatkan aktivitas perekonomian pada sektor yang mempunyai daya ungkit besar, melibatkan banyak tenaga kerja, dan mempunyai potensi pendapatan daerah.

Sektor yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul diketahui berasal dari sektor primer, sekunder, dan tersier. Sebagian besar sektor tersier diketahui masih masuk ke dalam kategori

sektor maju tetapi tertekan, yaitu memiliki laju pertumbuhan sektor yang baik tetapi kurang memiliki kontribusi yang cukup baik. Sektor-sektor tersebut, terutama sektor Jasa Pendidikan dan sektor Real Estate yang memiliki laju pertumbuhan dan distribusi cukup baik perlu untuk didorong perkembangannya agar dapat menjadi sektor yang juga mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bantul, dengan memperhatikan lahan-lahan produktif. Pemulihan ekonomi pada semua sektor tetap dengan melaksanakan protokol kesehatan di masa pandemi Covid-19.

3.2.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran di Kabupaten Bantul cenderung mengalami peningkatan meskipun dengan laju yang lambat. TPT merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja. Menurut data BPS tahun 2020 tingkat pengangguran terbuka naik sebesar 1%, dari 3,06% pada tahun 2019 menjadi 4,06%. Hal ini sebagai dampak adanya pandemic covid-19. Pada tahun 2022 diharapkan dapat menurunkan TPT menjadi sebesar 3,9%. Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi pengangguran yaitu program peningkatan kesempatan kerja, penempatan tenaga kerja, transmigrasi umum, perlindungan dan pengembangan ketenagakerjaan, peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja, dan perluasan tenaga kerja. Faktor-faktor penentu keberhasilan penurunan tingkat pengangguran terbuka diperlukan:

1. Adanya keterpaduan kebijakan penciptaan kesempatan kerja
2. Para pihak disiplin menerapkan aturan ketenagakerjaan
3. Intensifikasi pencarian lowongan pekerjaan melalui *job canvassing* dan informasi pasar kerja melalui bursa kerja *on-line* lebih ditingkatkan,
2. Melaksanakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pasar kerja
3. Peningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan tingkat lanjut,
4. Memperbanyak dan mengintensifkan pelatihan kewirausahaan,

3.2.3 Gini Ratio

Koefisien Gini Kabupaten Bantul selama lima tahun terakhir berkisar antara 0,3 sampai dengan 0,5. Dengan menggunakan klasifikasi kesenjangan yang dirumuskan oleh Todaro berdasarkan angka Gini Rasio, maka tingkat kesenjangan di Kabupaten Bantul pada kurun waktu 2016-2020 masih tergolong dalam kategori “kesenjangan sedang”. Angka Gini

Rasio sampai dengan tahun 2020 menunjukkan kecenderungan yang dinamis. Pada tahun 2018, angka Gini Rasio mencapai 0,448, hampir mendekati ambang batas bawah kesenjangan tinggi yaitu 0,50 – 0,70. Tren tersebut kemudian berubah pada tahun 2019-2020 yang menunjukkan penurunan sampai dengan tahun 2020 menjadi 0,381. Pada tahun 2022 gini ratio ditargetkan sebesar 0,36.

Adanya peningkatan koefisien Gini tahun 2016-2018 dimungkinkan karena peningkatan pertumbuhan pendapatan masyarakat menengah ke atas yang berasal dari sektor tersier dibanding dengan pendapatan masyarakat menengah ke bawah yang berasal dari sektor primer dan adanya Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan warga miskin. Pada struktur PDRB, sektor primer yang merupakan sektor yang banyak dilakukan masyarakat Kabupaten Bantul cenderung mengalami penurunan dalam kontribusi PDRB dan cenderung tumbuh melambat sementara sektor tersier cenderung tumbuh tinggi. Perubahan kondisi ini perlu mendapatkan perhatian lebih, mengingat hal ini akan mengubah dan memberikan warna baru bagi kegiatan ekonomi di Kabupaten Bantul.

Perlu upaya perbaikan yang mendorong kinerja sektor primer, agar tren peningkatan ketimpangan tidak terjadi kembali. Program pembangunan pada sektor primer dan penciptaan lapangan kerja baru akan menjadi salah satu solusi dalam memutus mata rantai kesenjangan, namun perlu dilakukan dengan mempertimbangkan aktivitas ekonomi terkini. Faktor-faktor penentu keberhasilan pemerataan pendapatan diperlukan dukungan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan SDM, relaksasi anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19, dan Bantuan sosial masyarakat termasuk pendidikan dan jaminan kesehatan, dan dukungan program pelatihan dan pemberdayaan UMKM terdampak.

3.2.4 Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Bantul pada periode 2016 sampai dengan 2019 mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 pada masa pandemi angka kemiskinan ini meningkat kembali. Tahun 2020, dampak pandemi Covid-19 mempengaruhi kenaikan angka kemiskinan yang cukup signifikan. Angka kemiskinan mencapai 13,50%, mengalami peningkatan dibanding tahun 2019 sebesar 12,92%. Pada tahun 2020, tingkat kemiskinan melampaui target, karena adanya pandemi Covid-19 maka dilakukan penyesuaian target menjadi 13,94%. Hal ini menunjukkan Belum tepatnya

sasaran program, kurangnya keterpaduan dalam implementasi, serta belum optimalnya fungsi institusi yang mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan serta program kegiatan yang disusun masih banyak yang belum berdampak terhadap penurunan angka kemiskinan.

Pada tahun 2022, persentase angka kemiskinan ditargetkan turun menjadi sebesar 13,37%. Konsentrasi kegiatan penanggulangan Kemiskinan selama Tanggap Darurat Covid-19 di Kabupaten Bantul adalah: (1) Pemberian Tambahan Makanan Boga Sehat dan (2) Pendampingan dan Penyaluran Bantuan Sosial. Selain itu, diperlukan dukungan keterpaduan program kemiskinan lintas sektor melalui optimalisasi kinerja TKPK kabupaten sampai pedukuhan, Forum CSR, Sinkronisasi APBD-APBDes terkait penanggulangan kemiskinan (RTLH, pendataan/musdes).

3.2.5 Indeks Pembangunan Manusia

Selama lima tahun terakhir nilai IPM Kabupaten Bantul menunjukkan perkembangan yang positif. Nilai IPM terus mengalami peningkatan mulai dari 78,42 pada tahun 2016 hingga mencapai 80,01 pada tahun 2020 dengan level capaiannya menjadi sangat tinggi ($IPM \geq 80$). Hal ini menunjukkan kinerja pembangunan pada dimensi pendidikan, kesehatan dan ekonomi semakin dirasakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Pada Tahun 2022, IPM ditargetkan sebesar 80,63.

Jumlah penduduk Kabupaten Bantul tahun 2016-2020 menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bantul cenderung meningkat namun pertumbuhannya mengalami perlambatan. Perlambatan pertumbuhan penduduk dapat diartikan sebagai keberhasilan kebijakan keluarga berencana, namun kebijakan kependudukan bukan hanya meliputi penurunan laju pertumbuhan penduduk saja tapi juga peningkatan kualitas dan standar hidup manusia. Hal inilah yang menyebabkan kegagalan pada sebagian negara berkembang yaitu belum optimalnya pembangunan manusia secara menyeluruh. Oleh sebab itu Pemerintah Kabupaten Bantul dalam menentukan kebijakan pembangunan manusia harus dapat menangkap peluang adanya bonus demografi khususnya kebijakan pendidikan dan ketenagakerjaan.

IPM Kabupaten Bantul masih dapat ditingkatkan antara lain dengan peningkatan laju pertumbuhan indeks kesehatan yaitu lebih mengutamakan perbaikan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan kemudahan akses sarana kesehatan yang tersedia,

penggunaan air bersih, keberadaan fasilitas BAB penduduk dan kualitas kesehatan lingkungan tempat tinggal penduduk; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengetahuan yaitu dengan meningkatkan partisipasi sekolah penduduk melalui upaya semua anak usia sekolah (SD-SLTA) bisa bersekolah dan tidak putus sekolah; peningkatan laju pertumbuhan indeks pengeluaran dengan meningkatkan daya beli penduduk melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita, membuka lapangan usaha baru, dan adanya program bantuan sosial pemerintah seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), dll.

3.2.6 Lain-lain Asumsi

- a. Apabila terjadi pergeseran asumsi akibat adanya kebijakan dari Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta serta penambahan/pengurangan sumber pendapatan daerah, maka terhadap program/kegiatan yang tercantum dalam KUA dapat dilakukan penambahan atau pengurangan jumlah dan atau anggarannya serta pagu anggaran definitif dalam pembahasan RAPBD tahun anggaran 2022 tanpa melakukan perubahan kesepakatan KUA maupun PPAS. Terkait dengan hal ini, asumsi penyusunan KUA PPAS 2022 sudah menggunakan organisasi perangkat daerah yang baru sesuai dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.
- b. Penyusunan Kebijakan Umum APBD dan PPAS 2022 diasumsikan juga bahwa kondisi perekonomian stabil, tidak terjadi gejolak sosial dan politik serta tidak terjadi bencana lebih besar.
- c. Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- d. Pandemi Covid-19 selesai pada tahun 2021.
- e. Proyek infrastruktur pusat tetap ada di tahun 2022.
- f. Pemulihan kondisi sosial ekonomi dilakukan tahun 2022.

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur APBD, karena besaran pendapatan daerah sangat menentukan kemampuan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah Merupakan Penerimaan Yang Diperoleh Dari Sektor Yaitu Sebagai Berikut:
 - a. Pajak daerah, terdiri dari PBB Perkotaan dan Perdesaan, BPHTB, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Reklame, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Mineral bukan Logam, Pajak Sarang Burung Walet;
 - b. Retribusi daerah, terdiri retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu dan retribusi perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing.
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, terdiri dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, terdiri dari hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan, penerimaan jasa giro, penerimaan bunga deposito, pendapatan denda retribusi, tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan jasa dana bergulir dan penerimaan lain-lain.
2. Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya, meliputi Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah. Pendapatan transfer terdiri atas:
 - a. Transfer Pemerintah Pusat
 - 1) Dana Perimbangan
 - a) Dana Transfer Umum

(1) Bagi hasil pajak/bukan pajak merupakan bagian dana perimbangan untuk mengatasi masalah ketimpangan vertikal (antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) yang dilakukan melalui pembagian hasil antara Pemerintah Pusat dan Daerah penghasil dari sebagian penerimaan perpajakan dan bukan perpajakan.

a. Bagi Hasil Pajak, berupa :

- Bagi Hasil dari Pajak Bumi dan Bangunan sektor Pertambangan
- Bagi Hasil dari Pajak Penghasilan Orang Pribadi
- Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau

b. Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam, berupa:

- Bagi Hasil Dari Iuran Hak Pengusahaan Hutan
- Bagi Hasil Dari Pungutan Hasil Perikanan

(2) Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana transfer yang bersifat umum (*block grant*) untuk mengatasi masalah ketimpangan horizontal (antar daerah) dengan tujuan utama pemerataan kemampuan keuangan antar daerah;

b) Dana Transfer Khusus

Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non Fisik merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu bertujuan membantu mendanai kegiatan-kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- 2) Dana Insentif Daerah;
- 3) Dana Otonomi Khusus;
- 4) Dana Keistimewaan;
- 5) Dana Desa.

b. Transfer Antar-Daerah

- 1) Bagi hasil pajak dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya; dan
- 2) Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya.

3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, terdiri dari sebagai berikut:

- a. Pendapatan hibah meliputi pendapatan hibah dari pemerintah dan pendapatan hibah dari badan/lembaga/organisasi swasta dalam negeri;
- b. Dana Darurat;

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adanya otonomi daerah dan desentralisasi memberi kewenangan yang luas kepada daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah sehingga diharapkan dapat memacu daerah menuju tingkat kemampuan keuangan daerah yang lebih baik yang tercermin semakin meningkatnya kapasitas fiskal dan berkurangnya celah fiskal dari tahun ke tahun. Upaya meningkatkan kapasitas fiskal dengan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah yang merupakan komponen kapasitas fiskal daerah, sehingga arah kebijakan pendapatan daerah adalah optimalisasi dan peningkatan kapasitas fiskal daerah untuk memaksimalkan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan penyelenggaraan pelayanan publik melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang selama ini menjadi sumber pendapatan asli daerah yaitu dengan optimalisasi pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta berupaya menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah yang baru dengan memanfaatkan potensi lokal yang ada di wilayah Kabupaten Bantul.

Pendapatan daerah tahun 2022 yang bersumber dana DAK Fisik belum diperhitungkan, selain itu untuk dana Transfer Antar Daerah baru memasukkan sumber Dana Keistimewaan sesuai dengan Berita Acara yaitu sebesar Rp29.706.340.000,00. PAD pada tahun 2022 masih sangat terpengaruh oleh adanya dampak pandemi Covid-19 dan diperkirakan masih mengalami penurunan sebesar 0,4%. Namun demikian Pemerintah Kabupaten Bantul berupaya untuk meningkatkan PAD melalui:

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
 - c. Memberikan *reward* bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.

- d. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara *self assessment*.
2. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
3. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
4. Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

Berdasarkan realisasi pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya dan pertimbangan kemungkinan kebutuhan pendanaan dimasa mendatang, untuk itu maka dapat dirumuskan arah kebijakan Pendapatan daerah Kabupaten Bantul tahun 2022 meliputi :

1. Dana perimbangan berupa bagi hasil pajak/bukan pajak dihitung dengan memperhatikan potensi masing-masing jenis pajak. Sedangkan DAU sesuai dengan peraturan yang berlaku bahwa untuk Pagu DAU pada perubahan akan menyesuaikan dengan pendapatan Negara maka diasumsikan sama dengan tahun lalu, karena pandemi covid-19 dan kebijakan Pusat untuk melakukan refocusing yang menyebabkan DAU mengalami penurunan, sehingga pagu DAU diasumsikan sama dengan pasca refocusing tahun 2021. Untuk pagu DAK tidak diperhitungkan.
2. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta prakiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
3. Proyeksi pendapatan asli daerah diasumsikan turun sebesar 0,39% dari tahun 2021 karena dampak pandemi Covid-19. Proyeksi komponen PAD, khususnya retribusi daerah diasumsikan naik, sedangkan pajak daerah dan hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan diasumsikan tetap dan lain-lain PAD yang Sah diasumsikan turun;
4. Lain-lain pendapatan yang sah sementara diperhitungkan pada sumber-sumber pendapatan yang dapat dipastikan.

4.2 Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

a. Prediksi Sumber Pendanaan Pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2022

Tuntutan peningkatan pendapatan daerah semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada daerah. Daerah harus lebih kreatif dalam menggali potensi sumber pendapatan asli daerah. Sekarang ini pemerintah daerah masih mengandalkan dana perimbangan yang merupakan transfer keuangan oleh pusat kepada daerah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Dana perimbangan memiliki kontribusi yang besar dari pendapatan daerah karena pendapatan asli daerah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan dana perimbangan ($\pm 20\%$). Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul selama ini dalam pembiayaan administrasi pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung dari Pemerintah Pusat, terutama membiayai belanja pegawai berupa gaji.

Perincian realisasi sumber anggaran pendapatan Kabupaten Bantul tahun anggaran 2016, 2017, 2018, 2019, dan 2020, pendapatan Tahun 2021, dan prediksi anggaran pendapatan daerah tahun 2022, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1.
Realisasi Anggaran Pendapatan di Kabupaten Bantul Tahun 2016 s.d 2020

NO	URAIAN	REALISASI				
		TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
A	PENDAPATAN	2.000.334.166.353,84	2.086.878.989.570,45	2.227.752.027.348,97	2.269.539.168.277,63	2.210.246.133.186,42
I	Pendapatan Asli Daerah	404.454.703.746,07	494.179.068.471,97	462.653.956.229,75	505.929.472.001,63	479.610.812.119,42
1	Pajak Daerah	133.474.742.165,22	165.562.359.004,37	182.127.309.683,88	213.628.741.844,18	200.826.187.667,73
2	Retribusi Daerah	26.613.085.433,67	31.575.738.483,00	46.052.620.246,00	48.278.231.843,00	30.465.840.962,75
3	Hasil Pengeluaran Kekayaan Daerah yang dipisahkan	21.068.269.986,18	20.130.437.131,20	19.652.871.723,03	21.945.038.058,10	25.137.579.049,59
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	223.298.606.161,00	276.910.533.853,40	214.821.154.576,84	222.077.460.256,35	223.181.204.439,15
II	Dana Perimbangan	1.331.352.777.163,00	1.287.256.262.558,00	1.355.455.930.302,00	1.351.157.100.831,00	1.268.337.753.395,00
1	Bagi Hasil Pajak & Bukan Pajak	39.338.415.888,00	34.871.178.970,00	30.584.172.190,00	19.947.001.549,00	36.480.471.625,00
2	Dana Alokasi Umum	999.814.365.000,00	982.250.842.000,00	982.250.842.000,00	1.015.302.849.000,00	923.213.607.000,00
3	Dana Alokasi Khusus	292.199.996.275,00	270.134.241.588,00	342.620.916.112,00	315.907.250.282,00	308.643.674.770,00
III	Lain-lain Pendapatan yang Sah	264.526.685.444,77	305.443.658.540,48	409.642.140.817,22	412.452.595.445,00	462.297.567.672,00
1	Pendapatan Hibah	6.148.735.500,00	10.598.764.728,00	139.341.833.553,00	77.281.170.982,00	83.860.183.000,00
2	Bagi Hasil Pajak dari Propinsi atau Pemda lainnya	137.137.204.944,77	145.068.714.991,48	155.587.029.264,22	164.965.839.463,00	159.398.655.115,00
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	99.912.945.000,00	131.691.087.000,00	113.326.105.000,00	165.849.585.000,00	191.989.028.000,00
4	Bantuan Keuangan dari Prop /Pemda Lainnya	21.327.800.000,00	18.085.091.821,00	1.387.173.000,00	4.356.000.000,00	27.049.701.557,00

Sumber : BKAD Kabupaten Bantul, 2021

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pendapatan daerah diuraikan menjadi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Prediksi Pendapatan tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut ini:

**Tabel 4.2. APBD Tahun 2021 dan Prediksi APBD Tahun 2022
sesuai PP No.12 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul**

No	Uraian	APBD Tahun 2021	Prediksi Tahun 2022
	PENDAPATAN		
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	495.767.307.797,00	493.854.008.396,00
	Pajak Daerah	221.912.299.401,00	221.979.000.000,00
	Retribusi Daerah	39.446.673.104,00	39.631.673.104,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.707.166.955,00	23.707.166.955,00
	Lain-lain PAD Yang Sah	210.701.168.337,00	208.536.168.337,00
	PENDAPATAN TRANSFER	1.697.237.079.687,00	1.531.958.423.127,00
	Transfer Pemerintah Pusat	1.420.644.091.890,00	1.343.338.183.890,00
	Dana Perimbangan	1.280.921.400.890,00	1.203.615.492.890,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	29.153,017.890,00	29.153,017.890,00
	Dana Alokasi Umum	941.315.965.000,00	941.315.965.000,00
	Dana Alokasi Khusus	310.452.418.000,00	233.146.510.000,00
	Dana Insentif Daerah	30.323.619.000,00	30.323.619.000,00
	Dana Desa	109.399.072.000,00	109.399.072.000,00
	Transfer Antar Daerah	276.592.987.797,00	188.620.239.237,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	152.713.899.237,00	158.913.899.237,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	123.879.088.560,00	29.706.340.000,00
	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	2.199.004.387.484,00	2.031.812.431.523,00

Sumber : Aplikasi SIPD, tahun 2021

b. Perhitungan Proyeksi PAD Kabupaten Bantul Tahun 2022

1) Perhitungan Proyeksi Rincian Pajak Daerah Tahun 2022

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu tolok ukur dari perkembangan ekonomi daerah. Besarnya PAD secara umum menunjukkan kemajuan aktivitas perekonomian pada masyarakat yang dapat dijadikan obyek pungut. Oleh karena itu, pencapaian target PAD merupakan faktor paling penting dalam menilai laju pembangunan di daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari Pajak Daerah diprediksikan mengalami pertumbuhan sebesar 0,03% dari tahun 2021. Kenaikan tersebut berasal dari jenis pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Sementara untuk 10 (sepuluh) jenis pajak lainnya diperkirakan sama dengan tahun 2021.

Beberapa jenis penerimaan pajak daerah yang dapat didorong peningkatan realisasinya pada tahun mendatang terutama:

1. Pajak Hotel sebenarnya masih punya potensi yang cukup tinggi untuk berkembang di Kabupaten Bantul seiring dengan berkembangnya wilayah DIY termasuk Bantul sebagai daerah tujuan wisata utama di Indonesia. Sejauh ini hanya ada dua hotel berbintang yang dipungut pajak hotel, sedangkan hotel lain masih berstatus melati. Potensi lain dari pajak hotel yang dapat lebih diintensifkan adalah rumah kos;
2. Pajak Restoran sejauh ini yang banyak dipungut adalah dari catering yang melayani kegiatan-kegiatan di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Bantul, sedangkan restoran dan rumah makan lainnya perlu diintensifkan pemungutannya;
3. Pajak hiburan perlu didorong dengan meningkatkan atraksi seni dan budaya di Bantul seiring dengan pengembangan objek dan destinasi pariwisata;
4. Pajak reklame masih dapat dikembangkan lagi dengan penentuan spot-spot reklame yang layak dan penguatan koordinasi dengan pihak terkait tata ruang wilayah daerah karena adanya batasan jumlah maksimal reklame pada titik tertentu;
5. Pajak parkir masih bisa dikembangkan, mengingat setiap tahun jumlah kendaraan meningkat.

Pajak sebenarnya masih memiliki potensi yang besar seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi masyarakat terutama di sektor perdagangan. Meskipun demikian masih terdapat beberapa permasalahan yaitu:

1. Belum optimalnya fungsi koordinasi antar Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan dengan pengelolaan pendapatan Daerah.
2. Sistem pengawasan pemungutan pajak dan retribusi belum optimal sehingga perlu ditingkatkannya sistem pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak.

3. Sistem administrasi pencatatan penerimaan/pembayaran daerah dengan memanfaatkan teknologi informasi belum seluruhnya bisa diterapkan pada pemungutan pajak dan retribusi daerah.
4. Potensi obyek pajak dan obyek retribusi belum sepenuhnya bisa dikembangkan dengan optimal.

Tabel 4.3 Proyeksi Pajak Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Jenis	Tahun 2022
1.	Pajak Hotel	4.034.058.128
2.	Pajak Restoran	16.348.060.592
3.	Pajak Hiburan	876.284.182
4.	Pajak Reklame	2.499.311.445
5.	Pajak Penerangan Jalan	47.506.327.895
6.	Pajak Parkir	257.003.022
7.	Pajak Air Tanah	780.504.1371
8.	Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000
9.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	771.750.000
10.	Pajak Bumi dan Bangunan	55.125.000.000
11.	Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	93.779.200.599
JUMLAH		221.979.000.000

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, 2021

2) Perhitungan Proyeksi Retribusi Daerah Tahun 2022

Retribusi daerah pada tahun 2022 diperkirakan mencapai sebesar Rp39,16 milyar. Retribusi Daerah tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,05% karena adanya penambahan jenis retribusi yaitu retribusi pemakaian laboratorium lingkungan.

Tabel 4.4 Proyeksi Retribusi Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022

URAIAN	OPD	TAHUN 2022 (Rp.)
Retribusi Daerah		39.631.673.104
Retribusi Jasa Umum		3.998.441.120
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	1.555.197.120
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Dinas Perdagangan	244.658.000
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	1.203.247.500
Retribusi Rumah Tangga	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	112.200.000
Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	Dinas Perdagangan	93.636.000
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	224.400.000
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	21.602.500
Retribusi Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan dan	Dinas Kesehatan	8.000.000

URAIAN	OPD	TAHUN 2022 (Rp.)
Pelatihan Teknis		
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	535.500.000
Retribusi Jasa Usaha		32.964.731.984
Retribusi Penyewaan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.079.790.000
Retribusi Pemakaian Laboratorium	Dinas Kesehatan	141.555.000
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	15.250.000
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	5.000.000
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	Dinas Perdagangan	3.338.092.000
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	200.000.000
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit Ternak	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	71.500.000
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	281.250.000
Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	71.250.000
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	330.750.000
Retribusi Pemakaian Laboratorium	Dinas Lingkungan Hidup	20.000.000
Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	86.700.000
Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	Dinas Perhubungan	122.173.000
Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	Dinas Perhubungan	192.710.000
Retribusi Pelayanan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila	Bagian Umum Setda Bantul	5.000.000
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	110.250.000
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pariwisata	24.000.875.000
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1.000.000.000
Retribusi Penjualan Produksi Hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Tanaman	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	1.892.586.984
Retribusi Perizinan Tertentu		2.668.500.000
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman	2.205.000.000
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	463.500.000

Sumber : Aplikasi SIPD tahun 2021

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja daerah dikelompokkan menjadi yaitu:

1. Belanja Operasi yang peruntukannya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial.
2. Belanja Modal
3. Belanja Tidak Terduga
4. Belanja Transfer yang meliputi belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintah desa dan belanja bantuan keuangan kepada provinsi dan kabupaten/kota/pemerintah desa.

Berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan hasil kerja dan output dari setiap program dan kegiatan yang direncanakan. Setiap anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk melaksanakan program dan kegiatan harus didasarkan atas hasil dan output yang jelas dan terukur.

Alokasi belanja daerah disesuaikan dengan kemampuan pendanaan daerah dengan memperhatikan kebijakan daerah untuk mendukung prioritas daerah dalam rangka pencapaian visi dan misi daerah yang sudah ditetapkan pada RPJMD, serta memperhatikan kebutuhan belanja daerah yang bersifat wajib mengikat dan *earmarked*. Adapun kebijakan belanja daerah tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Belanja daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang mengikat, antara lain belanja pegawai, belanja bunga dan pembayaran pokok pinjaman, belanja subsidi, belanja bagi hasil, serta belanja barang dan jasa yang wajib dikeluarkan pada tahun yang bersangkutan;

2. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan belanja pegawai ASN dan pemberian gaji ke-13 serta tunjangan hari raya dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangannya (*acress* maksimal 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangannya), kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, tambahan penghasilan pegawai, tunjangan profesi guru, tambahan penghasilan guru, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan dan kematian;
3. Belanja prioritas kedua adalah belanja wajib pelayanan dasar pada urusan pemerintahan daerah sesuai peraturan perundang-undangan;
4. Penerimaan dari pajak daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan pajak daerah, belanja yang harus disediakan untuk layanan masyarakat yang terkait dengan perolehan pajak, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan pajak daerah. Selanjutnya sisanya dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;
5. Penerimaan dari retribusi daerah diutamakan untuk belanja program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan pengelolaan obyek retribusi baik fisik maupun non fisik, belanja untuk pengelolaan penerimaan retribusi, serta belanja bagi hasil kepada desa minimal sebesar 10% dari total penerimaan retribusi daerah. Selanjutnya juga dialokasikan untuk mendanai program pembangunan prioritas lainnya;
6. Penerimaan dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah diarahkan untuk pemenuhan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
7. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
8. Belanja Bantuan Keuangan diarahkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, yaitu ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran daerah yaitu menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa serta meningkatkan infrastruktur perdesaan dan fasilitas umum;
9. Pemerintah Daerah mengalokasikan 50% dari realisasi penerimaan pajak rokok untuk program Jaminan Kesehatan Nasional bagi warga miskin penerima bantuan iur (PBI);

10. Belanja yang bersumber dari dana transfer disesuaikan dengan peruntukannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Prioritas penggunaan dana transfer adalah sebagai berikut:
- a. Dana Bagi Hasil Pajak; penggunaan DBH pajak bersifat *block grant* yang penggunaannya diserahkan daerah sesuai kebutuhan daerah masing-masing kecuali untuk DBH CHT dengan ketentuan sebagai berikut :
 - 1) 50% untuk bidang kesejahteraan masyarakat dengan program peningkatan kualitas bahan baku dan pembinaan lingkungan sosial;
 - 2) 25% untuk bidang penegakan hukum dengan program pembinaan industri dan sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan pemberantasan barang kena cukai ilegal;
 - 3) 25% untuk bidang kesehatan dengan program pembinaan lingkungan sosial;
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU); untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK); untuk memenuhi penyediaan infrastruktur layanan publik, mendukung pemenuhan layanan dasar dan prioritas nasional, yaitu sarana/prasarana dasar yang menjadi urusan daerah (antara lain jalan, jembatan, pendidikan, kesehatan, sosial kependudukan, dan lain-lain) sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan.
11. Belanja yang bersumber dari dana penyesuaian otonomi khusus disesuaikan peruntukannya sesuai peraturan yang berlaku:
- a. Dana Insentif Daerah (DID); digunakan untuk mendanai kegiatan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang mendukung pencapaian kinerja atas kategori DID sesuai dengan jumlah alokasi yang diterima. Pada RKPD, asumsi belanja bersumber DID tidak diperhitungkan.
 - b. Dana Desa; digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.
12. Belanja Modal mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, karena :
- a. Belum memasukkan sumber dana yang berasal dari DAK Fisik;

- b. Belanja Transfer Antar Daerah bersumber BKK Provinsi baru memasukkan Dana Keistimewaan.
13. Belanja yang bersumber dari BKK DIY untuk Penugasan Keistimewaan digunakan pada Urusan Kelembagaan, Kebudayaan, Tata Ruang dan Pertanahan.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi serta proyeksi pendapatan daerah dalam 5 (lima) tahun terakhir, maka proyeksi belanja daerah, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1.
Realisasi Anggaran Belanja di Kabupaten Bantul Tahun 2016 s.d 2020

NO	URAIAN	REALISASI				
		TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
B	Belanja Daerah	2.016.543.978.974,11	2.076.742.163.062,60	2.165.651.760.352,96	2.283.585.037.902,49	2.199.124.638.702,17
I	Belanja Tidak Langsung	1.265.890.290.230,00	1.116.642.511.784,00	1.142.422.666.947,96	1.180.250.623.744,00	1.276.279.187.698,78
1	Belanja Pegawai	1.032.505.302.997,00	825.306.291.768,00	826.969.448.856,00	838.871.806.847,00	799.455.130.819,00
2	Belanja Bunga				39.333.333,00	
3	Belanja Hibah	31.862.069.500,00	50.474.188.248,00	44.796.019.984,96	59.645.560.800,00	84.737.761.664,00
4	Belanja Bantuan Sosial	3.267.350.000,00	1.650.300.000,00	7.852.092.250,00	6.920.020.000,00	759.900.000,00
5	Belanja Bagi Hasil kepada Pemerintah Prop/Kab/Kota dan Desa	12.429.995.580,00	14.330.194.685,00	17.798.976.196,00	22.290.550.000,00	22.871.517.591,78
6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Prop/Kab/Kota dan Desa	185.304.699.853,00	222.760.211.526,00	244.600.587.161,00	251.170.936.014,00	266.883.018.110,00
7	Belanja Tidak Terduga	520.872.300,00	2.121.325.557,00	405.542.500,00	1.312.416.750,00	101.571.859.514,00
II	Belanja Langsung	750.653.688.744,11	960.099.651.278,60	1.023.229.093.045,00	1.103.334.414.158,49	922.845.451.003,39
1	Belanja Pegawai	44.678.753.435,00	69.976.098.898,00	93.830.065.697,00	113.645.098.184,00	126.114.463.190,00
2	Belanja Barang dan Jasa	421.914.402.647,16	557.504.286.927,46	591.238.814.803,47	652.974.844.349,88	580.328.990.133,45
3	Belanja Modal	284.060.532.661,95	332.619.265.453,14	338.160.112.904,53	336.714.471.624,61	216.401.997.679,94

Sumber : BKAD Kabupaten Bantul, 2021

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur belanja daerah diuraikan menjadi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Prediksi Belanja tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut ini:

**Tabel 5.2. APBD Tahun 2021 dan Prediksi APBD Tahun 2022
sesuai PP No.12 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul**

No	Uraian	APBD Tahun 2021	Prediksi Tahun 2022
	BELANJA		
	Belanja Operasi	1.713.809.666.257,00	1.671.210.648.575,00
	Belanja Pegawai	951.471.887.422,00	976.185.711.017,00
	Belanja Barang dan Jasa	634.395.528.796,00	629.330.629.963,00
	Belanja Hibah	122.107.250.039,00	59.426.307.595,00
	Belanja Bantuan Sosial	5.835.000.000,00	6.268.000.000,00
	Belanja Modal	319.374.226.765,00	137.714.179.468,00
	Belanja Modal Tanah	81.642.505.988,00	5.800.000.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	39.913.336.607,00	24.013.129.843,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	38.119.778.381,00	21.018.207.414,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	158.838.255.789	84.778.254.261,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	860.350.000	2.104.587.950,00
	Belanja Tidak Terduga	34.055.411.058,00	14.439.050.000,00
	Belanja Transfer	277.791.487.090,00	318.227.059.340,00
	Belanja Bagi Hasil	26.103.398.250,00	26.103.398.250,00
	Belanja Bantuan Keuangan	251.688.088.840,00	292.123.661.090,00
	Jumlah Belanja	2.345.030.791.170,44	2.141.590.937.383,00

Sumber : Aplikasi SIPD, tahun 2021

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Sesuai PP Nomor 12 Tahun 2019, dalam pengelolaan anggaran belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, dan kegiatan terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah, dan Bantuan Sosial sebesar Rp1.671.210.648.575,00. Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa meliputi Belanja Bagi Hasil dan

Belanja Bantuan Keuangan. Adapun rincian belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja pegawai direncanakan untuk kebutuhan gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk *accres* sebesar 2,5%; tambahan penghasilan PNS sesuai dengan peraturan Bupati; iuran asuransi kesehatan; uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebesar Rp976.185.711.017,00
- b. Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD, sebesar Rp629.330.629.963,00
- c. Belanja hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang/jasa kepada Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemerintah daerah menganggarkan belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan dan hal ini sudah disesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku, sebesar Rp59.426.307.595,00
- d. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah menganggarkan belanja bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2021 pada SKPD terkait dan diuraikan

- menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek berkenaan, sebesar Rp6.268.000.000,00
- e. Belanja modal direncanakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, sebesar Rp137.714.179.468,00
 - f. Belanja tidak terduga dianggarkan untuk belanja yang sifatnya darurat seperti adanya bencana alam dan bencana sosial, sebesar Rp14.439.050.000,00
 - g. Belanja bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bagi hasil pendapatan kepada pemerintah desa atau pemerintah lainnya, sebesar Rp26.103.398.250,00
 - h. Belanja bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus kepada desa untuk pemerataan kemampuan keuangan, sebesar Rp292.123.661.090,00

Pagu indikatif setiap program pembangunan dihitung berdasarkan capaian indikator program pembangunan, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menentukan rencana penggunaan kapasitas riil anggaran yaitu alokasi belanja;
2. Menentukan keluaran/*output* setiap kegiatan;
3. Menghitung alokasi pagu dari setiap *output* kegiatan untuk setiap program;
4. Menghitung alokasi pagu setiap program setelah *output* kegiatan pada setiap program diverifikasi kebenarannya;
5. Menghitung alokasi pagu PD berdasarkan program yang menjadi tanggungjawab PD.

Kebijakan belanja berdasarkan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib dan urusan pilihan) dan kebijakan belanja berdasarkan perangkat daerah (PD) disajikan pada dua tabel di bawah ini:

Tabel 5.3.
Kebijakan Belanja Berdasarkan Urusan Pemerintahan Tahun 2022

KODE	BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA	PAGU 2022
01	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.232.203.159.353
0101	Pendidikan	666.277.728.950
1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	666.277.728.950
0102	Kesehatan	403.899.525.946
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	225.675.708.163
1.02.0.00.0.00.02.0000	RSUD Panembahan Senopati	178.223.817.783
0103	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	112.655.353.716
1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	110.757.523.766
2.10.1.03.0.00.01.0000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	1.897.829.950
0104	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	8.816.656.625
1.03.1.04.0.00.01.0000	Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8.816.656.625
0105	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	21.624.768.409
1.05.0.00.0.00.02.0000	Satuan Polisi Pamong Praja	10.016.231.291
1.05.0.00.0.00.03.0000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	11.608.537.118
0106	Sosial	18.929.125.707
1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	18.929.125.707
02	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	171.139.675.989
0207	Tenaga Kerja	20.736.381.186
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	20.736.381.186
0208	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.218.826.140
1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.218.826.140
0209	Pangan	640.522.120
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	640.522.120
0210	Pertanahan	9.388.133.366
2.10.1.03.0.00.01.0000	Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	8.788.133.366
	Keistimewaan	
2.14.2.13.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	600.000.000
0211	Lingkungan Hidup	28.725.824.973
2.11.0.00.0.00.01.0000	Dinas Lingkungan Hidup	28.725.824.973
0212	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.044.649.779
2.12.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.044.649.779
0213	Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.218.565.670
2.14.2.13.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	3.218.565.670
0214	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.078.938.124

KODE	BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA	PAGU 2022
2.14.2.13.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	12.078.938.124
0215	Perhubungan	17.881.554.319
2.15.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perhubungan	17.881.554.319
0216	Komunikasi dan Informatika	16.031.371.816
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	16.031.371.816
0217	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	6.202.640.015
2.17.3.31.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	6.202.640.015
0218	Penanaman Modal	5.499.070.188
2.18.0.00.0.00.01.0000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu	5.499.070.188
0219	Kepemudaan dan Olahraga	10.438.433.166
1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	10.438.433.166
0220	Statistik	176.400.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	176.400.000
0221	Persandian	844.457.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	844.457.000
0222	Kebudayaan	23.537.541.628
1.01.2.19.0.00.01.0000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	800.000.000
1.02.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kesehatan	600.000.000
1.06.2.08.0.00.01.0000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	550.000.000
2.16.2.20.2.21.01.0000	Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000
2.17.3.31.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	400.000.000
2.22.0.00.0.00.01.0000	Dinas Kebudayaan	18.452.541.628
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	1.000.000.000
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	235.000.000
3.30.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan	400.000.000
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	600.000.000
0223	Perpustakaan	5.241.298.019
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5.241.298.019
0224	Kearsipan	235.068.480
2.23.2.24.0.00.01.0000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	235.068.480
03	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	69.399.580.975
0325	Kelautan dan Perikanan	2.114.357.120
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	2.114.357.120
0326	Pariwisata	15.062.181.993
3.26.0.00.0.00.01.0000	Dinas Pariwisata	15.062.181.993
0327	Pertanian	30.345.481.676
3.27.2.09.3.25.01.0000	Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan	30.345.481.676
0330	Perdagangan	20.017.273.956
3.30.0.00.0.00.01.0000	Dinas Perdagangan	20.017.273.956
0331	Perindustrian	1.709.776.330
2.17.3.31.0.00.01.0000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	1.709.776.330
0332	Transmigrasi	450.509.900
2.07.3.32.0.00.01.0000	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	450.509.900
04	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	89.063.600.973
0401	Sekretariat Daerah	42.435.929.690

KODE	BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA	PAGU 2022
4.01.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat Daerah	39.596.021.690
4.01.0.00.0.00.01.0001	Bagian Administrasi Pembangunan	500.416.070
4.01.0.00.0.00.01.0002	Bagian Administrasi Pemerintahan	1.447.014.520
4.01.0.00.0.00.01.0003	Bagian Administrasi Pemerintahan Desa	3.061.783.900
4.01.0.00.0.00.01.0004	Bagian Hukum	1.161.653.200
4.01.0.00.0.00.01.0005	Bagian Umum	20.995.705.140
4.01.0.00.0.00.01.0006	Bagian Humas dan Protokol	1.284.643.490
4.01.0.00.0.00.01.0007	Bagian Administrasi Perekonomian	607.898.500
4.01.0.00.0.00.01.0008	Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat	8.067.999.850
4.01.0.00.0.00.01.0009	Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	1.567.893.020
4.01.0.00.0.00.01.0010	Bagian Organisasi	901.014.000
	Keistimewaan	2.839.908.000
2.14.2.13.0.00.01.0000	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan Masyarakat, dan Desa	1.057.984.500
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	330.502.000
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	299.595.500
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	381.726.000
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kapanewon Piyungan	45.300.000
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kapanewon Dlingo	45.300.000
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kapanewon Imogiri	45.300.000
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kapanewon Pandak	45.300.000
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kapanewon Bantul	45.300.000
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kapanewon Kretek	45.300.000
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kapanewon Bambanglipuro	45.300.000
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kapanewon Jetis	45.300.000
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kapanewon Kasihan	45.300.000
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kapanewon Pleret	45.300.000
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kapanewon Pajangan	45.300.000
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kapanewon Sanden	45.300.000
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kapanewon Sedayu	45.300.000
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kapanewon Sewon	45.300.000
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kapanewon Srandakan	45.300.000
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kapanewon Banguntapan	45.300.000
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kapanewon Pundong	45.300.000
0402	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	46.627.671.283
4.02.0.00.0.00.01.0000	Sekretariat DPRD	46.627.671.283
05	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	524.152.925.800
0501	Perencanaan	9.253.835.014
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	9.253.835.014
0502	Keuangan	398.743.158.929
5.02.0.00.0.00.01.0000	Badan Keuangan dan Aset Daerah	398.743.158.929
0503	Kepegawaian	115.925.588.117
5.03.0.00.0.00.01.0000	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	115.925.588.117
0505	Penelitian dan Pengembangan	230.343.740
5.01.5.05.0.00.01.0000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	230.343.740

KODE	BIDANG URUSAN / SATUAN KERJA	PAGU 2022
06	UNSUR PENGAWASAN	8.382.770.812
0601	UNSUR PENGAWASAN	8.382.770.812
6.01.0.00.0.00.01.0000	Inspektorat Daerah	8.382.770.812
07	UNSUR KEWILAYAHAN	41.879.851.435
0701	Kecamatan	41.879.851.435
7.01.0.00.0.00.01.0000	Kapanewon Piyungan	2.402.067.598
7.01.0.00.0.00.02.0000	Kapanewon Dlingo	2.321.120.365
7.01.0.00.0.00.03.0000	Kapanewon Imogiri	2.614.633.857
7.01.0.00.0.00.04.0000	Kapanewon Pandak	2.493.155.654
7.01.0.00.0.00.05.0000	Kapanewon Bantul	2.412.606.781
7.01.0.00.0.00.06.0000	Kapanewon Kretek	2.555.863.812
7.01.0.00.0.00.07.0000	Kapanewon Bambanglipuro	2.526.906.239
7.01.0.00.0.00.08.0000	Kapanewon Jetis	2.307.959.128
7.01.0.00.0.00.09.0000	Kapanewon Kasihan	2.511.444.218
7.01.0.00.0.00.10.0000	Kapanewon Pleret	2.445.055.203
7.01.0.00.0.00.11.0000	Kapanewon Pajangan	2.387.020.859
7.01.0.00.0.00.12.0000	Kapanewon Sanden	2.374.412.216
7.01.0.00.0.00.13.0000	Kapanewon Sedayu	2.517.425.348
7.01.0.00.0.00.14.0000	Kapanewon Sewon	2.657.508.365
7.01.0.00.0.00.15.0000	Kapanewon Srandakan	2.357.080.762
7.01.0.00.0.00.16.0000	Kapanewon Banguntapan	2.586.663.411
7.01.0.00.0.00.17.0000	Kapanewon Pundong	2.408.927.619
08	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	5.369.372.046
0801	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.369.372.046
8.01.0.00.0.00.01.0000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5.369.372.046
	JUMLAH	2.141.590.937.383

Sumber: SIPD, 2021

Tabel 5.4.
Rekapitulasi Belanja Menurut Perangkat Daerah Kabupaten Bantul
Tahun Anggaran 2022

KODE	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
1.01.01	DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA	677.516.162.116
1.02.01	DINAS KESEHATAN	226.275.708.163
1.02.02	RSUD PANEMBAHAN SENOPATI	178.223.817.783
1.03.01	DINAS PEKERJAAN UMUM PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	119.574.180.391
1.05.0201	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	10.016.231.291
1.05.0301	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11.608.537.118
1.06.0101	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	20.697.951.847
2.01.0101	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	21.186.891.086
2.04.0101	DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG	10.685.963.316
2.05.0101	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	28.725.824.973
2.06.0101	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	9.044.649.779

KODE	PERANGKAT DAERAH	PAGU INDIKATIF
2.08.0101	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KB, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DAN DESA	16.955.488.294
2.09.0101	DINAS PERHUBUNGAN	17.881.554.319
2.10.0101	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17.552.228.816
2.11.0101	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, DAN PERINDUSTRIAN	8.312.416.345
2.12.0101	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	5.499.070.188
2.16.0101	DINAS KEBUDAYAAN	18.452.541.628
2.17.0101	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	5.476.366.499
3.02.0101	DINAS PARIWISATA	16.062.181.993
3.03.0101	DINAS PERTANIAN, PANGAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN	33.035.360.916
3.06.0101	DINAS PERDAGANGAN	20.417.273.956
4.01.0304	BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	500.416.070
4.01.0301	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN	1.447.014.520
4.01.0302	BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	3.061.783.900
4.01.0303	BAGIAN HUKUM	1.161.653.200
4.01.0308	BAGIAN UMUM	20.995.705.140
4.01.0309	BAGIAN HUMAS DAN PROTOKOL	1.284.643.490
4.01.0305	BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN	607.898.500
4.01.0310	BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT	8.067.999.850
4.01.0306	BAGIAN LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	1.567.893.020
4.01.0307	BAGIAN ORGANISASI	901.014.000
4.01.0401	SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	46.627.671.283
4.03.0101	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	9.814.680.754
4.04.0101	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	399.042.754.429
4.05.0101	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	116.307.314.117
4.02.0101	INSPEKTORAT	8.382.770.812
4.01.0901	KAPANEWON PIYUNGAN	2.447.367.598
4.01.1001	KAPANEWON DLINGO	2.366.420.365
4.01.1101	KAPANEWON IMOGIRI	2.659.933.857
4.01.1201	KAPANEWON PANDAK	2.538.455.654
4.01.1301	KAPANEWON BANTUL	2.457.906.781
4.01.1401	KAPANEWON KRETEK	2.601.163.812
4.01.1501	KAPANEWON BAMBANGLIPURO	2.572.206.239
4.01.1601	KAPANEWON JETIS	2.353.259.128
4.01.1701	KAPANEWON KASIHAN	2.556.744.218
4.01.1801	KAPANEWON PLERET	2.490.355.203
4.01.1901	KAPANEWON PAJANGAN	2.432.320.859
4.01.2001	KAPANEWON SANDEN	2.419.712.216
4.01.2101	KAPANEWON SEDAYU	2.562.725.348
4.01.2201	KAPANEWON SEWON	2.702.808.365
4.01.2301	KAPANEWON SRANDAKAN	2.402.380.762
4.01.0801	KAPANEWON BANGUNTAPAN	2.631.963.411
4.01.2401	KAPANEWON PUNDONG	2.454.227.619
8.01.01	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	5.969.372.046
	Jumlah Total	2.141.590.937.383

Sumber : SIPD, 2021

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran akibat lebih besarnya alokasi belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah. Penerimaan Pembiayaan dapat bersumber dari Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SiLPA) Tahun Anggaran 2021, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pinjaman dan Penerimaan Piutang Daerah. Disisi lain apabila terdapat surplus maka pembiayaan daerah dapat dialokasikan untuk penyertaan modal kepada BUMD yang dapat memberikan nilai tambah ekonomis bagi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Kebijakan pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu kebijakan penerimaan pembiayaan dan kebijakan pengeluaran pembiayaan.

Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, maupun penerimaan piutang daerah. Dalam hal ada kecenderungan terjadinya defisit anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos penerimaan pembiayaan daerah.

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2022 diarahkan sebagai berikut:

1. Proyeksi pembiayaan daerah Tahun 2022 diasumsikan turun dari Tahun 2021 dikarenakan adanya penurunan SiLPA.
2. Menjaga agar keuangan daerah dan apabila terdapat defisit anggaran sedapat mungkin ditutup dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah mencakup, penyertaan modal (investasi) daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, serta pemberian dana bergulir. Jika ada kecenderungan akan terjadinya surplus anggaran, harus diantisipasi kebijakan-kebijakan yang akan berdampak pada pos pengeluaran pembiayaan daerah, seperti penyelesaian pembayaran pokok utang dan penyertaan modal.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah di Kabupaten Bantul Tahun 2022 diarahkan sebagai berikut:

1. Proyeksi alokasi untuk Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp24.500.000.000,00. Proyeksi tersebut disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang penyertaan modal dengan mempertimbangkan keuangan daerah, adapun rincian penyertaan modal sebagai berikut:
 - a. Bank BPD Rp13.200.000.000,00
 - b. Bank Bantul Rp 4.000.000.000,00
 - c. PDAM Rp 6.000.000.000,00.
 - d. Aneka Dharma Rp 1.300.000.000,00
2. Kebijakan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal daerah yang telah ditetapkan dalam Perda dengan prinsip kehati-hatian;
3. Penguatan pengelolaan dana bergulir.

Hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber penerimaan pembiayaan daerah dan realisasi serta proyeksi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) tahun terakhir sebelum tahun rencana, proyeksi/target tahun rencana serta 1 (satu) tahun setelah tahun rencana dalam rangka perumusan arah kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan pada tabel berikut:

Tabel 6.1.
Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 s.d 2020

NO	URAIAN	REALISASI				
		TAHUN 2016	TAHUN 2017	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	2	3	4	5	6	7
C	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	293.078.441.725,81	261.454.280.812,54	256.630.482.020,39	296.985.005.918,40	238.678.713.544,54
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	283.026.051.157,81	254.841.678.796,54	247.144.690.990,39	279.158.249.016,40	234.047.636.293,54
2	Penerimaan Piutang Daerah / Penerimaan Kembali Investasi Dana Bergulir	8.710.516.768,00	6.612.602.016,00	9.485.791.030,00	14.853.006.902,00	3.917.740.046,00
3	Penjualan Kekayaan daerah yang dipisahkan	1.341.873.800,00	-	-	2.973.750.000,00	713.337.205,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	24.752.000.000,00	24.364.800.000,00	39.572.500.000,00	48.891.500.000,00	11.598.814.262,62
1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	16.045.000.000,00	17.150.000.000,00	31.500.000.000,00	34.300.000.000,00	8.000.814.262,62
2	Pembayaran Utang Pokok	-	-	-	7.000.000.000,00	0
3	Dana Bergulir	8.707.000.000,00	7.214.800.000,00	8.072.500.000,00	7.591.500.000,00	3.598.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	268.326.441.725,81	237.089.480.812,54	217.057.982.020,39	248.093.505.918,40	227.079.899.281,92
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN	252.116.629.105,54	247.226.307.320,39	279.158.249.016,40	234.047.636.293,54	238.201.393.766,17

Sumber : BKAD Kabupaten Bantul, 2021

Berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, struktur pembiayaan daerah diuraikan menjadi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Prediksi Pembiayaan tahun 2022 tertuang dalam tabel berikut ini:

Tabel 6.2. APBD Tahun 2021 dan Prediksi APBD Tahun 2022 sesuai PP No.12 Tahun 2019 di Kabupaten Bantul

No	Uraian	APBD Tahun 2021	Prediksi Tahun 2022
	PEMBIAYAAN		
	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	182.026.403.686,00	145.278.505.860,00
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	171.026.403.686,00	134.278.505.860,00
	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	36.000.000.000,00	35.500.000.000,00
	Penyertaan Modal Daerah	25.000.000.000,00	24.500.000.000,00
	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00	11.000.000.000,00
	Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
	Pembiayaan Netto	146.026.403.686,00	109.778.505.860,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00

Sumber : Aplikasi SIPD, tahun 2021

Rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan tahun anggaran 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 6.3.
Rincian Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan
Tahun Anggaran 2022**

KODE	URAIAN	TARGET 2022
1	2	3
4	PENDAPATAN	
41	PENDAPATAN ASLI DAERAH	493.854.008.396,00
411	Pajak Daerah	221.979.000.000,00
412	Retribusi Daerah	39.631.673.104,00
413	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	23.707.166.955,00
414	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	208.536.168.337,00
42	PENDAPATAN TRANSFER	1.531.958.423.127,00
421	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.343.338.183.890,00
	Dana Perimbangan	1.203.615.492.890,00
	Dana Bagi Hasil Pajak dan SDA	29.153.017.890,00
	Dana Alokasi Umum	941.315.965.000,00
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	233.146.510.000,00
	Dana Insentif Daerah	30.323.619.000,00

KODE	URAIAN	TARGET 2022
1	2	3
	Dana Desa	109.399.072.000,00
422	Pendapatan Transfer Antar Daerah	188.620.239.237,00
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	158.913.899.237,00
	Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	29.706.340.000,00
43	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	6.000.000.000,00
431	Pendapatan Hibah	6.000.000.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN	2.031.812.431.523,00
5	BELANJA	
51	BELANJA OPERASI	1.671.210.648.575,00
511	Belanja Pegawai	976.185.711.017,00
512	Belanja Barang dan Jasa	629.330.629.963,00
513	Belanja Bunga	0,00
514	Belanja Subsidi	0,00
515	Belanja Hibah	59.426.307.595,00
516	Belanja Bantuan Sosial	6.268.000.000,00
52	BELANJA MODAL	137.714.179.468,00
521	Belanja Modal Tanah	5.800.000.000,00
522	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	24.013.129.843,00
523	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	21.018.207.414,00
524	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	84.778.254.261,00
525	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.104.587.950,00
53	BELANJA TIDAK TERDUGA	14.439.050.000,00
54	BELANJA TRANSFER	318.227.059.340,00
541	Belanja Bagi Hasil	26.103.398.250,00
542	Belanja Bantuan Keuangan	292.123.661.090,00
	JUMLAH BELANJA	2.141.590.937.383,00
	SURPLUS/(DEFISIT)	(109.778.505.860,00)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
61	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	
611	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	134.278.505.860,00
615	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	145.278.505.860,00
62	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	
622	Penyertaan Modal Daerah	24.500.000.000,00
624	Pemberian Pinjaman Daerah	11.000.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	35.500.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTO	109.778.505.860,00
	SILPA	0,00
	TOTAL APBD	2.177.090.937.383

Sumber : Aplikasi SIPD, tahun 2021

Tingginya kebutuhan anggaran dalam melaksanakan program yang telah disusun oleh Pemerintah Kabupaten Bantul, sedangkan kemampuan pendanaan APBD terbatas sehingga tidak semua program-program dapat dibiayai oleh APBD Kabupaten Bantul. Berkaitan dengan kondisi tersebut maka diperlukan upaya untuk mencari sumber pembiayaan alternatif lainnya yang dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dengan tetap memperhatikan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, diantaranya dengan skema Kerjasama Pemerintah dan pelaku usaha melalui Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan (TSLP)/*Corporate Social Responsibility (CSR)*. TSLP/CSR tersebut lebih diarahkan untuk program penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pengentasan kemiskinan, kompensasi pemulihan dan/atau peningkatan kualitas fungsi lingkungan hidup, dan program strategis yang selaras dengan prioritas program pemerintah daerah. Adapun TSLP/CSR pada tahun 2022 ditargetkan sebesar Rp8.941.577.329,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

7.1. Strategi Pemerintah Daerah

Beberapa upaya strategis untuk mendukung terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah yang profesional, terbuka, dan bertanggung jawab, ditempuh dengan:

1. Mempedomani kebijakan pemerintah dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah;
2. Penggunaan aplikasi pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yaitu Sistem Informasi Manajemen Aset (Simas);
3. Menjalin kerjasama dengan perwakilan BPKP DIY untuk asistensi penerapan manajemen pengelolaan keuangan daerah melalui pendampingan atau *coaching clinic* penyusunan neraca Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pengelolaan keuangan BLUD Puskesmas;
4. Mengikuti Diklat teknis dan *workshop* mengenai pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, perkembangan peraturan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat maupun lembaga keuangan lainnya;
5. Mengupayakan adanya informasi sedini mungkin dari pemerintah pusat agar prediksi pendapatan daerah, khususnya dana perimbangan, dalam APBD semakin realistis;
6. Melaksanakan sistem informasi pengelolaan pajak daerah yang terintegrasi melalui Simpada;
7. Meningkatkan koordinasi antar SKPD penghasil dalam upaya tercapainya target pendapatan asli daerah yang diampu oleh masing-masing SKPD penghasil dan mengevaluasi atas kinerja pendapatan asli daerah;
8. Meningkatkan koordinasi antar SKPD untuk memonitor dan melaporkan pengelolaan keuangan dan barang daerah yang menjadi tanggung-jawabnya;
9. Penyebarluasan informasi pendapatan, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah melalui media masa, media *online*, *leaflet*, dan lain-lain;

10. Menambah dan merevisi *Standard Operating Procedure* (SOP) pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan aset daerah berdasarkan peraturan yang berlaku;
11. Melaksanakan tata kelola keuangan berbasis akrual agar dapat menyajikan laporan keuangan lebih transparan dan akuntabel.

Beberapa upaya yang dilakukan agar target pendapatan tercapai adalah:

a. Pendapatan Asli Daerah

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Optimalisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pajak dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan mutu pelayanan publik kepada wajib pajak/ retribusi daerah dengan memberikan kecepatan/kemudahan dalam pelayanan pembayaran pajak, akses informasi dan kemudahan dalam pengurusan pajak.
 - b. Memperbaiki dan memperluas basis data objek dan subjek pajak/retribusi daerah.
 - c. Memberikan *reward* bagi pamong desa dan dukuh yang wilayahnya telah lunas sebelum jatuh tempo.
 - d. Mengembangkan pelaporan pajak secara online untuk wajib pajak yang melakukan sistem pemungutan secara *self assessment*.
2. Mengoptimalkan pengelolaan manajemen kas daerah dengan memanfaatkan *idle cash* dalam bentuk deposito;
3. Optimalisasi pendayagunaan aset daerah yang berpotensi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah;
4. Meningkatkan kontribusi penerimaan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD melalui upaya memperkuat permodalan perusahaan milik daerah/BUMD;
5. Mengoptimalkan penerimaan yang berasal dari bagi hasil pajak melalui kerjasama instansi vertikal dan daerah dalam menyerap basis pajak terkait;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pendapatan daerah misal dengan memperbaiki fasilitas obyek retribusi.

b. Pendapatan dari Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan yang Sah

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian target pendapatan adalah:

- 1) Melakukan updating data-data daerah yang merupakan variabel penentu alokasi dana perimbangan di daerah.
- 2) Membantu proses pemungutan pajak pusat/propinsi agar nantinya bagi hasil pajak tersebut bisa meningkat.
- 3) Melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat/propinsi dan instansi lainnya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin timbul dalam rangka upaya penggalan pendapatan daerah.

7.2. Strategi dan Prioritas Pembangunan Daerah yang Disusun Secara Terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional yang Akan Dilaksanakan di Daerah

7.2.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan hasil perumusan capaian strategis yang menunjukkan tingkat kinerja pembangunan tertinggi sebagai dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan dan mengacu pada visi dan misi RPJMD.

Kebijakan pembangunan daerah merupakan operasionalisasi dari visi dan misi daerah mengacu Perubahan RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Kebijakan ini mengacu pada tujuan Pemerintah Kabupaten Bantul yang diarahkan pada:

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN
- 2) Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat berbudaya
- 3) Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas
- 4) Mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana
- 5) Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat

Hubungan visi, misi, tujuan, dan sasaran daerah serta indikator sasaran, strategi, dan arah kebijakan Kabupaten Bantul disajikan pada tabel 7.1.

Tabel 7.1.
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Bantul

VISI : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang unggul, sejahtera dan berkeadilan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, akuntabel dan menghadirkan pelayanan publik prima	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, efisien dan bebas KKN	Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 3. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) 4. Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 5. Nilai Rata-rata Capaian Opini BPK Kinerja <i>Monitoring Centre for Prevention (MCP)</i> KPK 	1. Penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan teknologi informasi yang terintegrasi 2. Penataan kelembagaan dan pengembangan sumber daya aparatur. 3. Penerapan teknologi informasi dan komunikasi untuk menghadirkan layanan publik yang mudah, cepat dan akurat.
2	Pengembangan sumberdaya manusia unggul,	Mewujudkan peningkatan kualitas hidup	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang	1. Umur Harapan Hidup	Penguatan sistem kesehatan	1. Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	berkarakter dan berbudaya	masyarakat berbudaya		tinggi			2. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan 3. Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga 4. Optimalisasi peran posyandu untuk layanan kesehatan
				Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas	2. Angka Harapan Lama Sekolah	Peningkatan daya saing pendidikan	1. Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa melalui peningkatan peran orangtua siswa dan masyarakat, perbaikan metodologi mengajar guru dan memberikan perhatian khusus terhadap siswa yang tertinggal dan bermasalah 2. Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal 3. Pembinaan pendidikan keagamaan dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa 4. Fasilitasi minat dan bakat generasi muda 5. Pembangunan sarana

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							<p>prasarana olah raga dan pengembangan sistem pembinaan olah raga menuju peningkatan prestasi atlet</p> <p>6. Pembinaan generasi muda untuk peningkatan peran dan partisipasi dalam pembangunan</p>
				Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	3. Desa/kalurahan Pamor Budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelestarian dan pengembangan budaya 2. Pelestarian Cagar Budaya 3. Pengembangan dan pemajuan kebudayaan 4. Pengembangan potensi Desa Budaya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemeliharaan, pengelolaan dan pengembangan nilai-nilai budaya, pengetahuan dan teknologi, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, dan seni untuk mendukung kebudayaan istimewa 2. Pembangunan prasarana pengembangan kebudayaan 3. Memasyarakatkan tata nilai budaya istimewa 4. Pembinaan organisasi budaya dan regenerasi SDM Kebudayaan 5. Optimalisasi peran kalurahan dalam pengembangan kebudayaan 6. Pembinaan kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok masyarakat

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
3	Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif	Mewujudkan perekonomian daerah yang berkualitas	Indeks Pembangunan Ekonomi Inklusif	Terwujudnya pemerataan pendapatan	1. Gini Ratio 2. Pertumbuhan Ekonomi 3. Tingkat Pengangguran 4. Kabupaten Kreatif	Peningkatan pendapatan pertanian dan perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pemanfaatan lahan pekarangan 2. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan 3. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian perikanan 4. Penerapan teknologi untuk peningkatan produksi dan pengolahan hasil pertanian yang berkualitas 5. Meningkatkan kualitas sumberdaya pertanian dan perikanan 6. Pengembangan Agrobisnis dan Agrowisata
						Pengembangan pariwisata berbasis masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan daya tarik destinasi pariwisata 2. Pengembangan Sumber Daya Manusia pariwisata 3. Peningkatan Promosi dan Kerjasama pariwisata 4. Pengembangan produk lokal yang mendukung pariwisata
					Perlindungan produk lokal dan pengembangan jaringan pemasaran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas produk lokal oleh Usaha Mikro 2. Fasilitasi pengembangan pemasaran dan kerjasama usaha mikro dan kecil 	

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							3. Modernisasi pasar tradisional 4. Peningkatan Kualitas perkoperasian
						Pengembangan dan perlindungan Usaha Mikro	Penyerapan investasi bidang pertanian, industri, perdagangan, pariwisata dan jasa lainnya untuk penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan rakyat
						Pengembangan SDM Industri Kreatif.	Penyiapan tenaga kerja kompetitif
						Pengembangan Kawasan industri Piyungan dan Kawasan peruntukan industri Sedayu-Pajangan	1. Optimalisasi pengelolaan Kawasan Industri Piyungan 2. Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif
4	Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan pengelolaan risiko bencana	Mewujudkan infrastruktur ramah lingkungan yang berbasis manajemen bencana	Indeks Pembangunan Infrastruktur	Terpenuhinya kualitas sarana prasarana publik	1. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Infrastruktur	Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur	1. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang lebih merata 2. Penyediaan infrastruktur pedesaan untuk pertumbuhan ekonomi kawasan 3. Penyediaan rumah dan permukiman yang layak dan aman 4. Penyediaan Infrastruktur Sarana dan prasarana lalu lintas

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
					2. Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas perencanaan penataan ruang 2. Penguatan pengawasan dan Pengendalian pemanfaatan ruang
				Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	3. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Pengelolaan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanganan pencemaran lingkungan hidup dan sumber-sumbernya 2. Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan ekosistem 3. Pengawasan dan pengendalian lingkungan hidup 4. Pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah
				Menurunnya Risiko Bencana	4. Indeks Risiko Bencana	Peningkatan kapasitas daerah penurunan kerentanan bencana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkuatan Kebijakan dan Kelembagaan 2. Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu 3. Pengembangan Sistem Informasi, Diklat dan Logistik 4. Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana 5. Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Mitigasi Bencana 6. Perkuatan Kesiapsiagaan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN DAERAH	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
							dan Penanganan Darurat Bencana 7. Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana
5	Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu dan pencapaian Bantul sebagai Kabupaten Layak Anak, Ramah Perempuan dan Difabel	Meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Persentase pelayanan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)	Perlindungan dan Jaminan Sosial masyarakat	1. Peningkatan kesejahteraan sosial berbasis keluarga 2. Peningkatan sarana prasarana penanggulangan masalah sosial dan pengembangan sumber daya tenaga kesejahteraan sosial
			Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Meningkatnya kesejahteraan sosial kelompok rentan	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Pemenuhan pelayanan dasar secara inklusif	1. Penguatan sistem perlindungan anak dan perempuan 2. Fasilitasi pengembangan ekonomi dan kesejahteraan sosial kelompok difabel 3. Pemberdayaan masyarakat dan relawan untuk peningkatan kesejahteraan sosial kelompok rentan 4. Pembangunan infrastruktur ramah difabel
					Kategori Kabupaten Layak Anak	Penyediaan Layanan Ramah Anak	Peningkatan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, edukasi, informasi, komunikasi layanan ramah anak

Sumber: Rancangan Akhir RPJMD Kabupaten Bantul 2021 – 2026

Penetapan prioritas pembangunan daerah Tahun 2022 didasari oleh permasalahan/kendala pembangunan daerah yang dijabarkan menurut urusan pemerintah daerah sebagai berikut :

Tabel 7.2
Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
Aspek Kesejahteraan Masyarakat									
	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,5	-0,13	-1,66	Belum Tercapai	Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan kontraksinya pertumbuhan ekonomi	Pemulihan ekonomi pada semua sektor dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan	Lintas PD
	Pemerataan Pendapatan	Angka	0,3800	0,3800	0,418	Belum Tercapai	Pertumbuhan pendapatan kelompok menengah ke atas belum diiringi pertumbuhan pendapatan pada kelompok miskin	Dukungan program pengentasan kemiskinan dan peningkatan SDM	Lintas PD
							Dampak pandemi Covid-19 menyebabkan peningkatan warga miskin	- Relaksasi anggaran dialihkan untuk penanganan Covid-19 - Bantuan sosial masyarakat termasuk pendidikan dan jaminan kesehatan, dan dukungan program pelatihan dan pemberdayaan UMKM terdampak	Lintas PD
	Indeks Pembangunan Manusia	Angka Indeks	80,34	80,34	80,01	Belum Tercapai	Upah kerja non formal masih di bawah standar (UMK)	Tingginya angka harapan lama sekolah Tingginya umur harapan hidup	Lintas PD Lintas PD
	Angka Kemiskinan	%	9,59	13,94	13,50	Melampaui	Belum tepatnya sasaran program, kurangnya keterpaduan dalam implementasi, serta belum optimalnya fungsi institusi yang mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan	Dukungan keterpaduan program kemiskinan lintas sektor melalui optimalisasi kinerja TKPK kabupaten sampai pedukuhan, Forum CSR, Sinkronisasi APBD-APBDes terkait penanggulangan kemiskinan (RTLH, pendataan/musdes)	Lintas PD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020		Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<)	Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Cakupan Pelestarian adat dan tradisi	Persen	27	27				Kesiapan kriteria pelaksanaan kegiatan budaya belum terpenuhi	Dukungan infrastruktur dan fasilitasi penyelenggaraan event budaya	Disbud
	Persentase prestasi olahraga tingkat propinsi (POPDA/Pekan Olah Raga Pelajar) yang diikuti	%	29	29	29		Sesuai			Dikpora
Aspek Pelayanan Umum										
Layanan Urusan Wajib Dasar										
Urusan Pendidikan										
	Angka Harapan Lama Sekolah	Tahun	15,38	15,38	15,17		Belum Tercapai	(1) Belum optimalnya kinerja pengelolaan BOP SD dan SMP; (2) Belum optimalnya APM SD/MI; (3) Belum optimalnya APM SMP/MTs; (4) Belum optimalnya penanganan Tingkat Putus Sekolah,	(1) Orangtua sadar dan peduli manfaat pendidikan untuk peningkatan taraf hidup anaknya di masa yang akan datang; (2) Aksesibilitas SD dan SMP Gratis Berkualitas,	Dikpora
	Angka rata-rata lama sekolah	Tahun	8,99	8,99	9,55		Melampaui	Belum optimalnya kinerja pengelolaan BOP SD dan SMP,	Orangtua sadar dan peduli manfaat pendidikan untuk peningkatan taraf hidup anaknya di masa yang akan datang,	Dikpora
								Masih banyak SD yang belum memiliki ruang perpustakaan yang memenuhi SPM	Dilaksanakan pembangunan ruang/gedung perpustakaan secara bertahap,	Dikpora
								Perlu peningkatan Kesejahteraan bagi GTT dan PTT	Diupayakan penambahan insentif secara bertahap,	Dikpora
								Masih kurangnya partisipasi warga dalam penyelenggaraan Pendidikan Non Formal	Dibutuhkan peran aktif dari semua pihak untuk memberikan motivasi agar warga belajar memiliki kesadaran untuk belajar secara aktif di PKBM masing-masing	Dikpora
	Angka Partisipasi Kasar (APK)									
	APK SD/MI	%	96,4	96,4	101,78		Sesuai	Sebagian siswa bersekolah di luar wilayah kabupaten	Dukungan program peningkatan mutu pendidikan SD/MI	Dikpora

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	APK SMP/MTs	%	95,3	95,3	102,86	Sesuai			
	APK PAUD	%	98,9	98,9	98,9	Sesuai	Masih rendahnya kualitas pembelajaran di lembaga PAUD yang dikelola oleh kelompok masyarakat atau pihak swasta	Orangtua sadar dan peduli manfaat PAUD,	Dikpora
							Belum optimalnya kinerja pengelolaan BOP jenjang PAUD	Orangtua jadi Guru dan Guru jadi Orangtua,	Dikpora
							Belum optimalnya aksesibilitas PAUD Berkualitas		
							Masih kurangnya penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM	Penambahan penilik PAUD, Penilik LKP dan Penilik PKBM	Dikpora
	Angka Partisipasi Murni (APM)								
	APM SD/MI	%	84,65	84,65	92,96	Sesuai	Belum optimalnya APM SD/MI,	Aksesibilitas SD dan SMP Gratis Berkualitas,	Dikpora
	APM SMP/MTs	%	68,2	68,2	79,01	Sesuai	Belum optimalnya APM SMP/MTs,		
	Peringkat rata-rata nilai USM SD/MI	Angka (SD)	Ranking II DIY	Ranking II DIY	-		Kualitas Guru SD / MI dan SMP / MTs	Ada guru yang kompeten dalam peningkatan kualitas dan penuntasan target pembelajaran	Dikpora
							Belum optimalnya kualitas pembelajaran dan disiplin penuntasan target pembelajaran	Orangtua berperan konstruktif dalam peningkatan kualitas pembelajaran di rumah	Dikpora
							Pembatasan tatap muka kegiatan belajar mengajar	Pembelajaran jarak jauh dengan program Guru Kunjung Siswa [GKS] khusus PAUD dan GKS untuk konsultasi pelajaran khusus jenjang SD/MI serta SMP/MTs,	Dikpora
	Peringkat rata-rata nilai UN SMP/MTs	Angka (SMP)	Ranking I DIY	Ranking I DIY	-		Metode pembelajaran belum bisa membuat siswa belajar secara maksimal Buku atau modul soal-soal untuk pegangan siswa kurang beragam	Siswa termotivasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran untuk meningkatkan nilai UN nya, Kondisi pandemi tidak menjadi halangan namun menjadi metode baru pembelajaran dengan pemanfaatan teknologi informasi	Dikpora

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Jumlah Prestasi Non Akademik Tk Nasional	Buah	7	7	7	Sesuai	Pengiriman peserta lomba non akademik Tk Nasional terbatas	Lebih mempersiapkan dan memperbanyak pengiriman peserta lomba non akademik	Dikpora
	Presentase Kelulusan								
	SD/MI	%	100	100	100	Sesuai			
	SMP/MTs	%	100	100	100	Sesuai			
	Angka Melanjutkan								
	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	%	100	100	100	Sesuai			
	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	100	100	100	Sesuai			
	Angka Putus Sekolah								
	SD/MI	%	0,02	0,02	0,004	Sesuai	Belum optimalnya peningkatan kualitas pembelajaran di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM),	PKBM yang terselenggara secara efisien dan efektif	Dikpora
	SMP/MTs	%	0,02	0,02	0,004	Sesuai	Belum optimalnya kinerja pengelolaan BOP PKBM	Peserta pendidikan kesetaraan yang termotivasi untuk menuntaskan pembelajarannya,	Dikpora
							Belum optimalnya penanganan Tingkat Putus Sekolah,		
Urusan Kesehatan									
	Umur Harapan Hidup	Tahun	73,65	73,65	73,86	Melampaui	Masih perlunya upaya penguatan internalisasi Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di masyarakat	Masyarakat berparadigma sehat, lingkungannya sehat dan penyakit menular dan tidak menular terkendali secara optimal	Dinkes
							GERMAS belum menjadi budaya hidup di masyarakat,		
							Indeks Keluarga Sehat masih rendah		
							Belum optimalnya pencapaian SPM	Dukungan program kegiatan pemenuhan	Dinkes

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Bidang Kesehatan, 12 Jenis Pelayanan Dasar	SPM	
							Ancaman infeksi new emerging dan re-emerging yang dapat menimbulkan Kegawatdaruratan Kesehatan Masyarakat		
							Belum optimalnya BINWASDAL pada yankes swasta,		
							Belum optimalnya pelaksanaan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu		
							Peningkatan Kasus Penyakit Tidak Menular dan ODGJ	Skrining faktor risiko penyakit tidak menular pada OPD di Kab Bantul Skrining kepada masyarakat umum yang dilakukan puskesmas Deteksi dini pada penderita retardasi mental Pengobatan dan pemantauan keteraturan minum obat,	Dinkes
							Masih belum optimalnya kinerja puskesmas	Akreditasi puskesmas	Dinkes
							Masih rendahnya jumlah Tempat Pengelolaan Makanan/TPM (kantin, warung makan, restoran dan jasa boga) yang memiliki sertifikat laik sehat		Dinkes
							Perlu percepatan peningkatan cakupan desa melaksanakan 5 pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM)	Dukungan program kegiatan berbasis masyarakat	Dinkes
							Peningkatan Kasus Penyakit Tidak Menular dan ODGJ	Skrining faktor risiko penyakit tidak menular pada OPD di Kab Bantul	Dinkes
								Skrining kepada masyarakat umum yang dilakukan puskesmas	Dinkes

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
								Deteksi dini pada penderita retardasi mental	Dinkes
								Pengobatan dan pemantauan keteraturan minum obat,	Dinkes
							Munculnya pandemi Covid-19	Sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan melalui media leaflet, baliho, spanduk, media elektronik	Dinkes
								Skrining rapid di lokasi pasar, populasi pelaku perjalanan, tenaga kesehatan, petugas yang melayani masyarakat,	Dinkes
								Skrining swab / RT-PCR secara langsung pada karyawan di puskesmas, RS dan Dinas Kesehatan, serta swab massal pada populasi beresiko (pelaku perjalanan dan kontak erat pasien positif) yang dijaring melalui aplikasi	Dinkes
								Penguatan Laboratorium untuk Covid : yaitu E, Clia dan Skrining RDT dan Mobile PCR	
								Desinfektan di lingkungan rumah penderita confirm positif oleh petugas BPBD, PMI dan FPRB	
								Penegakan disiplin protokol kesehatan di masyarakat oleh satgas penegakan hukum	
								Sosialisasi protokol kesehatan kepada instansi perguruan tinggi dan pengelola pondok pesantren	
								Rujukan pasien dari rumah domisili ke RS oleh PSC 119	
								Isolasi pasien terkonfirmasi/positif di shelter	
								Pemulasaran jenazah terduga Covid dan jenazah Covid sesuai dengan protokol Covid oleh RS	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020		Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<)	Sesuai (=) Melampaui (>)			
									Pendirian Rumah Sakit Lapangan Khusus Covid,	
	Angka Kematian Ibu (AKI)	Per 100,000 KH	85	85	157,61	Belum Tercapai	Belum optimalnya pelaksanaan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu	Keberlangsungan pelaksanaan akreditasi Puskesmas belum optimal	Dukungan program kegiatan pemenuhan SPM	Dinkes
	Angka Kematian Bayi (AKB)	Per 1000 KH	8,0	8,0	6,93	Melampaui	Prosentase ALKES yang dikalibrasi di puskesmas masih rendah			
							Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi Masih di atas target	Pelatihan / update knowledge EKG untuk dokter (sudah dilaksanakan) baru 1 dokter per puskesmas	Dinkes	
								Pemeriksaan EKG untuk ibu hamil DIWAJIBKAN minimal 1 kali atau sesuai indikasi	Dinkes	
								Pendampingan puskesmas oleh SpOG sesuai regio puskesmas	Dinkes	
								Pengadaan USG untuk Puskesmas	Dinkes	
								Rujukan ibu hamil ke Puskesmas yang mempunyai USG (rujukan horizontal), pembiayaan direncanakan oleh Jamkesda sesuai Perda yang baru	Dinkes	
								Binwasdal praktik PMB oleh Dinkes dioptimalkan, gunakan SPO dan check list binwasdal yang telah disusun, SPO punishment nakes yang bermasalah	Dinkes	
								Pembinaan PMB dan nakes agar kejadian kematian ibu tidak berulang	Dinkes	
								Penyusunan SOP pemantauan bumil berisiko	Dinkes	
								Penyusunan SOP pendampingan rujukan (follow up)	Dinkes	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
								Kepastian pembiayaan bumil, koordinasi pembiayaan oleh Jampersal, Jamkesda, RS dan BPJS kesehatan	Dinkes
	Prevalensi Balita Gizi Buruk	%	0,4	0,4	0,31	Melampaui	Belum optimalnya pelayanan persalinan di puskesmas	Dukungan program kegiatan pemenuhan SPM	Dinkes
	Prevalensi penderita HIV	Angka	0,1	0,1	0,01	Melampaui	Belum optimalnya pelayanan Antenatal Care (ANC) di puskesmas	Dukungan program kegiatan pemenuhan SPM	Dinkes
							Banyak pasien HIV AIDS yang loss to follow up	Validasi data layanan LFU (Lost Follow Up) dan kerjasama dengan Pendukung Sebaya telah ditingkatkan dengan harapan pasien LFU dan alpa dapat ditekan untuk masa yang akan datang	Dinkes
	Angka Kesakitan/Insidence Rate (IR) DBD	Per 100,000 penduduk	120	120	129	Belum Tercapai	Belum optimalnya pemanfaatan DGS di puskesmas (Digital Government System – data pelayanan kesehatan terpusat)		Dinkes
							Peningkatan Tajam Kasus DBD	Kegiatan pengendalian bekerjasama dengan Yayasan Tahija dalam Eliminate Dengue Project (EDP), yaitu dengan melepas nyamuk Wolbachia	Dinkes
								Mengeluarkan surat edaran Kepala Dinas Kesehatan No tentang 443/497/2019 Kewaspadaan Dengue	Dinkes
								Peningkatan penyuluhan oleh petugas DBD	Dinkes
								Pemberdayaan kader-kader dusun, remaja dan siswa SD untuk PSN	Dinkes
								Melakukan dan koordinasi di tingkat kecamatan	Dinkes
								Melaksanakan foging sesuai Standar Prosedur yang telah ditetapkan	Dinkes
								Pelaksanaan pelayanan deteksi dini DB di puskesmas pada semua kasus demam yang sudah ≥ 2 hari, dengan cara pemeriksaan menggunakan antigen	Dinkes

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
								dengue	
								Promosi kesehatan tentang kewaspadaan DB melalui media elektronik	Dinkes
								Pembagian Larvasida di wilayah endemik pada saat PE	Dinkes
								KIE dan kerjasama Lintas program dan lintas sektor	Dinkes
								Meningkatkan pemberdayaan masyarakat melalui gertak PSN	Dinkes
	Net Death Rate (permil)	Per 1000 Pasien	16,6	16,6	21,17	Belum Tercapai	Belum optimalnya pelaksanaan sistem penanggulangan gawat darurat terpadu	RSUD menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang prima	RSUD
							Prosentase alkes yang dikalibrasi di RSUD masih rendah		
							Belum optimalnya ketersediaan alkes sesuai perkembangan kebutuhan,		
							Belum optimalnya pelayanan Antenatal Care (ANC) di puskesmas		
							Belum memadainya pelayanan 24 jam dokter spesialis		
							Belum optimalnya ketersediaan obat-obatan		
							Belum optimalnya pengendalian penerapan SOP RSUD		
							Kurang lancarnya Cash Flow Keuangan RSUD		
							Meningkatnya angka kematian/ Net Death Rate (NDR) di rumah sakit dari 16,98 permil menjadi 22,62 permil, Hal ini kemungkinan merupakan dampak diterapkannya rujukan berjenjang online oleh BPJS Kesehatan sehingga pasien peserta	Menerapkan program peningkatan mutu dan keselamatan pasien	RSUD
								Menjalin kemitraan dengan pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama	RSUD
								Melakukan koordinasi dengan BPJS Kesehatan dan stakeholder terkait untuk memperbaiki sistem rujukan pelayanan	RSUD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Jaminan Kesehatan Nasional yang dirujuk ke RSUD Panembahan Senopati sebagian besar merupakan pasien-pasien dalam kondisi parah dan perlu penanganan yang intensif (layanan spesialisik, sub spesialisik dan gawat darurat),	kesehatan online yang baru saja diterapkan	
								Meningkatkan kompetensi SDM dan memenuhi sarana dan prasarana rumah sakit	RSUD
							Semua Sumber Daya digunakan fokus untuk penanggulangan pandemi Covid-19, sehingga permasalahan kesehatan yang lain misal : kematian ibu, Demam Berdarah Dengue, Penyakit Tidak Menular berkurang dalam penanganannya	1, Tenaga kesehatan dan masyarakat mentaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19 2, Ketersediaan anggaran dan sumber daya lain setiap saat sesuai kebutuhan yang ada	
							Sumber Daya Manusia yang ada rentan terhadap penularan Covid-19 sehingga ketersediaan SDM bisa berkurang sewaktu-waktu (protokolnya apabila rapid test positif maka harus isolasi 14 hari, begitu juga untuk tenaga yang kontak dengan pasien konfirmasi Covid-19 tanpa APD standar	Dukungan program kegiatan penanganan Covid-19	RSUD
							Perencanaan anggaran menjadi sulit, karena : a, Kurang predictable (kasusnya sulit diprediksi) b, Ketersediaan barang terbatas c, Harga fluktuatif	Kerjasama seluruh stakeholder terutama non kesehatan dalam penanggulangan Covid-19 dan permasalahan kesehatan yang lain	
							Komunikasi berjejaring yang sulit baik tingkat propinsi maupun ke masyarakat, Hal ini salah satunya disebabkan adanya hoax Pedoman penanganan yang sangat dinamis (dalam 1 bulan 4 kali revisi)	Penentuan skala prioritas dalam penanganan masalah kesehatan secara umum	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang									
	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Infrastruktur	Klasifikasi	78	78	76,77	Belum Tercapai	Masih banyak sarpras infrastruktur yang rusak	Pembangunan dan rehab infrastruktur secara bertahap	Lintas PD
	Persentase Jalan Kabupaten dalam kondisi mantap	%	75,58	75,58	75,42	Belum Tercapai	Masih ada jalan di Kabupaten Bantul yang belum mantap,	Kegiatan Rehabilitasi, pemeliharaan, dan Peningkatan Jalan, Salah satunya adalah jalan Cinomati	DPUPKP
	Persentase Gedung Pemerintah Kondisi Baik	%	84	84	84	Sesuai	Masih ada Gedung Pemerintah di Kabupaten Bantul yang belum dalam kondisi Baik	Kegiatan Pemeliharaan dan Pembangunan Gedung Pemerintah	DPUPKP
	Persentase penanganan banjir	%	40,92	40,92	103,28	Belum Tercapai	Masih ada daerah rawan banjir luapan belum tertangani dengan baik,	Pemeliharaan dan pembangunan saluran drainase, bangunan penguat tebing sungai, dan penyusunan masterplane drainase Kabupaten Bantul	DPUPKP
	Persentase Kecukupan Air Irigasi	%	82,66	82,66	80,01	Belum Tercapai	Masih ada Daerah Irigasi kewenangan Kab, Bantul yang belum dilayani / tercukupi air dengan baik	Pemeliharaan dan pembangunan Saluran Irigasi, serta Pemanfaatan dan pengelolaan sumber air Irigasi dengan baik	DPUPKP
	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	%	75	75	75,01	Melampaui	Masih ada sekitar wilayah di Kabupaten Bantul belum sesuai pemanfaatannya	Sosialisasi dan upaya penertiban RTRW dan RDTR di Kabupaten Bantul	Dipertaru
	Jumlah dokumen tata ruang yang sudah diperdakan	Dokumen	4	4	2	Belum Tercapai	Belum selesainya perda hasil peninjauan ulang RTRW dan RDTRK	Percepatan penyusunan perda hasil review RTRW dan RDTR	Dipertaru
	Persentase cakupan pengendalian tata ruang	%	77	77	77	Sesuai	RTRW Kabupaten Bantul belum di review, RDTR Kawasan Perkotaan, Perdesaan, dan Pansela belum selesai	Review RTRW, dan RDTR segera diperdakan, termasuk LP2B dan Lahan Sawah Berkelanjutan	Dipertaru
							Belum optimalnya pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu	Optimalisasi dan pengembangan pola pembiayaan rumah sehat bagi masyarakat yang kurang mampu	
Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman									
	Persentase Kawasan kumuh perkotaan	%	100	100	92,49	Belum Tercapai	Banyak lokasi kumuh yang belum masuk kedalam SK Kumuh	Peninjauan ulang SK Kumuh Kabupaten Bantul, pembangunan dan penataan di	DPUPKP

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	yang tertangani							wilayah kumuh	
							Belum optimalnya pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu	Optimalisasi pelibatan peran serta kelompok masyarakat dan perusahaan dalam pembangunan rumah layak huni bagi warga yang kurang mampu	
							Belum optimalnya pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana,	Pengendalian pembangunan perumahan rakyat, khususnya tentang fasilitas umum dan rumah sederhana,	
							Belum optimalnya sinergi kebijakan rumah layak huni,	Optimalisasi dan koordinasi sinergi kebijakan rumah layak huni,	
							Permasalahan dalam perubahan nama calon penerima bantuan fasilitasi rumah layak huni jika terdapat calon penerima yang meninggal atau mengundurkan diri,	Peningkatan koordinasi dalam proses identifikasi dan verifikasi calon penerima bantuan	
							Pelaksanaan kegiatan yang menumpulkan massa seperti pelatihan, sosialisasi, FGD terkendala Covid-19,	Pembatasan peserta kegiatan dan penerapan protocol kesehatan	
Urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat									
	Angka Kriminalitas	Persen	0,065	0,065	0,097	Belum Tercapai	Meningkatnya aksi kejahatan yang disebabkan masalah ekonomi	Peningkatan koordinasi keamanan lingkungan	
	Persentase Penegakan Perda	%	69	69	70	Melampaui	Penegakan perda belum optimal	Ketegasan dalam penegakan perda	Satpol PP
							Masih belum optimalnya manajemen penugasan personil Satpol PP	Ada personil Satpol PP yang kompeten dalam peningkatan TRANTIBUM dan LINMAS	
							Belum optimalnya peran komunitas (atau paguyuban) yang terkait dengan Perda dan Perkada dalam		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							peningkatan kesadaran masyarakat terhadap substansi Perda dan Perkada		
	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3	%	100	100	100	Sesuai	Belum optimalnya kualitas penyelesaian K3	Koordinasi sinergis yang efektif dalam Pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum	Satpol PP
	Jumlah intoleransi di masyarakat	Kasus	0	0	0	Sesuai	Meningkatnya potensi konflik sosial di tengah masyarakat yang semakin terbuka terhadap informasi luar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan	Masyarakat peduli dan aktif membangun semangat kesatuan bangsa dan nasionalisme	Kesbangpol
							Masih rendahnya kesadaran pengurus organisasi sosial kemasyarakatan terhadap legalisasi peran kelembagaannya	LSM, Ormas dan OKP aktif meningkatkan legalisasi peran kelembagaannya	
							Belum optimalnya pelaksanaan TL rekomendasi Tim Kewaspadaan Dini	Para pihak terkait aktif dalam TL Rekomendasi TKD,	
							Belum semua Dusun memiliki Jagawarga	Masyarakat mengetahui potensi konflik dan dapat menyalurkannya secara bertanggung-jawab	
	Persentase pemilih yang berpartisipasi	%	70	70	81,64	Melampaui			Kesbangpol
	Desa Tangguh Bencana	Desa	45,33	45,33	46,66	Melampaui	Belum semua Desa Tangguh Bencana yang dibentuk, ditindaklanjuti dengan kegiatan pengembangan Desa Tangguh Bencana, Hal ini menyebabkan tingkat kesiapsiagaan terhadap bencana menurun	Peran serta Desa dalam Pembentukan Desa Tangguh Bencana dan pengembangannya Pemanfaatan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) dalam proses perencanaan Pelaksanaan Dokumen Rencana Kontijensi Tsunami, Rencana Kontijensi Gempa dan Rencana Kontijensi Banjir	BPBD
	Persentase kecepatan Reaksi Tanggap Darurat Bencana yang memenuhi respon time	%	100	100	100	Sesuai	WMK (wilayah manajemen bencana kebakaran) baru mencapai 353,35 km ² (69,71% dari luas kabupaten Bantul)	Dukungan 3 pos pemadam kebakaran di Kasihan, Banguntapan, Imogiri yang sudah operasional dan tambahan 3 pos di Piyungan Pundong Sedayu, namun belum	BPBD

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	15 menit							dapat operasional	
								Penguatan kelembagaan dan SDM Pemadam Kebakaran	
								Sapras pendukung Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	BPBD
	Persentase Relokasi Warga	%	81,82	81,82	76,36	Belum Tercapai	Masih terdapat masyarakat yang bertempat tinggal di kawasan rawan bencana	penyediaan dan status lahan tempat relokasi bencana	BPBD
	Persentase Sekolah Siaga Bencana	%	4,7	4,7	4,12	Belum Tercapai	Kesadaran bahwa sekolah berada pada kawasan bahaya bencana masih rendah, dari 511 sekolah baru 4,12% (21 sekolah Siaga Bencana)	Pembentukan sekolah siaga bencana secara mandiri	BPBD
							Belum Optimalnya pelayanan informasi rawan bencana	Meningkatkan dan mengaktifkan jaringan informasi dan komunikasi yang ada, baik secara verbal (komunikasi lewat radio, Whatshapp, aplikasi, dll) maupun non verbal (sosialisasi, simulasi, publikasi lewat media baliho atau slogan dll) sehingga informasi dapat sampai pada masyarakat	
								Meningkatkan publikasi informasi rawan bencana melalui media apapun diantaranya sosialisasi seperti sarasehan, media kesenian/budaya, olahraga, seminar, CFD, dll	
							Belum Optimalnya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatkan pelayanan di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan dengan meningkatkan pelatihan dan simulasi	
								Meningkatkan kerjasama dengan lembaga non pemerintah dalam proses pencegahan dan penanganan bencana di Kabupaten Bantul	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
								Mengoptimalkan fungsi EWS dan TES	
							Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana dengan cara pelatihan – pelatihan baik petugas, instansi terkait (Basarnas, TNI, Polri) maupun masyarakat	
							Belum Optimalnya Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	Meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan sering dilakukannya pelatihan penanganan penyelamatan dan evakuasi khususnya korban kebakaran	
							Kepedulian terhadap pencegahan kebakaran belum menjadi prioritas	Memperiapkan Naskah Akademis dan mendorong DPR RI mensahkan UU Keselamatan Terhadap Bahaya Kebakaran	
							Sistem Proteksi Kebakaran di seluruh lingkungan (hutan, lahan, dll) maupun karya Konstruksi di Indonesia belum optimal	Pemerintah perlu terjun langsung ke seluruh lingkungan Pemda utk cek, evaluasi dan mengambil sikap tegas dalam rangka memastikan seluruh lingkungan lebih "perduli" mengantisipasi bahaya kebakaran	
							Institusi Pemadam Kebakaran Indonesia belum mendapat perhatian yang maksimal,	Pendidikan, kompetensi dan kesejahteraan tim/petugas Pemadam kebakaran harus prioritas diperhatikan dan ditindaklanjuti secara benar dan tepat	
							Persyaratan Keselamatan Kebakaran belum diaplikasikan seluruh masyarakat secara prioritas dan mutlak	Dimulai dari DESAIN, IMB, sampai dengan PERSYARATAN OPERASIONAL, bahaya kebakaran harus diantisipasi secara profesional, detail, terstruktur dan berkelanjutan	
	Urusan Sosial								
	Persentase Penyandang Masalah	%	12,75	12,75	7,29	Melampaui	Belum optimalnya integrasi sistem pendataan PMKS untuk penetapan	PMKS aktif meningkatkan status kesejahteraan diri dan keluarganya,	Dinsos P3A

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Kesejahteraan Sosial						target group untuk diintervensi dan sebagai dasar penilaian keberhasilan intervensi kebijakan,		
							Belum optimalnya pencapaian target SPM Bidang Sosial Kabupaten	Masyarakat tidak tergantung pada bantuan pemerintah tapi selalu berusaha untuk mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan diri dan keluarganya,	
							Belum optimalnya validitas pendataan PMKS di tingkat Operator data TKPK, TKSK, serta PKH	Pemerintah DIY aktif mensinergikan, mengkoordinasikan, dan mengawasi kebijakan penanganan PMKS,	
							Belum optimalnya sinergi, koordinasi dan pengawasan kebijakan penanganan PMKS di tingkat Kabupaten Bantul dan dengan Pemerintah DIY,		
							Belum sinerginya kesiap-siagaan kedaruratan kebencanaan dan penanganan korban bencana		
							Belum optimalnya pemanfaatan Potensi Kesos	Semua pihak aktif dalam memberdayakan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial)	Dinsos P3A
							Belum optimalnya pelayanan pemberdayaan oleh TKSK dan Peksos		
							Masih rendahnya kemampuan TKSK dalam fasilitasi kebijakan pembangunan sosial yang inovatif,		
							Rujukan dan pengambilan pasien atau klien baik ke RSJ maupun ke panti tidak bisa diprediksi, begitu juga dengan pemakaman jenazah terlantar karena berupa layanan kepada masyarakat sesuai dengan kejadian/kasus di lapangan,	Dalam upaya pemecahan permasalahan tersebut, Pelaksana teknis Kegiatan berkoordinasi dengan Tenaga Kerja Sosial Kecamatan (TKSK) dengan	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
								Memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih peduli terhadap keberadaan PMKS di wilayahnya	
							Terkait adanya refocusing anggaran untuk dialokasikan pada penanganan Covid-19 berdampak pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial,	Memberlakukan koordinasi lintas sektor serta bekerjasama dengan Dinas Sosial Daerah istimewa yogyakarta serta Satuan Bakti Pekerja Sosial	
							Kegiatan dalam updating data yaitu kinerja dalam pendataan data terhambat karena tidak bias mengadakan jumpa langsung dengan warga yang akan didata karena harus menghindari tatap muka dengan warga pencari informasi tentang jaminan kesehatan, DTKS maupun informasi lain yang terkait dengan data, Juga kegiatan untuk mengumpulkan operator SIKS dan fasilitator dari desa jadi terhambat karena pembatasan kita untuk mengumpulkan orang cдеми menghindari penyebaran Covid-19,	Untuk mengatasi masalah tersebut ,maka kami mengoptimalkan penggunaan HP dengan melayani lewat online atau Aplikasi Whatsapps supaya pelayanan bias maksimal dan tetap bisa mengatasi permasalahan yang ada,	
Layanan Urusan Wajib Non Dasar									
Urusan Tenaga Kerja									
	Angka Pengangguran	%	2,9	2,9	4,06	Belum Tercapai	Kualitas tenaga kerja tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja	Adanya keterpaduan kebijakan penciptaan kesempatan kerja	Disnakertrapns
							Ketersediaan lapangan kerja yang masih sedikit,		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Masih rendahnya produktivitas usaha kecil sehingga penyerapan angkatan kerja masih rendah		
							Pelayanan penempatan tenaga kerja belum optimal		
							Informasi pasar kerja yang belum optimal		
							Penumbuhan dan pengembangan pekerja mandiri belum optimal		
							Belum optimal data dan informasi angkatan kerja		
							Belum optimalnya pembinaan peran LPTKIS dalam peningkatan penempatan angkatan kerja		
							Pemberi kerja belum sesuai dalam penerapan ketentuan peraturan ketenagakerjaan	Para pihak disiplin menerapkan aturan ketenagakerjaan	Disnakertrans
							Tenaga kerja mengabaikan aturan ketenagakerjaan yang berlaku		
							Kesempatan kerja yang masih terbatas,	Intensifikasi pencarian lowongan pekerjaan melalui job canvassing dan informasi pasar kerja melalui bursa kerja on-line lebih ditingkatkan,	
							Kualitas tenaga kerja tidak memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja,	Melaksanakan jenis pelatihan yang dibutuhkan pasar kerja	
							Produktivitas tenaga kerja masih sangat rendah,	Peningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan mengadakan pelatihan tingkat lanjut,	
								Memperbanyak dan mengintensifkan pelatihan kewirausahaan,	
							Inkonsistensi antar peraturan/perundangan terkait ketenagakerjaan	Intensifkan konsultasi ke K/L baik di tingkat pusat maupun daerah,	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
	Rasio kekerasan Perempuan dan Anak	Rasio	0,38	0,38	0,73	Belum Tercapai	Masyarakat masih menganggap masalah rumah tangga adalah masalah interen yang tabu untuk diperbincangkan serta pengaruh lingkungan yang belum kondusif dalam perlindungan perempuan dan anak	Tiap rumah tangga memahami hak dan kewajiban masing-masing anggota keluarga dan mampu menyelesaikan permasalahan rumah tangga secara konstruktif dan mandiri	Dinsos P3A
							Belum efektifnya peran satgas perlindungan (tomas dan toga) dalam peningkatan kapasitas rumah tangga dalam penyelesaian kasus rumah tangga,		
							Masih belum optimalnya kerjasama para pihak terkait dalam pengurangan kekerasan dalam rumah tangga,		
							Masih belum optimalnya pemenuhan hak-hak perempuan,	Masyarakat menerapkan prinsip kesetaraan dan keadilan gender di dalam lingkungan keluarganya,	
							Belum optimalnya penerapan penganggaran responsif gender,		
							Belum optimalnya peran PUG		
							Belum optimal peran PUSPA (Partisipasi Publik Kesejahteraan Sosial Perempuan dan Anak),		
							Belum optimalnya peran tomas dan toga dalam pelebagaan prinsip kesetaraan dan keadilan gender di lingkungan,		
							Masih belum tepatnya pola pengasuhan anak,	Tomas dan Toga berperan aktif dalam peningkatan kualitas pola pengasuhan anak	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
								Pihak swasta aktif meningkatkan fasilitas umum yang berorientasi pada perlindungan hak anak	
							Belum optimalnya ketersediaan sarpras perlindungan hak anak,		
							Belum adanya APSAI (Asosiasi Perusahaan Sayang Anak Indonesia)		
							Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak masih tinggi,	mewujudkan lingkungan yang ramah , aman dan layak untuk Perempuan dan anak,	
								mensosialisasikannya di tingkat Kecamatan dan Desa se Kabupaten Bantul,	
							Masih rendah tingkat kesadaran melapor dan mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	Meningkatkan kesadaran (awareness) masyarakat terhadap lingkungan sekitarnya terkait adanya kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak	
							Masa pandemi Covid-19 anggaran difokuskan sehingga beberapa kegiatan tidak maksimal dan tidak sesuai perencanaan dalam penyelenggaraannya,	memaksimalkan anggaran yang tersisa untuk memadatkan materi yang disampaikan dengan sumber daya yang ada,	
Urusan Pangan									
	Ketersediaan energi	kkal/kapita/hari	3,095	3,095	3,092	Belum Tercapai	Ketersediaan energi protein belum diiringi dengan konsumsi energi protein	Jaminan ketersediaan pangan yang berasal dari produksi/panen dan pengelolaan cadangan pangan	Diperpautkan
	Ketersediaan protein	kkal/kapita/hari	72,8	72,8	82,90	Melampaui			
	Skor Pola Pangan Harapan	Angka	93,60	93,60	91,4	Belum Tercapai	Konsumsi pangan didominasi padi-padian, pangan hewani dan sayur/buah, Konsumsi pangan lokal berupa umbi2an masih rendah	keaktifan KWT dalam pemanfaatan lahan pekarangan untuk budidaya pangan lokal dan melakukan diversifikasi/penganeka ragam pangan lokal	Diperpautkan
	Peningkatan Kemampuan Kelembagaan Kelas	Kelompok	35	-	-	-	Belum optimalnya peran penyuluh swadaya atau mandiri	Keaktifan PPL dalam melakukan bimbingan kepada kelompok tani (834 kelompok teregister)	Diperpautkan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Kelompok Tani						Rendahnya kaderisasi di Gapoktan/ kelompok tani	Kelompok menjadi tempat pembelajaran bagi anggota untuk meningkatkan produktivitas pertaniannya	
							Masih terbatasnya informasi harga dan pasokan pangan yang sangat dibutuhkan untuk pengendalian stabilitas harga dan pasokan pangan guna menunjang distribusi dan akses pangan masyarakat yang terjangkau dan terjangkau,	Pemantauan Distribusi Harga dan Pasokan Pangan yang rutin dan informatif	
							Belum optimalnya pengelolaan distribusi pangan oleh masyarakat guna mewujudkan distribusi pangan yang merata dan terjangkau	Pengembangan dan Pemberdayaan Distribusi Pangan Masyarakat	
							Belum optimalnya cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	Pemberdayaan dan pengembangan lumbung pangan masyarakat	
							Belum semua pekarangan dimanfaatkan secara baik	Peningkatan pemanfaatan pekarangan untuk mendukung pola konsumsi B2SA	
							Masih adanya Desa Rentan Pangan dari hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)	Perlunya dukungan program/kegiatan dari beberapa OPD untuk intervensi menangani desa rawan pangan	
Urusan Pertanahan									
	Cakupan Sertifikasi Tanah	%	96	96	100	Melampaui	Kesulitan dalam pendataan dan pengukuran tanah	optimalisasi pendataan tanah, menjalin kerjasama dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Bantul	Dipertaru
							Beberapa Tanah Kasultanan sudah dikuasai masyarakat/ organisasi berpuluh-puluh tahun hingga turun temurun dan muncul Letter C	Ada Kebijakan dan langkah-langkah dari Panitikismo terkait kondisi tersebut,	
							Permohonan Pemanfaatan Tanah belum keseluruhan sesuai dengan Peraturan yang ada (Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2017	Sosialisasi aturan terkait pemanfaatan tanah kepada masyarakat	
								Mengintensifkan pengendalian	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							dan Peraturan Gubernur Nomer 34 Tahun 2017)	pemanfaatan tanah dengan melibatkan pihak Desa dan Stakeholder terkait	
							Penyusunan Peraturan Desa tentang Pemanfaatan Tanah Desa di 75 Desa di Kabupaten Bantul belum semua selesai menjadi produk Peraturan Desa sehingga mengakibatkan terkendalanya permohonan pemanfaatan tanah dikarenakan Perdes merupakan salah satu diantara Dokumen yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan pemanfaatan tanah	Fasilitasi dan pendampingan terkait dengan penyelesaian penyusunan Draf Raperdes sampai menjadi Produk Perdes	
							Belum semua desa menyampaikan data inventarisasi permasalahan pertanahan	Tindakan proaktif dari DPTR Bantul dalam mengumpulkan data inventarisasi permasalahan pertanahan	
							Ada desa yang tidak memiliki data pertanahan seperti buku legger yang hilang	Pendampingan desa agar segera memulai kembali pembuatan legger bukan sebagai pengganti legger yang hilang, tetapi sebagai dokumen pertanahan desa untuk melanjutkan legger yang hilang, yang bisa digunakan nantinya apabila terjadi tukar menukar sehingga warga dapat mensertifikatkan tanah yang menjadi haknya,	
							Tidak tercapainya pendaftaran 105 bidang tanah kasultanan dan 200 pendaftaran peta bidang tanah desa	Koordinasi yang baik antara Dinas/Instansi terkait sehingga permasalahan anggaran tidak menjadi kendala capaian target kegiatan,	
Urusan Lingkungan Hidup									
50	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Angka	63	63	63,02	Melampaui	Pencapaian IKA yang rendah	Capaian IKA, IKU dan Indeks Tutupan Lahan Pemahaman masyarakat tentang regulasi	DLH

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
								LH dan penerapannya	
	Indeks Kualitas Air (IKA)	Angka	50	50	51,8	Melampaui	Tingginya pencemaran air sungai oleh limbah rumah tangga, industri, dan sampah	Kualitas air pada 5 sungai : Winongo, Oyo, Bedog, Code dan Gajahwong Masyarakat peduli dan aktif dalam menjaga kualitas lingkungan hidup sekitarnya	DLH
	Indeks Kualitas Udara (IKUd)	Angka	80	80	85,18	Melampaui	transportasi sebagai penyumbang polusi udara terbesar	Penanaman tanaman penghijauan	DLH
	Indeks Tutupan Lahan	Angka	52,93	52,93	54,82	Melampaui	Terbatasnya lahan ruang terbuka hijau perkotaan (capaian : 14,34%, UU : 20%)	Penanaman tanaman penghijauan	DLH
	Volume sampah yang tertangani	ribu m3	460	460	460,032	Melampaui	Masih belum optimalnya pengelolaan sampah mandiri,	Kesadaran masyarakat yang masih rendah dalam pengelolaan sampah dengan prinsip 3R	DLH
							Tingkat pencemaran yang masih relatif tinggi khususnya pada air sungai di Kabupaten Bantul	Menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Yogyakarta dan Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Sekber Kartamantul dalam upaya peningkatan kualitas air sungai	
								Pendampingan, sosialisasi, promosi dan penguatan kelembagaan forum/komunitas peduli sungai	
								Pembinaan terhadap penaatan ijin usaha pengelolaan limbah yang dihasilkan oleh industri/pelaku usaha	
							Kecenderungan alih fungsi lahan yang masih relatif tinggi sehingga berpotensi menurunkan luas tutupan lahan	Penambahan luasan hutan kota, taman kota dan hutan rakyat	
							Kurangnya kesadaran masyarakat tentang perilaku hidup bersih dan sehat (membuang sampah di sembarang tempat bahkan di sungai)	Merubah mindset cara pandang masyarakat terhadap sampah (penyadaran masyarakat akan tanggung jawabnya untuk mengelola setiap sampah yang dihasilkan) Meningkatkan dan menguatkan	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
								kelembagaan kelompok pengelola sampah di tiap desa Peningkatan peran BUMDes dalam unit usaha penanganan sampah Penguatan sinergitas antar pemangku wilayah dalam pengelolaan lingkungan hidup	
Urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil									
	Rata-rata Cakupan Kepemilikan Dokumen Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	%	91	91	99,63	Melampaui	Kesadaran Masyarakat yang rendah untuk mengubah data base dan peristiwa penting kependudukan Penyediaan alat cetak KTP-el belum menyeluruh disemua kecamatan	Adanya berbagai inovasi layanan antara lain Moro Lego, Pelayanan Adminduk Jemput Bola, Kerjasama dengan RS, Bidan, dan Puskesmas	Disdukcapil
							Masih banyak data yang dilaporkan masyarakat yang tidak valid sehingga rentan terhadap permasalahan hukum	Terselenggaranya layanan ADMINDUK berbasis digital,	Disdukcapil
							Belum terpenuhinya kebutuhan masyarakat akan dokumen KTP- El karena lambatnya pengadaan blangko		
							Cakupan kepemilikan KIA anak usia 0 - 16 tahun belum tercapai	Kerjasama dengan dinas pendidikan untuk melakukan kerjasama mendata anak yang belum memiliki KIA Memberikan sosialisasi kepada guru dan orang tua	Disdukcapil Disdukcapil
							Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 - 18 tahun belum optimal	Melakukan kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas untuk melakukan kegiatan jemput bola akta kelahiran Membangun pola pikir masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran melalui sosialisasi	Disdukcapil Disdukcapil
							Kesadaran masyarakat untuk segera	Menerbitkan KTP baru (ktp dengan status	Disdukcapil

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							merubah status perkawinan akibat dari peristiwa penting (pernikahan) yang dialami masih rendah yang mengakibatkan data kependudukan yang disajikan tidak valid dan akurat	baru) bagi penduduk bantul yang melangsungkan pernikahan tersebut, Sebagai instansi pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat yaitu seluruh KUA di Kabupaten bantul	
							Kesadaran masyarakat untuk segera mengurus akta kematian masih rendah, masyarakat hanya mengurus akta kematian jika akan dibutuhkan	Sosialisasi dan menciptakan inovasi Akasi Simpati (Pembuatan akta kematian sehari jadi)	Disdukcapil
	Persentase Instansi yang Memanfaatkan Data Penduduk Disdukcapil	%	90	90	78,05	Belum Tercapai	Belum semua PD terkoneksi dengan DISDUK CAPIL,	Semua PD melakukan kerjasama pemanfaatan data DISDUK CAPIL,	Disdukcapil
							Belum optimalnya penerapan Kebijakan SATU DATA Kependudukan,	Komitmen Pemerintah Daerah untuk menerapkan Kebijakan SATU DATA Kependudukan,	Disdukcapil
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80,35	80,35	90,01	Melampaui	Pemuthakiran data kependudukan belum optimal	Menciptakan inovasi smart on , untuk Proses input perubahan data menggunakan IT (HP)	Disdukcapil
							Cakupan kepemilikan KIA anak usia 0 - 16 tahun belum tercapai	Kerjasama dengan sekolah-sekolah untuk penerbitan KIA secara kolektif	
								Distribusi KIA yang bekerjasama dengan PT, POS	
							Cakupan kepemilikan Akta Kelahiran anak usia 0 - 18 tahun belum optimal	Melakukan kerjasama dengan rumah sakit dan puskesmas untuk melakukan kegiatan jemput bola akta kelahiran	
								Membangun pola pikir masyarakat akan pentingnya kepemilikan akta kelahiran melalui sosialisasi	
								Melakukan kerjasama dengan praktik bidan se Kabupaten Bantul	
							Pemutahiran data kependudukan belum optimal	Mengoptimalkan penggunaan layanan online dengan aplikasi Dukcapil Smart	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Kesadaran masyarakat untuk segera merubah status perkawinan akibat dari peristiwa penting (pernikahan) yang dialami masih rendah yang mengakibatkan data kependudukan yang disajikan tidak valid dan akurat	Menerbitkan KTP baru (ktp dengan status baru) bagi penduduk bantul yang melangsungkan pernikahan tersebut, Sebagai instansi pelaksana yang berhadapan langsung dengan masyarakat yaitu seluruh KUA di Kabupaten bantul	
							Kesadaran masyarakat untuk segera mengurus akta kematian masih rendah, masyarakat hanya mengurus akta kematian jika akan dibutuhkan	Sosialisasi dan menciptakan inovasi Aksi Simpati (Pembuatan akta kematian sehari jadi)	
Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
	Indeks Desa Membangun	Jumlah Desa Mandiri	22	22	36	Melampaui	Masih rendahnya kompetensi aparatur desa	Pemerintahan Desa mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pencapaian targetnya	DPPKBPM
							Belum optimalnya integrasi perencanaan pembangunan dengan prinsip Desa Membangun		
							Belum optimalnya peran LPMD dalam pengembangan desa		DPPKBPM
							Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan bantuan dana bergulir yang ada di masyarakat		DPPKBPM
							Masih rendahnya kualitas perencanaan Pembangunan Desa dan Pencapaian Targetnya		DPPKBPM
							Belum optimalnya potensi dan permasalahan di desa menjadi dasar perencanaan pembangunan desa		DPPKBPM
							Belum optimalnya sinergi pengembangan BUMDes	BUMDes berkembang sebagai salah satu motor dalam Desa Membangun	DPPKBPM
							Masih rendahnya kemampuan SDM		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							pengelola BUMDes		
Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana									
	Persentase kategori keluarga kurang sejahtera	%	-	-	-	-	Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang KKBPK	Masyarakat aktif dalam Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK)	DPPKBPM
							Angka unmet need masih cukup tinggi 8,42%		
							Masih adanya pernikahan di bawah umur (di bawah 20 tahun)	Tercapainya PA (peserta KB Aktif) dan PB (Peserta KB Baru)	
							Belum optimalnya Program Ketahanan Keluarga sehingga pemanfaatan modal Pinjaman dana Bergulir dalam kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)		
	Rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga (jiwa)	Jiwa	-	-	-	-			DPPKBPM
	Total Fertility Rate (TFR)	%	1,83	1,83	1,67	Belum Tercapai	TFR belum mencapai kondisi ideal		DPPKBPM
							Angka unmetneed masih cukup tinggi 11,54%	Peningkatan kuantitas maupun kualitas KIE baik individu maupun masa, pemantapan kemitraan dengan pemangku kepentingan	
								penghargaan/reward bagi peserta KB baru terutama KB Kontrasepsi Mantap (kontap)	
							Data keluarga masih belum optimal	Optimalisasi dan verifikasi data keluarga	
							Belum optimalnya akses air bersih di masyarakat pedesaan terutama pada musim kemarau	Peningkatan pemeliharaan jaringan	
								Penguatan Kelembagaan (PAB)	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Belum optimalnya perencanaan pembangunan desa	Bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Desa dalam hal perencanaan pembangunan desa	
							Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi di desa	Memberikan dukungan sarana dan prasarana yang memadai Intensifikasi pelatihan	
							Belum optimalnya pengembangan ekonomi desa	Intensifikasi pembentukan bumdes	
								Pelatihan peningkatan kapasitas pengelola Bumdes	
								Pelatihan keterampilan Usaha Ekonomi Masyarakat Desa (KUEMD)	
								Optimalisasi pengelola pasar desa	
Urusan Perhubungan									
	Persentase penurunan kecelakaan lalu lintas	%	1,83	1,83	1,83	Sesuai	Masih Tingginya Angka Kecelakaan Lalulintas di Kabupaten Bantul dikarenakan kesadaran masyarakat dalam berlalulintas masih rendah serta masih perlunya penambahan jumlah rambu dan perangkat / piranti keselamatan lalulintas di Kabupaten Bantul	sosialisasi dan penegakan aturan berlalulintas dengan baik, pemasangan rambu dan piranti keselamatan lalulintas secara maksimal (rambu, penerangan jalan, CCTV,	Dishub
							Penurunan kualitas sarana angkutan umum dengan indikasi bawah jumlah angkutan umum yang beroperasi menurun dari tahun 2017 sebanyak 157 unit pada tahun 2020 sebanyak 128 unit, sedangkan jumlah penumpang angkutan umum pada tahun 2020 sebanyak 322,593 orang/tahun meskipun mengalami penurunan dari Tahun 2019 sebanyak 553,480 orang/tahun,	1, Sosialisasi terhadap awak angkutan umum dan masyarakat,	
								2, Rehabilitasi sarana dan meningkatkan kualitas pelayanan angkutan umum terutama pada penyediaan prasarana halte dan terminal tipe C yang layak,	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Peningkatan kepadatan lalu lintas pada ruas-ruas jalan tertentu	(1) Melakukan koordinasi dengan dinas terkait (Polres, PU) dalam upaya penanganan peningkatan arus yang terjadi pada event tertentu dengan rekayasa manajemen lalu lintas, (2) Melakukan pemajajanan prasarana guna melaksanakan manajemen rekayasa lalu lintas berupa traffic cone, road barrier, rambu portable dan tali pembatas	
							Masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk tertib berlalulintas	1, Melaksanakan pengawasan dan pengendalian parkir 2, Melaksanakan pam insidental dalam rangka pengamanan lalulintas pada event tertentu, 3, Melaksanakan sosialisasi/penyuluhan kepada masyarakat melalui berbagai media, Kelompok masyarakat yang akan disosialisasi adalah pelajar dan masyarakat umum,	
							Belum optimalnya prasarana keselamatan lalu lintas	Pengadaan dan pemasangan fasilitas keselamatan lalu lintas (rambu, marka, APILL, guardrail, flashing lamp dll) serta fasilitas pendukung keselamatan berupa LPJU di mana jumlah prasarana ideal yang harus dipasang di Kabupaten Bantul meliputi :	
							Kualitas pelayanan angkutan umum kurang memenuhi standar pelayanan, Keriteria yang digunakan adalah usia kendaraan dan kendaraan laik jalan,	Melaksanakan sosialisasi aturan yang berlaku terkait standar pelayanan angkutan umum kepada penyelenggara angkutan umum, Dinas Perhubungan tidak akan mengeluarkan kartu pengawasan untuk kendaraan yang tidak sesuai dengan pelayanan standar minimal armada angkutan ketika armada tersebut tidak layak beroperasi, Penilaian yang	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
								digunakan adalah adanya dokumen KIR layak uji yang masih berlaku dari Dinas Pehubungan yang menyatakan bahwa kendaraan laik jalan dan usia kendaraan,	
Urusan Komunikasi dan Informatika									
	Persentase SKPD yang menerapkan Layanan Unggulan Digital Government Services (DGS)	%	85	85	86,27	Melampaui	Belum optimalnya tingkat kematangan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Jangkauan ketersediaan infrastruktur TIK	Diskominfo
							Belum optimalnya pengelolaan infrastruktur TIK	Pengembangan dan pengendalian infrastruktur jaringan umum	
							Belum optimalnya ketersediaan infrastruktur TIK milik pemerintah dan milik umum	Standar keamanan informasi berdasar penilaian ISO 270001	
							Belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi		
							Terbatasnya infrastruktur TIK dan Belum meratanya sistem jaringan komunikasi di Kabupaten Bantul	Membangun jalur utama jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Bantul dengan teknologi Fiber Optic yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai sarana implementasi SPBE	Diskominfo
							Belum adanya regulasi pengembangan e-government dan master Plan IT, juga	Menyusun masterplan TIK sebagai dasar pelaksanaan pembangunan TIK di Kabupaten Bantul	Diskominfo

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Indeks kualitas layanan informasi publik	Angka	83	83	100,04	Melampaui	Kurang optimalnya penyerapan informasi dari masyarakat	<p>Efektifitas pemanfaatan saluran informasi dan komunikasi,</p> <p>Penyebaran informasi menggunakan antara lain televisi, radio, surat kabar, website, medsos, majalah SEJADA dan Bantul Ekspo, selanjutnya pada tahun 2019 dilakukan survey Indeks Kualitas Layanan Informasi bekerjasama dengan pihak ke-III,</p> <p>Hasil survey menunjukkan pemanfaatan saluran informasi melalui :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 45% melalui media televisi - 43% melalui media sosial - 6% melalui media surat kabar dan - 6% melalui media radio 	Diskominfo

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
								<p>Informasi diusahakan dapat terdistribusi secara optimal dengan cara memilih media yang paling disukai dan paling sering digunakan masyarakat,</p> <p>Berdasarkan hasil Survey Indeks Kualitas Layanan Informasi tahun 2019, besaran frekuensi pemanfaatan media komunikasi berbasis IT yang paling diminati adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Whatsapp 55% - Facebook 15% - Instagram 15% - Youtube 9% - Twitter 4% - WeChat 1% - Google+ 1% 	
							Masih terbatasnya sumberdaya komunikasi dan informatika	Optimalisasi lembaga pengelola diseminasi informasi publik	
							Belum dapat menyajikan semua data/informasi yang seharusnya disajikan untuk masyarakat,	Meningkatkan peran PPID badan publik dalam diseminasi informasi publik,	Diskominfo
							Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap haknya dalam mengakses	Melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan	Diskominfo

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							dan memperoleh informasi publik,	pemerintahan,	
							tata kelola data yang belum baik, Sistem informasi dan data base belum saling terintegrasi	Implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia sebagai dasar tata kelola data di Kabupaten Bantul,	Diskominfo
							Terbatasnya infrastruktur TIK dan Belum meratanya sistem jaringan komunikasi di Kabupaten Bantul, terutama untuk menjangkau sekolah,	Membangun jalur utama jaringan internet dan intranet Pemerintah Kabupaten Bantul dengan teknologi Fiber Optic Sampai Desa yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Bantul sebagai sarana implementasi SPBE	
							Belum adanya regulasi pengembangan e-government dan master Plan IT,	Menyusun masterplan TIK sebagai dasar pelaksanaan pembangunan TIK di Kabupaten Bantul	
							3, Belum optimalnya penyajian data/informasi yang seharusnya disajikan untuk masyarakat,	3, Meningkatkan peran PPID badan publik dalam diseminasi informasi publik,	
							Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap haknya dalam mengakses dan memperoleh informasi publik,	Melibatkan masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan,	
							Tata kelola data yang belum optimal, Sistem informasi dan data base belum saling terintegrasi	Implementasi Perpres Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Satu Data Indonesia sebagai dasar tata kelola data di Kabupaten Bantul,	
Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah									
	Cakupan Jumlah KUKM yang Naik Kelas	Unit	180	180	185	Melampaui	Perkembangan UKM masih bersifat sektoral	Penumbuh-kembangan ekosistem UKM melalui incubator bisnis berbasis cluster	DKUKMP
	Jumlah Usaha Mikro yang Naik Kelas	Unit	180	180	185	Melampaui	Rendahnya aksesibilitas UKM pada teknologi dan permodalan usaha	Pembentukan konsosium Usaha Mikro berbasis Koperasi Produksi	DKUKMP
	Peningkatan tingkat Kesehatan Koperasi	Unit	10	10	8	Belum Tercapai	Proporsi koperasi sehat sangat rendah (3,5%) karena fluktuasi profesionalisme dan akuntabilitas pengelolaan koperasi	Peningkatan mutu manajemen koperasi melalui pengembangan kapasitas pengelola koperasi	DKUKMP

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Masih rendahnya kualitas SDM Koperasi yang kompeten dan bersertifikat	Fasilitasi Pelatihan kompetensi Mendorong pendidikan koperasi bagi anggota	
							Minimnya Pengawas Syariah bersertifikat OSN-MUI	Fasilitasi Pelatihan dan Sertifikasi bagi Pengawas Syariah	
							Masih rendahnya kepemilikan izin usaha dan izin operasional koperasi di OSS	Pendampingan bagi koperasi dalam mengurus izin di OSS,	
							Belum optimalnya pemasaran produk usaha mikro	Melakukan inovasi dan penggunaan teknologi yang dapat menunjang perbaikan mutu dan daya saing produk	
						Beralih ke pemasaran secara digital dan melakukan promosi melalui media sosial			
						Mengikuti pameran untuk mengembangkan jaringan usaha			
						Memberikan informasi kepada UMKM tatacara pengurusan ijin usaha			
							Kurangnya modal usaha dan akses modal pelaku usaha mikro	Diarahkan untuk mengakses permodalan melalui KUR Mikro	
Urusan Penanaman Modal									
	Pertumbuhan Investasi	%	9,25	9,25	3,74	Belum Tercapai	Masih rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul	Ada sinergi untuk realisasi potensi Daerah oleh Investor dari Daerah dengan teknologi yang sesuai dengan situasi dan kondisi di Daerah untuk pemenuhan kebutuhan Daerah dan ekspor dari Daerah,	DPMPT
							Belum optimalnya penerapan aplikasi Perizinan Berusaha Terpadu secara Elektronik (Online Single Submission = OSS)	Ada informasi potensi daerah yang akurat dan mudah diakses yang memudahkan investor untuk pengambilan keputusan penanaman modalnya,	
							Belum optimalnya pemasaran potensi unggulan daerah,		
							Belum optimalnya peran kelompok-kelompok masyarakat dan koperasi		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							yang ada di daerah sebagai investor di sektor unggulan daerah		
							Belum optimalnya sinergi peningkatan realisasi penanaman modal		
							Masih belum optimalnya penyerapan tenaga kerja pada proyek penanaman modal yang disetujui		
							Belum akuratnya isi data / informasi permohonan	Data / informasi permohonan harus akurat dan valid,	DPMPT
							Belum optimalnya Sistem Perizinan Online Daerah		
							Belum optimalnya penerapan SOP Kajian Teknis Permohonan Perizinan dan Non Perizinan		
							Adanya perubahan regulasi yang membuat harus adanya penyesuaian di Daerah sementara pelayanan harus jalan,		
							Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul dibandingkan daerah lainnya di DIY	Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui sinkronisasi regulasi pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan pelayanan perijinan di daerah	DPMPT
						Meningkatkan promosi penanaman modal untuk menarik minat investor/ pelaku usaha agar berinvestasi di Kabupaten Bantul		DPMPT	
							Rendahnya realisasi investasi di Kabupaten Bantul dibandingkan daerah lainnya di DIY	Menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui sinkronisasi regulasi pelaksanaan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan pelayanan perijinan di daerah	
						Meningkatkan promosi penanaman modal			

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
								untuk menarik minat investor / pelaku usaha agar berinvestasi di Kabupaten Bantul	
Urusan Kepemudaan dan Olahraga									
	Jumlah Pemuda Pelopor	Orang	4	4	4	Sesuai	Belum adanya regulasi bidang kepemudaan untuk memperjelas arah pembangunan urusan kepemudaan	Pemuda peduli dan aktif meningkatkan perannya dalam proses pembangunan daerah	Dikpora
								Pemuda peduli dan aktif dalam peningkatan kesejahteraannya,	
							Belum optimalnya fasilitasi dan apresiasi atlet siswa berprestasi, sehingga banyak atlet siswa berprestasi pindah daerah untuk mendapat apresiasi yang lebih dari daerah lain,	Adanya fasilitas dan apresiasi untuk mendorong munculnya atlet berprestasi secara berkelanjutan,	
							Belum adanya regulasi yang mengatur tentang Keolahragaa di Kabupaten Bantul,		
							Belum optimalnya ketersediaan sarpras olah raga		
							Sulitnya menemukan pemuda yang memenuhi kriteria sebagai pemuda pelopor pembangunan, yang memiliki kiprah atau pengaruh kepada masyarakat	Melakukan kerjasama dengan forum pemuda pelopor untuk menemukan calon pemuda pelopor, dan mendampingi mereka agar dapat lolos dan sukses dalam seleksi tingkat nasional,	Dikpora
							Belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang kepemudaan dan olahraga	Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai proses penyusunan regulasi kepemudaan dan olahraga,	Dikpora
							Pelajar berprestasi olahraga Kabupaten Bantul sering kali memilih melanjutkan sekolah ke daerah lain, karena Kabupaten	Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penerimaan siswa baru dari atlet berprestasi dan pemberian beasiswa bagi mereka,	Dikpora

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Bantul belum mampu memberikan fasilitas yang lebih baik kepada atlet berprestasi,		
							Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul masih sangat kurang, terutama belum memiliki Gedung Olahraga dan kolam renang standar nasional,	Diusulkan pembangunan Gedung Olahraga dan kolam renang yang memiliki standar nasional,	Dikpora
							Sulitnya menemukan pemuda yang memenuhi kriteria sebagai pemuda pelopor pembangunan, yang memiliki kiprah atau pengaruh kepada masyarakat,	Melakukan kerjasama dengan forum pemuda pelopor untuk menemukan calon pemuda pelopor, dan mendampingi mereka agar dapat lolos dan sukses dalam seleksi tingkat nasional,	
							Belum adanya regulasi yang khusus mengatur tentang kepemudaan dan olahraga	Melakukan komunikasi dengan Pemerintah Daerah dan DPRD mengenai proses penyusunan regulasi kepemudaan dan olahraga,	
							Pelajar berprestasi olahraga Kabupaten Bantul sering kali memilih melanjutkan sekolah ke daerah lain, karena Kabupaten Bantul belum mampu memberikan fasilitas yang lebih baik kepada atlet berprestasi,	Perlu dilakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam penerimaan siswa baru dari atlet berprestasi dan pemberian beasiswa bagi mereka,	
							Fasilitas latihan di Kabupaten Bantul masih sangat kurang, terutama belum memiliki Gedung Olahraga dan kolam renang standar nasional,	Diusulkan pembangunan Gedung Olahraga dan kolam renang yang memiliki standar nasional,	
	Urusan Statistik								
							Belum optimalnya penyediaan data statistik sektoral	Penerapan E-Gov di semua aspek pemerintahan	Diskominfo
							Belum optimalnya pemanfaatan data statistik dan data geospasial		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Belum optimalnya penerapan Layanan Unggulan Digital Government Services (DGS) di PD		
							Belum optimalnya penerapan standar keamanan informasi	Tingkat keamanan informasi, data dan aplikasi yang terintegrasi	Diskominfo
							Masih terdapat beberapa tim lain yang memiliki ketugasan bersinggungan dengan Tim Penyelenggara SDI sehingga kurang efektif dan rawan duplikasi data pada proses pengumpulan data	Pembaharuan SK Bupati tentang Tim Penyelenggara SDI (penggabungan beberapa tim)	
							Daftar data statistik sektoral belum ditetapkan oleh Forum SDI	Forum SDI menetapkan Daftar data statistik sektoral	
							Peta batas desa yang digunakan sebagai peta dasar belum ditindaklanjuti dengan perubahan Perbup batas desa	Penyusunan Perubahan Perbup Batas Desa	
							Pengumpulan data belum tersentral dalam satu portal data	Integrasi portal data dengan aplikasi Dataku DIY dan aplikasi lain yang memproduksi data, mengusulkan sentralisasi data melalui forum SDI	
							Belum ada kegiatan statistik yang mendapat rekomendasi dari BPS sehingga mengurangi evaluasi kinerja pemerintah daerah urusan statistic	Mengkoordinasikan proses rekomendasi BPS secara kolektif mulai tahun 2021	
							Pengumpulan data belum melibatkan kecamatan, desa, dan instansi vertical	Sosialisasi dan pelatihan, dilibatkan dalam Tim SDI	
Urusan Persandian									
							Masih perlunya peningkatan penerapan SOP Forum Komunikasi Sandi Daerah	Rekomendasi FORKOMSANDA ditindaklanjuti secara tepat syarat,	
							Belum optimalnya penerapan	Adanya penilaian berkala penerapan	Diskominfo

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							standar keamanan informasi	standar keamanan informasi	
							Peralatan sandi di kabupaten bantul yang ada sudah kurang memenuhi Standart BSSN sehingga kurang maksimal dalam mendukung kegiatan persandian	Pengajuan pemenuhan peralatan sandi kepada TAPD agar sesuai dengan kebutuhan Standart BSSN	Diskominfo
							Masih terbatasnya personil sandi terutama di bidang TI karena beratnya persyaratan yang ditetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjadi sandiman,	Peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui diklat, bimtek, dan kursus persandian yang dilaksanakan oleh BSSN selaku Pembina Tunggal Persandian,	Diskominfo
							Peralatan sandi di kabupaten bantul yang ada sudah kurang memenuhi Standart BSSN sehingga kurang maksimal dalam mendukung kegiatan persandian	Pengajuan pemenuhan peralatan sandi kepada TAPD agar sesuai dengan kebutuhan Standart BSSN	
							Masih terbatasnya personil sandi terutama di bidang TI karena beratnya persyaratan yang ditetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk menjadi sandiman,	Peningkatan kualitas dan kompetensi personil melalui diklat, bimtek, dan kursus persandian yang dilaksanakan oleh BSSN selaku Pembina Tunggal Persandian,	
Urusan Kebudayaan									
	Indeks Pembangunan Kebudayaan	Angka	80	70	67,52	Belum tercapai	Belum jelasnya arah revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	Para stakeholders bersinergi dalam revitalisasi dan aktualisasi nilai budaya dan kearifan lokal	
							Menurunnya minat generasi muda dalam pelestarian seni dan budaya lokal		
	Jumlah desa budaya	Desa	16	16	12	Belum tercapai	Belum jelasnya arah pengembangan Rintisan Desa Budaya sebagai dasar pembinaan	Para stakeholders bersinergi dalam pengembangan Desa Budaya	Disbud
	Cakupan Perlindungan	Persen	27	27	24	Belum tercapai	Kurang optimalnya perencanaan	Para stakeholders disiplin dalam tindak-	Disbud

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Warisan Budaya						Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya	lanjut roadmap Pelestarian benda, situs dan kawasan cagar budaya	
							Kendala aturan dalam perbaikan/rehab kondisi cagar budaya yang rusak		
							Kurang optimalnya upaya pelestarian Cagar Budaya dan Warisan Budaya, terkendala aturan dalam perbaikan warisan budaya yang rusak dan belum ditetapkan sebagai CB	Peningkatan upaya pelestarian obyek-obyek kebudayaan di Kabupaten Bantul: nilai-nilai budaya, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, bahasa, adat istiadat, tradisi luhur, benda, seni dan situs melalui kegiatan: - Pembinaan Penghayat Kepercayaan Adat dan Tradisi - Pengembangan dan Implementasi Nilai-Nilai Luhur Dalam Masyarakat (Pembinaan Dalang anak/ remaja, pentas wayang) - Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya (Penetapan Cagar Budaya, Perencanaan Teknis Cagar Budaya)	
							Belum terdokumentasikannya Warisan Budaya Benda dan Warisan Budaya Tak Benda secara lengkap	Tersedianya update data Warisan Budaya Benda dan Warisan Budaya Tak Benda di Kabupaten Bantul dengan Pengembangan Cagar Budaya dan Warisan Budaya (Kajian Warisan Budaya Tak Benda Benda dan , Pemutakhiran data Warisan Budaya)	
							Menurunnya minat masyarakat dan generasi penerus dalam pelestarian seni dan budaya lokal	Pemeliharaan dan Pengembangan Nilai Budaya (Adat, Tradisi, Lembaga Budaya dan Seni) melalui : - Pembinaan dan Pengembangan Rintisan Desa Budaya dan Kantong Budaya - Pembinaan Lembaga Penggiat seni - Penyelenggaraan Even Penggiat Seni - Pembinaan Kelembagaan Adat dan Tradisi	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
								<p>Pengenalan dan Kerjasama Seni Budaya melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Misi Kebudayaan Kedalam dan Keluar Negeri - Publikasi Seni Budaya Daerah <p>Penyelenggaraan pentas, festival atau lomba seni budaya sebagai ajang untuk menunjukkan potensi obyek kebudayaan sekaligus menampung bakat seni budaya masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Penghargaan Seniman dan Budayawan - FKY - GBY 	
							<p>Kurangnya daya tarik dan pembinaan terhadap bahasa sastra serta belum optimalnya fungsi museum, situs/ peninggalan sejarah dalam pengembangan dan pemanfaatan budaya</p>	<p>Pembinaan Bahasa Sastra, Kesejarahan dan Permuseuman yang melibatkan / bersinergi dengan lembaga pendidikan, tokoh seni, masyarakat dan pengelola, melalui kegiatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan, Pengembangan Bahasa dan Sastra (Kompetisi Kebahasaan, Gelar macapat, Cetak buku sastra, Dialog, Sastrawan Masuk sekolah) - Pembinaan dan Pengembangan Kesejarahan (Kompetisi Sejarah, Peningkatan Kapasitas Sejarah, Dialog dan Sarasehan Sejarah, Peringatan Hari Besar Sejarah) - Pembinaan Permuseuman (Komperisi Museum, Penelitian Pengembangan Museum, Wajib Kunjung dan Promosi Museum) 	
Urusan Perpustakaan									

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Persentase Peningkatan Pemustaka yang berkunjung ke Perpustakaan	%	32	32	-83,3	Belum tercapai	· Masih rendahnya kecakapan membaca	· Masyarakat sadar pada manfaat perpustakaan untuk peningkatan pengetahuan, ketrampilan dan sikap perilakunya	Dispusip
							· Masih rendahnya akses pada bahan bacaan berkualitas melalui perpustakaan Daerah	· Masyarakat gemar sumbang link ebook gratis berkualitas	
							· Masih rendahnya akses terhadap alternatif bahan bacaan berkualitas; seperti ebook	· Masyarakat Gemar Sumbang Buku	Dispusip
							· Masih rendahnya minat dan budaya dan baca masyarakat		Dispusip
							Kegi Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan perpustakaan sebagai sumber informasi dan tempat belajar	Meningkatkan promosi perpustakaan kepada masyarakat	
							Belum optimalnya sarana prasarana Perpustakaan Daerah (terbatasnya ruang baca dan koleksi perpustakaan),	Mengoptimalkan peran masyarakat/pegiat literasi dalam promosi perpustakaan	
							Belum optimalnya sarana prasarana Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan Desa, Perpustakaan komunitas serta TBM, dan Pojok Baca	Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana perpustakaan, seperti dengan dibangunnya Pojok Baca, penambahan koleksi perpustakaan	
Urusan Kearsipan									
	Persentase SKPD yang menyelenggaraan kearsipan sesuai standar dengan nilai baik	%	61	61	64,8	Melampaui	Masih rendahnya kesadaran tentang budaya tertib arsip	Dilakukan sosialisasi dan pendampingan kearsipan, pengawasan kearsipan dan monev penyelenggaraan kearsipan	Dispursip

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Belum semua OPD memiliki SDM Kearsipan/Arsiparis	Rekrutmen PHL dengan formasi Arsiparis	
							Belum optimalnya sarpras pengelolaan arsip Pengelolaan Arsip di OPD/Desa belum sesuai standar	Pemenuhan Sarpras pengelolaan kearsipan secara bertahap Implementasi UU, Perda, Perbub Kearsipan secara konsisten dan berkesinambungan	Dispursip
							Belum semua OPD memiliki SDM Kearsipan/ Arsiparis	Rekrutment PHL dan mengusulkan formasi Arsiparis Bimtek Kearsipan	
							Sarpras untuk pengolahan arsip di OPD masih terbatas	Pemenuhan Sarpras pengelolaan arsip secara bertahap oleh OPD	
							Pengelolaan Arsip di masing-masing OPD belum sesuai standar	Implementasi UU, Perda dan Perbub Kearsipan secara konsisten dan berkesinambungan, Dilakukan Pendampingan kearsipan, pengawasan kearsipan serta monev penyelenggaraan kearsipan di OPD,	
Layanan Urusan Pilihan									
Urusan Kelautan dan Perikanan									
	Pertumbuhan produksi perikanan	%	1,45	1,45	1,59	Melampaui			
	Produksi Perikanan	ton	13,383	13,383	12,629	Melampaui	Ketersediaan bibit, pakan dan air (jumlah dan kualitas) terbatas	Ketersediaan bibit, pakan dan air (jumlah dan kualitas)	Diperpautkan
Budidaya ikan masih didominasi nila, lele dan gurame									
Usaha perikanan skala rumah tangga/ usaha sambilan							Keaktifan petugas Posikandu (pos kesehatan ikan terpadu) Keaktifan kelompok usaha perikanan		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<)			
						Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Kurangnya minat sebagai nelayan	Keaktifan PPL/pendamping dalam membina kelompok Tersedianya informasi dan akses pasar Tersedianya 5 TPI dan dukungan sapsras	
							Kurang maksimalnya produksi perikanan tangkap karena pengaruh cuaca	Pengoptimalan produksi perikanan tangkap melalui aktivitas eret di laut maupun muara	
								Diversifikasi usaha perikanan tangkap	
							Meningkatnya alih fungsi lahan perikanan	Fasilitasi akses permodalan dan pemberian bantuan kepada pelaku usaha di bidang kelautan dan perikanan	
								Pemanfaatan lahan pekarangan untuk dijadikan tempat budidaya Pelatihan teknologi budidaya ikan padat tebar hemat lahan dan air (Matlair) dengan produksi tinggi sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan budidaya	
							Masih adanya kejadian penyakit ikan	Pelatihan budidaya ikan CBIB sehingga dapat mencegah penyakit ikan	
								Peningkatan pengawasan dan pemantauan penyakit dan kesehatan ikan secara teratur	
							Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pasca panen perikanan	Pengoptimalan produksi perikanan jenis olahan ikan melalui pelatihan pasca panen	
							Serapan pasar sempit menurun saat terjadi pandemi Covid-19 pada Semester II	Pemasaran online dan diversifikasi olahan	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
Urusan Pariwisata									
	Pertumbuhan jumlah kunjungan wisatawan	%	23	-67	-54,55	Melampaui			
	Jumlah Kunjungan Wisatawan	Orang	5,468,311	1,700,000	2,348,313	Melampaui	Trens kunjungan wisatawan tidak merata pada seluruh destinasi (dominasi pada destinasi Kawasan Pantai Parangtritis dan Kawasan Hutan Pinus Dlingo)	Peningkatan Daya Tarik Wisata (DTW) Daerah melalui program Loka Wisata Sehat (Premium Tourism) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata	Dinas Pariwisata
	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	2,1	2,1	1	Belum tercapai	Minimnya fasilitas akomodasi, penginapan dan atraksi malam hari	Peningkatan fasilitas akomodasi, penginapan dan atraksi malam hari berbasis masyarakat melalui kegiatan DEWI BERSERI (Desa Wisata Bersih, Sehat, Mandiri) dan BANTUL JUOSS EVENT	Dinas Pariwisata
							Belum lengkapnya produk perencanaan pengembangan kepariwisataan daerah seperti RDKP, RTOW	Penyusunan RDKP untuk 17 kecamatan dan RTOW untuk setiap obyek wisata sebagai penjabaran RIPPARDA Kabupaten Bantul dalam rangka pembangunan kepariwisataan secara terpadu dan terintegrasi	
							Belum meratanya perwujudan Sapta Pesona di setiap obyek wisata dan pokdarwis di Kabupaten Bantul seperti penyediaan sarana prasarana kebersihan dan pembinaan kelembagaan pengelolaan obyek wisata,	Peningkatan sarana dan prasarana wisata dan penguatan kapasitas SDM serta lembaga pengelolaan obyek wisata	
							Belum optimal sarana dan prasarana obyek wisata seperti penambahan fasilitas untuk wisata edukasi di obyek wisata	Penguasaan lahan perlu dikoordinasikan dengan perangkat daerah yang membidangnya, sehingga pembangunan destinasi wisata lebih optimal	
Urusan Pertanian									

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Pertumbuhan produksi tanaman pangan	%	0,1025	0,1025	0,71	Melampaui		Ketersediaan bibit, pupuk, pestida dan air (jumlah dan kualitas)	Diperpautkan
	Pertumbuhan produksi tanaman hortikultura	%	1,10	1,10	2,91	Melampaui		Pemanfaatan alat mesin pertanian yang mendukung percepatan olah tanah, tanam dan panen,	Diperpautkan
	Pertumbuhan produksi tanaman perkebunan	%	0,30	0,30	2,80	Melampaui		Keaktifan Regu Pengendali Hama/penyakit tanaman	Diperpautkan
							Keaktifan kelompok tani/ternak/gapoktan	Diperpautkan	
							Keaktifan PPL/pendamping dalam membina kelompok dan pelatihan ²	Diperpautkan	
							Tersedianya informasi dan akses pasar	Diperpautkan	
							Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha peternakan untuk mencari izin usaha	Diperpautkan	
	Pertumbuhan produksi daging (sapi, kambing, domba, kuda, unggas)	%	0,90	0,90	0,93	Melampaui		Membangun kerjasama dengan petugas IUMK /DKUKPM	Diperpautkan
	Produksi Daging	ton	14,644,26	14,644,26	15,228,52	Melampaui		Efektifitas Rumah Potong Hewan dan pembinaan kepada Rumah Potong Hewan /Unggas	Diperpautkan
							Usaha peternakan sering menimbulkan masalah pencemaran limbah di masyarakat,	Pengolahan/ pemanfaatan limbah ternak	Diperpautkan
							Pengelolaan ternak belum optimal	Manajemen pengelolaan peternakan	Diperpautkan
							Masih beredar daging dengan kualitas rendah	Penerapan ASUH (Aman Sehat Utuh Halal)	Diperpautkan
							Adanya penyakit ternak yang menyebabkan kematian pada ternak	Keaktifan Dokter hewan dan efektifitas Puskesmas dalam penanganan penyakit ternak	Diperpautkan
							Fluktuasi harga hasil	Informasi akses pasar bagi para peternak	Diperpautkan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Produksi Tanaman pangan	ton	232,034	232,034	226,033	Belum Tercapai	Luasan lahan sawah semakin menurun	Pengamanan lahan sawah dari alih fungsi lahan (Program LP2B)	Diperpautkan
							Lambatnya aplikasi teknologi oleh petani	Pelatihan berbasis teknologi untuk meningkatkan pengetahuan dan minat petani	Diperpautkan
							Regenerasi petani yang lambat	Perlu kaderisasi di Gapoktan/ kelompok tani	Diperpautkan
							Belum optimalnya pengelolaan hasil pertanian	1, Pelatihan penanganan pasca panen 2, Promosi Hasil Pertanian	Diperpautkan
	Produksi Tanaman Hortikultura	ton	6,697,25	6,697,25	16,264,3	Melampaui	Keberhasilan panen sangat tergantung pada iklim	Pengaturan pola tanam dengan memperhatikan iklim	Diperpautkan
							Fluktuasi harga hasil panen	Informasi akses pasar	Diperpautkan
							Hasil panen tidak tahan lama, perlunya penanganan pasca panen yang lebih baik	Perbaiki penanganan pasca panen dan perbaikan informasi/akses pasar	Diperpautkan
							Rendahnya minat menanam tanaman biofarmaka	Pemanfaatan lahan pekarangan, lahan di bawah tegakan dan lahan marginal	Diperpautkan
	Produksi Tanaman Perkebunan	ton	14,604,08	14,604,08	15,122,22	Melampaui	minat terhadap tanaman perkebunan rendah (mete, kakao, tebu, tembakau dan kelapa)	Pemanfaatan lahan pekarangan dan lahan marginal	Diperpautkan
							Lambatnya aplikasi teknologi oleh petani	Perbanyak pelatihan sehingga bisa meningkatkan pengetahuan dan minat petani untuk menerapkan teknologi baru	
							Regenerasi petani yang lambat	Perlu kaderisasi di Gapoktan/ kelompok tani	
							Belum optimalnya pengelolaan hasil pertanian	1, Pelatihan penanganan pasca panen 2, Promosi Hasil Pertanian	
							Manajemen pengelolaan peternakan belum optimal	Optimalisasi pengelolaan peternakan,	
Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral									

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Cakupan Pengembangan Potensi Ketersediaan Energi	%	78	78	-	-	Kewenangan urusan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Kabupaten hanya terbatas pada kecukupan energi industri,	Optimasi kemitraan dengan PT, Pertamina (Persero), PT, Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam menjaga kecukupan ketersediaan energi industri di Kabupaten Bantul,	DKUKMP
Urusan Perdagangan									
	Pertumbuhan Ekspor	%	7	7	-3,62	Belum tercapai	Komoditi daerah berstandar ekspor masih sangat terbatas	Peningkatan volume dan nilai ekspor komoditi unggulan (mebel, pakaian dan kerajinan) ke pasar internasional di Amerika, Jerman, Australia dan ASEAN	Dinas Perdagangan
	Jumlah Pasar Tipe A	Unit	3	3	4	Melampaui	Proporsi pasar dengan type A masih rendah (12,5%) karena lemahnya regenerasi pedagang dan minimnya kepemilikan lahan,	Peningkatan kualitas pasar rakyat melalui program Pasar Anyar (Bantul Premium Market)	Dinas Perdagangan
	Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perdagangan	%	5,62	5,62	5,69	Melampaui	Penurunan kunjungan pasar rakyat	Peningkatan pelayanan pasar berbasis online (pasar online, e-payment dan e-retribusi)	Dinas Perdagangan
Urusan Perindustrian									
	Cakupan Industri Kreatif	%	47	47	46,2	Belum tercapai	Omset IKM menurun (dampak Covid-19)	1, Melaksanakan padat karya pembuatan masker 2, Fasilitasi MoU antara IKM dengan trader	DKUKMP
							Belum semua terstandarisasi produk IKM	Fasilitasi sertifikasi halal	DKUKMP
							Pelaku industri masih banyak yang belum terlindungi dari sisi merk dagang	Fasilitasi HKI dan rekomendasi HKI,	DKUKMP
	Pertumbuhan industri	%	3	3	3,4	Melampaui	Akses jalan Kawasan Industri (KI) Piyungan belum memadai	Optimalisasi pembangunan akses jalan KI Piyungan mendorong pertumbuhan industri	DKUKMP
							Pengembangan KPI Piyungan belum optimal	-Sewa tanah warga sebagai jalan akses sementara	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
								-Pembangunan akses jalan KPI Piyungan -Mendorong pertumbuhan industri di KPI	
							Pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) Sedayu-Pajangan belum merata	Pembangunan jalan masuk kawasan, peningkatan indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business Index) dan After Care Service Industri	DKUKMP
92	Urusan Transmigrasi								
							Belum adanya pedoman resmi dari pusat tentang pola kerjasama bidang transmigrasi yang berfungsi untuk percepatan pembangunan sosial dan pembangunan wilayah	Daerah tujuan membutuhkan transmigran yang berkualitas, yaitu yang dapat menjadi motor percepatan pembangunan sosial dan wilayah di daerah tujuan	Disnakertrans
							Lokasi yang ditawarkan oleh pusat tidak selalu sesuai dengan minat calon transmigran	Adanya sinergi kebijakan Transmigrasi antara Pusat dengan Daerah Asal dan Daerah Tujuan,	Disnakertrans
							Alokasi penempatan transmigran tidak sesuai dengan animo calon transmigran	Memberikan gambaran lokasi daerah tujuan melalui penyuluhan, dan penajajaran kerja sama ketransmigrasian ke daerah tujuan baru	
							Adanya kebijakan untuk menanggulangi pola costsharing	Konsultasi ke pusat untuk membuka kembali peluang keberlanjutan cost sharing	Disnakertrans
	Layanan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan								
	Indeks Tata Kelola Pemerintahan (Indonesia Governance Index/IGI)	Klasifikasi	8,0 (Baik)	8,0 (Baik)	7,7 (Baik)	Belum tercapai	Adanya pandemi Covid-19 mengharuskan pembatasan aktivitas pada penyelenggaraan pemerintahan sehingga mempengaruhi penurunan nilai indeks prinsip tata kelola	Optimalisasi penyelenggaraan tata kelola pemerintahan	
	Fungsi Penunjang Perencanaan								

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
	Persentase rata-rata capaian sasaran daerah	%	94,90	94,90	98,77	Melampaui	Adanya pandemi Covid-19 sehingga terjadi refocusing anggaran untuk penanganan pandemi tersebut, Beberapa kegiatan tertunda dan tidak bisa dilaksanakan,	Kegiatan seperti koordinasi/workshop/sosialisasi dilakukan secara virtual	
	Persentase rata-rata Pencapaian Target Kinerja Program PD	%	91,10	91,10	98,81	Melampaui		Pengadaan alat studio untuk virtual	
							Adanya aplikasi baru dari Kemendagri yaitu Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), Aplikasi tersebut masih banyak kendala dalam pengoperasional menyebabkan kesulitan menginput data ke aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), Salah satu kendala adalah SIPD berbasis online yang membutuhkan jaringan internet kuat dan tentunya laptop yang berkapasitas atau spek tinggi, Sistem berbasis online itu diterapkan berdasarkan Permendagri nomor 70 tahun 2019 tentang Implementasi SIPD mewajibkan seluruh pemda pemrov/kab/kota mengadopsi penyusunan APBD (perencanaan anggaran, pembiayaan penganggaran, pertanggungjawaban dan pelaporan monev/evaluasi), Termasuk selaras dengan PP nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Mewajibkan Penerapan SIPD, apabila tidak dikenakan sanksi penundaan	Pemahaman dan niat yang sama agar amanat regulasi ini dapat tercapai dengan baik sebagaimana amanat pemerintah pusat bahwa SIPD ini sebagai perangkat yang diharapkan sebagai instrumen yang dpt mempermudah penyelenggaraan APBD dengan berbasis 1 data	
								Koordinasi dengan Kemendagri secara kontinyu	
								Aplikasi Sepakat tetap digunakan untuk membackup data yang sudah dientry di SIPD,	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020		Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<)	Sesuai (=) Melampaui (>)			
								transfer dau (dana perimbangan bersumber pusat), SIPD juga akan menjadi fokus aplikasi yang digunakan pada tahun 2021 mendatang,		
Fungsi Penunjang Keuangan										
	Opini Pemeriksaan BPK	Predikat	1 (WTP)	1 (WTP)	1 (WTP)	Sesuai		1, Sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah (SEPAKAT) belum berjalan dengan baik 2, Belum optimalnya Pengendalian atas penatausahaan aset daerah,	Perangkat Daerah menerapkan akuntabilitas keuangan dan akuntabilitas kinerja,	BKAD
	Percepatan Belanja Pemerintah	%	70	70	69	Belum tercapai		Belum optimalnya pelaksanaan kegiatan sesuai waktu yang direncanakan	Komitmen Perangkat Daerah untuk melakukan pencatatan dan pelaporan aset daerah,	BKAD
	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	25	25	17,32	Belum Tercapai		Pengendalian atas penatausahaan piutang pajak dan retribusi belum optimal	Perangkat Daerah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan	BKAD
	Persentase PAD terhadap Belanja Daerah	%	20	20	18,46	Belum Tercapai			Penerapan prosedur proyeksi TIAP RINCIAN OBJEK PAD yang lebih terbuka berdasarkan basis data yang mendekati potensi riil dan dilengkapi dengan informasi tiap permasalahan dan kendalanya,	BKAD
								Pembayaran PBB P2 melalui mobil keliling pajak daerah belum terhubung dengan sistem pembayaran (payment gateway) yang terdapat pada Bank BPD DIY sehingga harus melalui autodebet atau Mobile Banking	Setelah beberapa kali pertemuan Pada akhir tahun 2020 telah dilakukan koordinasi dengan pihak Bank BPD dan disepakati pada awal tahun 2021 pembayaran PBB P2 melalui mobil keliling pajak daerah akan langsung terhubung dengan payment gateway Bank BPD DIY	
								Permasalahan Pelayanan PBB P2	Pengadaan aplikasi SMARTGOV Modul	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							dan BPHTB terkendala Aplikasi SISMIOP dan SIMPATDA yang tidak mendukung saat pegawai harus work from home saat terjadi pandemi Covid-19	PBB P2 dan BPHTB dengan sistem Web Based sehingga petugas pelayanan dan penelitian sepanjang ada jaringan internet dapat melakukan pelayanan, Penggunaan aplikasi ini akan dipergunakan efektif Mulai tanggal 4 Januari 2021 setelah dilakukan langkah uji coba dan pelatihan pada November s/d Desember 2020	
							Data penyusutan aset tetap dan data persediaan belum optimal;	Meningkatkan kerjasama dan koordinasi antara bendahara pengeluaran, pembuat neraca dan penyimpanan barang di masing-masing OPD serta diaplikasikannya system baru terkait Aset Tetap dan Persediaan	
Fungsi Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan									
	Presentase Pemenuhan Kompetensi Aparatur	%	91	91	82,38	Belum Tercapai	Pengembangan potensi pegawai belum optimal	Pemenuhan diklat sesuai kebutuhan kompetensi jabatan	BKPP
	Nilai Indeks Kepuasan Aparatur	%	81,80	81,80	88,33	Melampaui	Belum optimalnya Sistem Informasi Kepegawaian untuk mendukung manajemen ASN		
							Formasi ASN tidak terpenuhi secara optimal	Rekonsiliasi data kepegawaian seluruh OPD di Kabupaten Bantul	
							Ketidaksesuaian penataan PNS dengan formasi terutama pada pendidikan yg linier	Meningkatkan kompetensi SDM melalui diklat-diklat teknis	
							Penanganan kasus pelanggaran disiplin tidak terselesaikan	Sosialisasi aturan disiplin dan pemantauan secara terus menerus	
Fungsi Penunjang Penelitian dan Pengembangan									
							Fokus litbang belum sesuai dengan kebutuhan perencanaan,	Hasil litbang bersifat konstruktif dan rekomendasinya berbentuk program dan kegiatan sesuai kebutuhan perencanaan pembangunan	Bappeda
Fungsi Penunjang Lainnya									

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
Fungsi Penunjang Pengawasan									
	Nilai Maturitas SPIP	Level	Level 3 (3,2)	Level 3 (3,2)	Level 2 (3,075)	Belum Tercapai	Penyelesaian tindak lanjut temuan internal dan eksternal belum optimal	Komitmen obyek pemeriksaan dalam penyelesaian tindak lanjut	Inspektorat
								Monev tindak lanjut temuan	
							Belum optimalnya penerapan SOP fasilitasi fungsi legislasi, SOP fasilitasi fungsi budgeting dan SOP fasilitasi fungsi pengawasan DPRD	Komitmen bersama dalam peningkatan kinerja fungsi-fungsi DPRD	Setwan
							Keterbatasan sumber daya manusia sehingga pelaksanaan pengawasan melibatkan pejabat struktural dan staf,	Mengusulkan penambahan sarana mobilitas/operasional yang memadai mengingat kegiatan pemeriksaan dilakukan di seluruh wilayah Kabupaten Bantul,	
							Sarana dan prasarana kerja belum memadai,	Mengikutsertakan sumber daya manusia untuk melaksanakan diklat/bimtek pengawasan baik dilaksanakan oleh kementerian keuangan, BPKP, dsb,	
							Kualitas sumber daya yang ada belum optimal	Mengusulkan penambahan sumber daya manusia dalam hal ini auditor pengawas	
							Kegiatan Pembinaan Organisasi Masyarakat Sesuai amanat Permendagri no57 Tahun 2017 tentang Pendaftaran dan Pengelolaan Sistem Informasi Ormas (SIULA) yang seharusnya sdh dapat dilaksanakan dimasing-masing Kabupaten kita belum dapat melaksanakan karena belum adanya kesiapan dari Pemerintah Kab, Bantul dalam hal ini Dukungan Anggaran dan Sarana Prasaranya yang belum terkondisikan,	Ditahun anggaran 2021 Kita telah mengajukan anggaran ke TAPD tetapi belum mendapatkan respon yang positif, mudahmudahan di ABT 2021 nanti kita bisa mendapatkan tambahan anggaran untuk kegiatan tersebut diatas,	Kesbanpol urusan

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Besaran Bantuan Keuangan Partai Politik semula sebesar Rp 1,927,- per satu suara sah per tahun bagi partai politik yang mempunyai wakil di kursi DPRD, karena terjadi penambahan suara sah pada PEMILU 2019 (577,151) telah dilaksanakan penambahan anggaran per suara sah sebesar Rp 3,400,-	Kekurangan sudah terealisasi lewat anggaran biaya tambahan (ABT) TA 2020,	
							Dukungan Dana Desk Pilkada karena pandemi dikurangi sehingga blm optimal dalam Pemantauan Pilkada 2020,		
Fungsi Penunjang Perumusan Kebijakan									
	Nilai Evaluasi Kinerja SKPD	Angka	71	71	76	Melampaui			Setda
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	83	83	84,76	Melampaui			
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Nilai	3,7 (Sangat Tinggi)	3,7 (Sangat Tinggi)	3,4 (Sangat Tinggi)	Belum Tercapai	Belum optimalnya kualitas perencanaan tahunan Daerah	SKPD menerapkan SOP proses perencanaan; yaitu SOP penyusunan rencana, SOP penetapan rencana, SOP pelaksanaan dan pengendaliannya, serta SOP evaluasi hasil pelaksanaan kegiatan,	Bappeda
							Belum optimalnya kualitas perencanaan di SKPD	SKPD aktif mengentri data capaian kinerja pada SIPD sesuai prosedurnya,	Bappeda
							Belum optimalnya kualitas sinergi pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah,	SKPD meyakini bahwa pengendalian dan evaluasi merupakan saran untuk proving dan improving kinerja	
							Belum optimalnya pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah	Usulan kegiatan dari Desa yang berkualitas dan berorientasi pada Nangkis sesuai kriteria yang telah ditetapkan,	
							Belum optimalnya kualitas Musrenbangdes dan Musrenbang		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Kecamatan		
							Lemahnya pemahaman dan keterampilan dalam melakukan pengukuran kinerja terhadap kebijakan dan program yang dilaksanakan		
							Terdapatnya inkonsistensi/perbedaan dalam mencantumkan indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran mengakibatkan tingkat capaian program/kegiatan tidak terukur,		
	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP)	Nilai	81 (A)	81 (A)	81,91	Melampaui	Dokumen Renbangda belum optimal berorientasi pada penanggulangan kemiskinan untuk peningkatan kesejahteraan,	SKPD selalu berupaya untuk meningkatkan ketepatan bentuk kegiatan, ketepatan lokasi kegiatan, ketepatan kelompok sasaran, dan ketepatannya dengan target tahunan,	Bappeda
	Persentase Belanja Pegawai	%	45	45	47	Belum Tercapai	Belum optimalnya belanja pegawai yang dialokasikan pada program kegiatan yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh masyarakat	Peningkatan alokasi belanja untuk kesejahteraan masyarakat melalui program strategis	BKAD
	Persentase Raperda yang disetujui	%	80	80	17,5	Belum Tercapai	Penetapan Perda tidak memenuhi target karena pembahasan Raperda Triwulan IV mundur sampai tahun berikutnya.	Pembahasan dan rekomendasi tindak lanjut dilaksanakan pada Kegiatan Legislasi pada tahun berikutnya	Bagian Hukum
							Perubahan nomenklatur jabatan fungsional sehingga terjadi penyesuaian pada analisis jabatan dan analisis beban kerja yang telah disusun,	Mengganti sesuai perubahan nomenklatur terbaru dan berkonsultasi dengan Biro Organisasi	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Regulasi tentang penyusunan Proses Bisnis kurang mendetail dan belum ada daerah yang menjadi pilot project / atau contoh Proses Bisnis Daerah sehingga di tahun 2020 dalam penyusunannya kurang maksimal,	Melakukan konsultasi atau mendatangkan narasumber dari Kemenpan RB atau Kemendagri dan menyusun peta proses bisnis seperti yang dicontohkan oleh Kemenpan RB,	
							Pada Tahun 2020 Pemerintah Pusat Mengeluarkan regulasi yang Harus Segera ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Daerah Seperti PP Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas PP 18 Nomor Tahun 2016 dan Permendagri Nomor 56 Tahun 2019 Tentang SOTK Sekretariat Daerah, Disisi lain Pemerintah Pusat juga mengeluarkan kebijakan Penyederhaan Birokrasi, kebijakan tersebut kontra indikatif yang menjadikan kebingungan untuk mengambil keputusan tentang regulasi kelembagaan,	Tetap menyusun regulasi tentang kelembagaan sesuai dengan aturan terbaru serta melakukan pemetaan jabatan dan pengajuan sesuai Surat Edaran tentang Penyederhanaan Birokrasi,	pemberdayaan
							Pengumpulan data penyusunan dokumen SHBJ maupun ASB tidak tepat waktu, sehingga menyebabkan keterlambatan input data pada aplikasi SIPD,	Melakukan koordinasi secara intensif dan memperkuat komitmen Perangkat Daerah Kabupaten Bantul untuk pengiriman data tepat waktu sesuai dengan kebutuhan dan rencana penganggaran,	AP
							Belum tercukupinya pejabat fungsional pengadaan barang/jasa	Sudah mengangkat 5 jabatan fungsional dari kebutuhan 15 orang	LPBJ
							Kompleksitas regulasi pengadaan B/J belum sepenuhnya dipahami	Bimtek, FGD, Forkom pengadaan barang dan jasa dan konsultasi, kajian bersama dan	

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Konsekuensi hukum proses PBJ yang berat	Pendampingan hukum oleh Bagian Hukum Mengajukan anggaran untuk kebutuhan penasehat hukum	
							Ratio jumlah paket pekerjaan dengan personil pokja pengadaan	Pembuatan jadwal pereodesasi bulanan pengadaan barang/jasa	
							Belum semua OPD melaksanakan PBJ Pengadaan langsung secara elektronik	Asistensi dan bimtek e pengadaan langsung ke OPD	
							Aplikasi SPSE sering mengalami gangguan	Konsultasi ke LKPP Jakarta	
							Sistem/aplikasi perencanaan, penganggaran, pengadaan barang/jasa dan monitoring belum terjadi sinkronisasi / aplikasi belum terhubung secara online	Koordinasi dengan LKPP, Kementerian Dalam Negeri dan OPD terkait	
							Pencitraan pimpinan secara tidak langsung mempengaruhi opini masyarakat untuk mendukung proses program kegiatan pemerintah.	Perlunya koordinasi dan komunikasi dengan Dinas Kominfo untuk publikasi yang komprehensif sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi tentang capaian pembangunan di Kabupaten Bantul melalui media - media yang sudah ada dalam kegiatan pengelolaan informasi media massa	Humpro
Fungsi Penunjang Pemerintahan Umum									
	IKM Kecamatan	%	90	90	94,13	Melampaui	Masih perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang syarat dan ketentuan PATEN	Masyarakat memahami syarat dan ketentuan PATEN sehingga dapat memenuhinya untuk mempercepat pelayanan PATEN yang diajukan	Kecamatan
							Masih perlunya peningkatan kedisiplinan dalam penerapan SOP		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020			Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<)	Sesuai (=)	Melampaui (>)			
									PATEN		
	Persentase Desa dengan penyelesaian APBDes tepat waktu	%	100	100	100	Sesuai		Belum optimalnya penerapan SOP Pendampingan Sinkronisasi RKPDes dan APBDes dari Kecamatan,	Desa dan BPD mau dan mampu secara tepat syarat memenuhi tiap tahapan perencanaan pembangunan desa,	Kecamatan	
								Belum optimalnya peran pendamping desa dalam mensinergikan pendampingannya dengan Kecamatan,			
	Rata-rata persentase kesesuaian APBDes dengan RPJMDes	%	90	90	90	Sesuai		Belum optimalnya penerapan SOP Pembinaan Kinerja Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi Desa	Ada SOP Penilaian Kinerja Pemerintahan dan Tingkat Reformasi Birokrasi Desa,	Kecamatan	
								Belum optimalnya tindak-lanjut rekomendasi hasil penilaian kinerja Reformasi Birokrasi Desa	Beberapa kriteria penilaian meliputi: jam kerja, update monografi desa, kedisiplinan pelaporan, ketepatan siklus perencanaan bangdes,		
									SOP disusun oleh Bagian Organisasi, tetapi penilaiannya dapat dimandatkan pada Kecamatan,		
	Persentase realisasi program prioritas Musrenbang Kecamatan	%	100	100	100	Sesuai		Belum optimalnya penerapan SOP Pembinaan Musrenbangdes	Adanya SOP Pembinaan Musrenbangdes,	Kecamatan	
									Dalam SOP itu ada kriteria usulan, plafon alokasi usulan, dan ketentuan lain yang menjadi rambu-rambu usulan di Murenbangdes		

No	Bidang Urusan dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Satuan	Target 2020 (RPJMD)	Target Penyesuaian 2020	Capaian 2020	Interpretasi 2020	Permasalahan	Faktor-faktor Penentu Keberhasilan	Perangkat Daerah
						Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)			
							Belum optimalnya penerapan SOP FORKOMPIMCA,	Rekomendasi FORKOMPIMCA diteruskan dan dapat ditindak-lanjuti secara tepat syarat oleh para pihak terkait,	Kecamatan
Aspek Daya Saing									
	Nilai Tukar Petani	Angka	101,9	101,9	101,13	Melampaui	Petani tidak bisa mengatur harga jual hasil panennya, harga tergantung pasar	Harga jual hasil pertanian	
	Percepatan Layanan Perizinan dan Non Perizinan Tepat Waktu	%	83	83	96,95	Melampaui			Diperpautkan
	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	80	80	87,89	Melampaui			DPMP
	Upah Minimum Kabupaten	Rp	1,679,093	1,679,093	1,790,500	Melampaui			Disnakertrans

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

7.2.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah pada dasarnya berisi program-program unggulan PD yang relevan dengan pencapaian target sasaran pembangunan daerah. Elemen-elemen utama program unggulan memuat kegiatan yang akan dilaksanakan, kerangka waktu pelaksanaan, pagu pendanaan dan PD yang bertanggungjawab. Program yang disusun dilaksanakan dengan mempertimbangkan waktu, anggaran, kapasitas, dan sumberdaya yang dimiliki.

Prioritas pembangunan daerah merupakan program kegiatan yang secara khusus berhubungan dengan sasaran pembangunan daerah dan memiliki daya ungkit yang besar bagi kinerja pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan disusun berdasarkan capaian kinerja pembangunan tahun 2020, identifikasi permasalahan, isu-isu strategis pembangunan daerah, tema dan prioritas pembangunan Nasional dan DIY.

Tema RKP Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Prioritas pembangunan Nasional yang akan dilaksanakan pada tahun 2022 adalah :

1. PN.1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan
2. PN.2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. PN.3. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing
4. PN.4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan
5. PN.5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar
6. PN.6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim
7. PN.7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik.

Tema pembangunan dalam RKPD DIY Tahun 2022 adalah “Pengembangan SDM Unggul dan Sektor Strategis untuk Pemulihan Sosial Ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta”. Prioritas pembangunan DIY tahun 2021 sebagai berikut :

1. Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi),

2. Peningkatan infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi,
3. Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial,
4. Mewujudkan pembangunan yang merata, selaras, dan lestari,
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Arah Kebijakan Kabupaten Bantul untuk Tahun 2022 dalam RPJMD Tahun 2021 – 2026 adalah “Percepatan Pemulihan Kondisi Sosial dan Ekonomi melalui Optimalisasi Keunggulan Kompetitif Lokal dan SDM Berkualitas”. Arah kebijakan tersebut menjadi acuan dalam menentukan tema pembangunan Tahun 2022 yaitu “Penguatan Produk Unggulan yang didukung SDM dan Infrastruktur Berkelas”.

Berdasarkan capaian kinerja pembangunan Tahun 2021, isu-isu strategis pembangunan 2022, prioritas pembangunan Nasional DIY serta Tema Pembangunan Kabupaten Bantul 2022, Pemerintah Kabupaten Bantul merumuskan Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2022 sebagai berikut:

1. Penguatan Produk Unggulan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi
4. Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana.
5. Penguatan Reformasi Birokrasi.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan sasaran dan prioritas bidang pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah. Prioritas pembangunan Kabupaten Bantul pada hakekatnya mendukung dan selaras dengan prioritas DIY dan Nasional. Sinergi prioritas pembangunan tersebut sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 7.3.

Sinergitas Prioritas Pembangunan Kabupaten Bantul dengan Prioritas Pembangunan DIY dan Nasional Tahun 2022

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH
Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan sektor-sektor unggulan dan potensial	Penguatan Produk Unggulan	Terwujudnya pemerataan pendapatan

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DIY	PRIORITAS KABUPATEN BANTUL	SASARAN DAERAH
Mengembangkan Wilayah untuk mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan			
Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Pemberdayaan SDM yang berkualitas (sehat, berpendidikan, dan mampu secara ekonomi)	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia	Terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi Terwujudnya akses dan mutu pendidikan yang berkualitas
Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan			Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	Peningkatan infrastruktur layanan dasar yang mendukung pertumbuhan ekonomi	Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi	Terpenuhinya sarana prasarana publik
Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Mewujudkan pembangunan yang merata, selaras, dan lestari	Pemantapan Pelindungan Lingkungan, Sosial dan Bencana	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas Menurunnya risiko bencana Meningkatnya kesejahteraan social kelompok rentan Meningkatnya perlindungan bagi pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS)
Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	Penguatan Reformasi Birokrasi	Terwujudnya pelayanan prima dan bebas KKN

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021 diolah

7.2.3. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Kewilayahan

Prioritas pembangunan berdasarkan isu strategis nasional yang berlokasi di Kabupaten Bantul dan merupakan proyek-proyek nasional di DIY pada tahun 2022, yaitu Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Pantai Selatan Yogya dan sekitarnya, berupa penyelesaian konstruksi JJLS DIY: Pembangunan Jembatan Kretek II.

Berdasarkan hasil forum kewilayahan yang dilaksanakan oleh DIY dan Kabupaten Bantul menyepakati usulan untuk diakomodir dalam perencanaan DIY sebagai berikut :

1. Peningkatan Jalan Terong – Pathuk
2. LPJU ruas jalan Pandak – Srandakan (Palbapangke barat)

7.2.4. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Arah kebijakan Kabupaten Bantul berdasarkan Standar Pelayanan Minimal untuk tahun 2022 disajikan sebagai berikut:

Tabel 7.4 Target Capaian SPM Kabupaten Bantul Tahun 2022

NO	BIDANG	TARGET SPM TAHUN 2021	PROGRAM	OPD
1.	Pendidikan	1. Pendidikan Anak Usia Dini 2. Pendidikan Dasar Pendidikan Kesetaraan	1. Program Pengelolaan Pendidikan 2. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Dikpora
2.	Kesehatan	Pemenuhan SPM sudah tercapai 100% (12 Jenis Layanan)	1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum	1. Kebutuhan Pokok Air Minum 2. Pengolahan Air Limbah Domestik	1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 2. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	DPUPKP
4.	Perumahan Rakyat	1. Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana 2. Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terlokasi	Program Pengembangan Perumahan	DPUPKP
5.	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1. Trantibum	1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP
		1. Informasi Rawan Bencana 2. Mitigasi Bencana 3. Penyelamatan Dan	1. Program Penanggulangan Bencana	BPBD

NO	BIDANG	TARGET SPM TAHUN 2021	PROGRAM	OPD
		4. Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran		
6.	Sosial	1. Pembangunan Shelter PMKS 2. Jaminan Sosial Pasca Bencana	1. Program Rehabilitasi Sosial 2. Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial P3A

Sumber: Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

7.2.5. Keistimewaan

Sesuai dengan Undang-undang RI Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, DIY adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perencanaan Keistimewaan Tahun 2022 telah diawali sejak tahun 2020. Alokasi dana keistimewaan mulai tahun 2020 menggunakan mekanisme Bantuan Keuangan Khusus Provinsi DIY kepada Kabupaten/Kota yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, dan Bagian Organisasi Setda selaku Pengguna Anggaran. Rincian program, kegiatan dan anggaran pada 4 urusan keistimewaan yang diusulkan untuk tahun anggaran 2022, sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 7.5 Usulan BKK Dana Keistimewaan per Urusan
Di Kabupaten Bantul Tahun 2022**

No	Urusan	Perangkat Daerah	Anggaran
1	Kelembagaan		3.950.958.000,00
		Bagian Hukum, Setda	500.000.000,00
		Bagian Organisasi, Setda	350.000.000,00
		Bagian Adm. Pemerintahan, Setda	261.050.000,00
		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan masyarakat Desa	1.057.984.500,00
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	330.502.000,00
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	299.595.500,00
		Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	381.726.000,00
		Kapanewon	770.100.000,00
2	Kebudayaan		19.935.000.000,00
		Dinas Kebudayaan	14.850.000.000,00

No	Urusan	Perangkat Daerah	Anggaran
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	800.000.000,00
		Dinas Kesehatan	600.000.000,00
		Dinas Sosial, Perlindungan Perempuan dan Anak	550.000.000,00
		Dinas Pariwisata	1.000.000.000,00
		Dinas Perdagangan	400.000.000,00
		Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan	235.000.000,00
		Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian	400.000.000,00
		Dinas Komunikasi dan Informatika	500.000.000,00
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	600.000.000,00
3	Pertanahan		4.820.382.000,00
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	4.220.382.000,00
		Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Pemberdayaan masyarakat Desa	600.000.000,00
4	Tata Ruang		1.000.000.000,00
		Dinas Pertanahan dan Tata Ruang	500.000.000,00
		Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman	500.000.000,00
	Jumlah		29.706.340.000,00

Sumber :Bappeda Kabupaten Bantul, 2021

7.2.6. Kebijakan Pemulihan Ekonomi Penanganan Pandemi Covid-19

Pandemi Covid-19 telah menjadi isu global yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan. Pandemi COVID-19 telah menyebabkan tekanan terhadap ekonomi dan sosial. Pasca pandemi COVID-19, ekonomi global diperkirakan menuju keseimbangan baru (*new normal*), yang proses transformasinya akan terjadi di empat area.

Pertama, melalui transformasi struktural ekonomi dan digital. Struktur perekonomian negara-negara akan mengalami perubahan yang cukup signifikan. Berbagai negara mulai melakukan transformasi perekonomiannya sekaligus melakukan pembenahan sistem kesehatannya. *Telemedicine* dan *e-commerce* merupakan salah satu sektor yang bertahan dan berkembang di saat pandemi COVID-19, dan akan terus berlanjut secara pesat pasca pandemi COVID-19.

Kedua, transformasi perilaku dan pola hidup masyarakat untuk lebih menerapkan perilaku hidup sehat yang akan berdampak pada perubahan permintaan berbagai produksi yang harus menyesuaikan dengan kebutuhan tersebut. Kebiasaan baru saat pandemi terjadi, seperti menjaga jarak dengan orang lain, menggunakan masker dan pelindung

diri lainnya, mencuci tangan dengan sabun, serta lebih memanfaatkan layanan antar, akan terus menjadi tren gaya hidup masyarakat kedepan. Pemanfaatan teknologi akan semakin masif dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat sehari-hari, seperti pembayaran digital, *mall-online*, konsultasi dokter daring, dan pertemuan/pembelajaran secara daring.

Ketiga, transformasi pola rantai pasok berupa kondisi sistem rantai pasok tradisional yang bersifat linear akan dianggap tidak relevan lagi dan bergeser menjadi jaringan pasok digital (*digital supplynet*) sehingga konsumen, pabrik dan jaringan pasokan produksi akan terhubung melalui *platform* digital.

Keempat, transformasi tatanan internasional berupa kondisi krisis COVID-19 berpotensi menjadi salah satu landasan bagi negara-negara untuk lebih mementingkan kebijakan dalam negerinya (*inward-looking policies*) yang berorientasi pada nasionalisme dan deglobalisasi, seperti lebih menutup diri terhadap imigran dan memberikan proteksi lebih banyak kepada industri dalam negerinya.

Dihadapkan pada dampak yang besar baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi, dan belajar dari langkah-langkah yang diambil oleh berbagai negara, respon kebijakan untuk memitigasi dampak COVID-19 dapat dibagi menjadi empat tahap: pertama adalah menguatkan sektor kesehatan, kedua melindungi masyarakat dan dunia usaha, ketiga mengurangi tekanan terhadap sektor keuangan, dan keempat adalah program pemulihan ketahanan ekonomi dan kehidupan masyarakat pasca pandemi COVID- 19.

Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Pandemi COVID-19 di Kabupaten Bantul Tahun 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 7.6 Pemetaan Kebijakan Pemulihan Ekonomi dalam Penanganan Pandemi COVID-19 dalam Program, Kegiatan dan Sub kegiatan di Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Kebijakan	Fokus Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	PD
1.	Pengendalian inflasi dan menjaga daya beli masyarakat	<p>Kebijakan pengendalian inflasi merupakan salah satu reformasi ekonomi yang diarahkan pada upaya menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta efektivitas komunikasi yang mendukung proses pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19.</p> <p>Kebijakan pengendalian inflasi tersebut berfokus pada :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menjaga ketersediaan pasokan khususnya pada sepuluh komoditas pangan strategis serta barang-barang kebutuhan utama sistem Kesehatan nasional yang mencakup alat, perangkat, dan obat-obatan; 2) Meningkatkan efisiensi rantai pasokan melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi; 3) Memperkuat infrastruktur perdagangan untuk mengurangi kesenjangan harga; 4) Meningkatkan sinergi komunikasi pusat-daerah untuk mendukung pengelolaan ekspektasi masyarakat; dan 5) mewujudkan basis data statistik pangan yang akurat, tepat waktu, dan relevan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ✓ Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan 2. PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota ✓ Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota ✓ Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota 3. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan 	<p>24.000.000</p> <p>145.300.000</p>	<p>Diperpautkan</p> <p>Dinas Perdagangan</p>

No	Kebijakan	Fokus Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	PD
			✓ Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan 4. PROGRAM Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan ✓ Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan Makanan	3.912.393.401 34.435.120	Dinas Perdagangan Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
2	Perlindungan sosial dan menjaga kemunduran sosial bagi masyarakat miskin dan rentan	Kebijakan perlindungan sosial dan menjaga kemunduran sosial bagi masyarakat miskin dan rentan dilakukan dalam rangka memberikan layanan dan jaminan kepada masyarakat miskin dan rentan melalui upaya: 1). Menjamin pelaksanaan pelayanan dan perlindungan sosial bagi orang lanjut usia terlantar dan orang yang mengalami disabilitas berat; 2). Memenuhi kebutuhan dasar berupa pangan yang sehat bagi orang lanjut usia terlantar dan disabilitas berat agar dapat menjalani kehidupan secara layak;	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL Kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial ✓ Penyediaan Permakanan PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL Kegiatan pengelolaan data fakir miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota ✓ Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN Kegiatan Peningkatan Kualitas Kawasan	6.750.000.000 450.680.960	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Kebijakan	Fokus Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	PD
			Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha ✓ Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni	4.352.975.000	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
3	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Padatkarya	1). Menekan angka penganggur, setengah penganggur dan masyarakat miskin; 2). memupuk rasa kebersamaan dan gotong royong; 3). Meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pusat layanan sosial dasar; 4). Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengembangan masyarakat; dan 5). Menumbuhkan kembangkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA Kegiatan Pelayanan Antar kerja di Daerah Kabupaten/Kota ✓ Perluasan Kesempatan Kerja PENYELENGGARAAN JALAN Kegiatan Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota ✓ Rehabilitasi Jalan	10.073.810.840 20.820.030.120	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
4	Penyediaan pangan dan ketahanan pangan	Kebijakan ini dilakukan dalam rangka penyediaan pangan dan pemanfaatan bahan pangan untuk menjamin ketersediaan dan ketahanan pangan	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KEBUDAYAAN Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya ✓ Pengembangan Lumbung Mataraman PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota ✓ Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian ✓ Pengembangan Kapasitas Kelembagaan	235.000.000 100.000.000 62.062.500	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan

No	Kebijakan	Fokus Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	PD
5	Pengembangan pariwisata berbasis kesehatan	Kebijakan pariwisata berbasis kesehatan diarahkan pada upaya peningkatan kunjungan wisatawan yang mendukung pemulihan ekonomi	Petani di Kecamatan dan Desa		
			PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar ✓ Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	890.238.120	Dinas Pariwisata
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah ✓ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	48.750.000	
			SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar ✓ Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	890.238.120	
6	Penguatan Daya Ungkit dan Daya Saing UMKM dan Dunia Usaha	Kebijakan ini dilakukan dalam rangka memperkuat daya ungkit, daya saing dan kapasitas produksi UMKM dan Dunia Usaha melalui fokus : a. Pemasaran produk lokal Penyediaan wadah interaksi dan pemasaran produk UMKM melalui Pasar Tani dan Pasar Barter b. Penumbuhan bangga dan senang	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN ✓ Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian ✓ Pasar Barter	62.062.500	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat	654.020.000	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian

No	Kebijakan	Fokus Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	PD
		dengan produk lokal c. Penumbuhan Wirausaha Muda	<p>pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota <p>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi <p>PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM) Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro 	<p>410.733.440</p> <p>359.999.900</p>	
7	Reformas Iklim Investasi	Layanan terpadu investasi dan perizinan- Mall Pelayanan Publik	<p>PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal ✓ Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan 	<p>149.330.000</p>	DPMPT

No	Kebijakan	Fokus Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	PD
			Penanaman Modal Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota ✓ Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota ✓ Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota		
8	Pemasaran produk unggulan	Kebijakan Pemasaran Produk Unggulan merupakan salah satu upaya dari Pemerintah Kabupaten Bantul untuk membantu UMKM dalam memasarkan produknya. Menurut Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2020 Pasal 6 Pemasaran Produk Lokal Daerah diselenggarakan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pelaku usaha melalui gerakan penggunaan Produk Lokal Daerah untuk membangkitkan rasa cinta dan bangga terhadap produk lokal Daerah. Adapun cara pemasaran produk local daerah dimuat dalam pasal 7 sebagai berikut: a. Peningkatan kualitas produk yang disesuaikan dengan permintaan pasar dan standar produk; b. Pengendalian harga produk yang bersifat kompetitif sesuai dengan nilai dan kepuasan konsumen; c. Pengembangan jaringan distribusi pemasaran melalui kerjasama dengan Perangkat Daerah, koperasi, toko modern, rumah makan, hotel dan kafe; dan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota ✓ Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil ✓ Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Rp. 654.020.000 Rp. 410.733.440	Disdag DKUKMP

No	Kebijakan	Fokus Kebijakan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	PD
		d. Pengembangan promosi dan komunikasi yang terdiri dari kegiatan publikasi, penjualan secara personal, promosi penjualan, pemasaran langsung, pameran dan forum bisnis.			

Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021

7.2.7. Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Arah Kebijakan Pembangunan Nasional

Program pembangunan daerah yang mendukung pembangunan nasional Tahun 2022 dijabarkan pada tabel sebagai berikut.

Tabel 7.7

Fokus Pembangunan Nasional terhadap Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022

No	Fokus Pembangunan Nasional	Uraian	Fokus Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)	PD
1.	Industri	Untuk meningkatkan nilai tambah sektor industri ditandai pencapaian: a. Pertumbuhan industri pengolahan non migas b. Kontribusi PDB Industri pengolahan non migas c. Nilai realisasi PMA, PMDN Industri pengolahan	Peningkatan Kontribusi PDRB sektor Industri Pengolahan Kabupaten Bantul.	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	564.485.560	Dinas Koperasi, UKM dan Perindustrian
2	Pariwisata	Untuk mempercepat pemulihan dan pertumbuhan sektor pariwisata, ditandai dengan pencapaian : a. Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara b. Peringkat <i>Travel and Tourism Competitiveness</i>	Peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke objek wisata di Kabupaten Bantul	Program Pemasaran Pariwisata	682.785.000	Dinas Pariwisata
3	Ketahanan pangan	Untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat : a. Skor Pola pangan harapan b. NTP c. NTN d. Ketersediaan beras e. Ketersediaan protein hewani f. Nilai tambah tenaga kerja pertanian.	Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat untuk pencapaian skor pola pangan harapan, ketersediaan beras dan ketersediaan protein hewani.	a. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	30.000.000 100.000.000	Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan
4	UMKM	Untuk meningkatkan peran UMKM :	Peningkatan pertumbuhan wirausaha	Program Pengembangan Umkm	410.733.440	Dinas Koperasi dan

No	Fokus Pembangunan Nasional	Uraian	Fokus Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)	PD
		a. Pertumbuhanwirausaha b. Kontribusi UMKM terhadap PDB c. UMKM yang mengakses kredit Lembaga keuangan formal				Perindustrian
5	Infrastruktur	Untuk meningkatkan pemerataan infrastruktur : Pembangunan rusun, BSPS, FLPP	Peningkatan pemerataan infrastruktur melalui BSPS	Program Pengembangan Perumahan	3.214.070.466	Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Pembangunan akses air minum	Peningkatan pemerataan infrastruktur melalui pemenuhan akses air minum	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	1.322.894.201	
		Pembangunan akses sanitasi aman	Peningkatan pemerataan infrastruktur melalui pemenuhan akses sanitasi aman	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	5.128.967.413	
		Rehab jaringan irigasi	Peningkatan pemerataan infrastruktur melalui rehabilitasi jaringan irigasi	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	5.016.335.770	
6	Transformasi digital	Untuk meningkatkan pemerataan dan kualitas layanan digital : a. Masyarakat pengguna internet b. Kecamatan yang terjangkau jaringan serat optik. c. SDM talenta digital	Pengintegrasian berbagai aplikasi untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi, konsistensi, dan akuntabilitas proses perencanaan sampai pertanggungjawaban kegiatan.	- Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan Aplikasi Informatika	500.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
				- Program Aplikasi Informatika	9.684.574.802	
				- Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.092.521.500	

No	Fokus Pembangunan Nasional	Uraian	Fokus Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)	PD
7	Pembangunan rendah karbon	a. Untuk meningkatkan capaian penurunan emisi dan intensitas emisi gas rumah kaca (GRK) : b. Penurunan emisi GRK Nasional c. Penurunan intensitas emisi GRK Nasional	Penurunan emisi Gas RumahKaca terhadap baseline 26,87%	- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) - Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	865.414.560 427.100.000	Dinas Lingkungan Hidup
8	Reformasi perlindungan sosial	Fokus reformasi perlindungan sosial ditandai dengan pencapaian : a. Tingkat kemiskinan 8,5 -9% b. Penduduk tercakup program Jaminan Sosial 87% c. RT miskin dan rentan memperoleh Bantuan Sosial 60% d. PBI JKN 40% penduduk terbawah 110 Juta jiwa.	Upaya perlindungan sosial : a. Pemberdayaan masyarakat b. Pengurangan beban masyarakat miskin	- Program Pemberdayaan Sosial - Program Rehabilitasi Sosial - Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	673.959.448 8.938.751.920 4.074.365.740	Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
9	Reformasi pendidikan dan ketrampilan	Fokus reformasi pendidikan dan keterampilan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM dan Inovasi, yang ditandai dengan pencapaian: a. Pekerja pada Bidang Keahlian Menengah dan Tinggi 41,55% b. Tingkat Penyelesaian Pendidikan SMA Sederajat 70,6% c. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Tinggi 35,62%	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dengan arah kebijakan pembangunan daerah : a. Peningkatan prestasi akademik dan non-akademik siswa b. Pengembangan kapasitas pendidik dan penyempurnaan sarana prasarana pendidikan formal dan nonformal c. Fasilitasi minat dan bakat generasi muda	- Program Pengelolaan Pendidikan - Program Pengembangan Kurikulum - Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	90.069.623.448 1.893.645.840 216.552.802.120 800.000.000	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

No	Fokus Pembangunan Nasional	Uraian	Fokus Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)	PD
		d. 400 Produk Inovasi dari Perusahaan Pemula Berbasis Teknologi (PPBT) e. 900 Paten Domestik	Penguatan Produk Unggulan dan Pemantapan Infrastruktur Pendukung Ekonomi dengan arah kebijakan pembangunan daerah : a. Pembangunan kawasan industri terintegrasi dan pengembangan klaster industri kreatif b. Modernisasi pasar tradisional	- Pembangunan Industri - Program Pengendalian Izin Usaha Industri - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	1.344.041.210 25.735.120 400.000.000	Dinas Koperasi UKM dan Perindustrian
10	Reformasi kesehatan	Fokus reformasi kesehatan dilakukan dalam rangka penanganan Covid-19 dengan meneruskan Vaksinasi Covid-19, serta untuk memperkuat Sistem Kesehatan Nasional, yang ditandai dengan pencapaian: a. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada Balita 18,4% b. Insidensi TB 231/100.000 Penduduk c. Persalinan di fasilitas kesehatan 91% d. Imunisasi dasar lengkap anak usia 12-23 bulan 71% e. Puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar 59%	Pada sasaran daerah terwujudnya derajat kesehatan masyarakat yang tinggi dengan strategi penguatan sistem kesehatan Melalui arah kebijakan: a. Pembudayaan pola hidup bersih dan sehat b. Peningkatan kapasitas dan kualitas layanan Kesehatan c. Peningkatan jaminan perlindungan Kesehatan bagi seluruh warga d. Optimalisasi peran posyandu untuk layanan kesehatan	- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat - Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan - Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman - Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan - Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan	20,362,955,000 352,754,220 826,883,000 943,664,600 600,000,000	Dinas Kesehatan

No	Fokus Pembangunan Nasional	Uraian	Fokus Pembangunan Daerah	Program Pembangunan Daerah	Anggaran (Rp)	PD
		<p>f. RSUD kab/kota dengan 4 dokter spesialis dasar & 3 dokter spesialis lainnya 80%</p> <p>g. Fasilitas Kesehatan terakreditasi: FKTP 80% & RS 90%</p> <p>h. Sistem surveilans: terpadu, <i>real-time</i>, berbasis lab</p>				
11	Pemilu Serentak 2024	<p>a. Pelaksanaan Sosialisasi Pemilu Serentak kepada masyarakat melalui kegiatan Dialog Politik sebanyak 12 kali</p> <p>b. Kesesuaian data penduduk yang terdaftar pada DPT</p>	<p>a. Peningkatan prosentase pemilih yang berpartisipasi</p> <p>b. Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan Sesuai Data Kependudukan</p>	<p>- Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik</p> <p>- Pemutakhiran data pemilih</p>	<p>2.229.678.400</p> <p>215.733.519</p>	<p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <p>Disdukcapil</p>

Sumber : Data diolah, Bappeda Kabupaten Bantul Tahun 2021

BAB VII
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2022 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan PPAS dan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022.

Bantul, 25 Agustus 2021

PIMPINAN DPRD



HANUNG RAHARJO

BUPATI BANTUL



ABDUL HALIM MUSLIH